



PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 8. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 9. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
 14. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kemendukbangga/BKKBN untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
2. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Kemendukbangga adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan subrusan pemerintahan pembangunan keluarga.
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
4. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan subrusan pemerintahan pembangunan keluarga.
5. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri/Kepala ini ditetapkan Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Kepala ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2025

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BAND KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

WIHAJI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Indonesia Emas 2045 bertujuan untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk perekonomian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan sosial budaya, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi pembangunan dan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yang diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Misi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 terdiri dari: (1) transformasi sosial; (2) transformasi ekonomi; dan (3) transformasi tata kelola; dengan ditopang oleh dua landasan transformasi yaitu (4) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; serta (5) ketahanan sosial budaya dan ekologi; yang dilaksanakan dengan mengacu pada tiga kerangka implementasi transformasi (6) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; (7) mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan (8) mewujudkan kesinambungan pembangunan. Transformasi tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan Indonesia Emas dan merupakan komitmen Indonesia dalam melanjutkan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*). 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1:

Gambar 1.1 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang diemban oleh Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki peran strategis untuk mendukung transformasi sosial khususnya Kesehatan untuk semua dan landasan transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi khususnya Pembangunan Keluarga Berkualitas.

Dalam rangka pelaksanaan RPJPN 2025-2045 tahap I telah ditetapkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kemendukbangga/BKKBN mendukung Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; dan Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan RPJMN 2025-2029 tersebut, disusun Rencana Strategis Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029.

1.1 Kondisi Umum

A. RPJMN 2020-2024

Dalam kerangka RPJMN 2020-2024 BKKBN berkontribusi dalam 2 (dua) pencapaian Prioritas Nasional (PN), yaitu: (1) PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; dan (2) PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Tabel 1.1 menggambarkan *baseline* indikator

Prioritas Nasional pada tahun 2020 dan target pada tahun 2024 yang diemban oleh BKKBN.

Tabel 1.1 *Baseline* Tahun 2020 dan Target Tahun 2024 dari Indikator Prioritas Nasional yang Menjadi Tanggung Jawab BKKBN

PN/Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)/Proyek	Indikator	<i>Baseline</i>	Target 2024
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
PP: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	2,45	2,10
KP: Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan			
ProP: Pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu	Percentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	15,19	80,00
KP Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk			
ProP: Sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	Percentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah	47% Provinsi dan 12% Kab/Kota	100% Provinsi dan 45% Kab/Kota
ProP: Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Kependudukan	Percentase Pemerintah Daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan	30% Provinsi dan 21% Kab/Kota	100% Provinsi dan 45% Kab/Kota
	Percentase Kelompok Kerja KKBPK Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	10% Provinsi dan 10% Kab/Kota	50% Provinsi dan 50% Kab/Kota

PN/Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)/Proyek	Indikator	Baseline	Target 2024
	Percentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	33% Provinsi dan 16% Kab/Kota	100% Provinsi dan 50% Kab/Kota
ProP: Pemanfaatan data dan informasi kependudukan	Indeks Kualitas Data dan Informasi Program KKBPK	60,06	70,05
PP: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial			
KP: Kesejahteraan Sosial			
ProP: Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif)	Percentase keluarga yang melaksanakan pendampingan bagi lansia	11,99	16,00
ProP: Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (<i>Long Term Care</i>)	Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	9.807	10.215
PP: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR)	57,90	63,41
	Percentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need KB</i>)	13,40	7,40
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19) (kelahiran	25,00	18,0

Indikator	Baseline	Target 2024	
(hidup per 1000 perempuan)			
KP: Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	24,60	28,39
ProP: Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	29,96	40,00
ProP: Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	Persentase tingkat putus pakai Pemakaian kontrasepsi (<i>Drop out/DO</i>)	25,80	20,00
	Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	38,90	69,52
	Indeks Informasi Metode KB (<i>Method Information Index/MII</i>)	41,20	85,50
	Persentase kesertaan KB di 100 kabupaten/kota dengan kesertaan KB rendah	38,16	39,96
	Persentase penyuluhan KB yang berkinerja baik	55,00	85,00
KP: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat			
ProP: Penurunan Stunting	Jumlah keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar promosi 1000 HPK (keluarga)	3.931.004	4.122.784
	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre	29.126	29.327

PN/Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas (KP)/Proyek Prioritas (ProP)/Proyek	Indikator	Baseline	Target 2024
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Keluarga	53,90	61,00
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	20,7	22,10
PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Indeks Kerentanan Keluarga (Nilai)	11,92	10,00
	Indeks Karakter Remaja (Nilai)	n/a	69,92
KP: Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Nilai)	73,47	77,72
	Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga (Nilai)	34,85	36,00
ProP: Penyiapan Kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	Percentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	32,15	37,46
ProP: peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antar generasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga	Percentase keluarga balita dan anak yang ikut Bina Keluarga Balita (BKB)	48,62	51,50

Dalam melaksanakan RPJMN 2020-2024, Kemendukbangga/BKKBN telah menuangkan sasaran dan indikator kinerja di dalam Renstra Kemendukbangga/BKKBN 2020-2024. Tabel 1.1 memberikan gambaran mengenai capaian strategis BKKBN hingga tahun 2024. Indikator-indikator kunci seperti *Total Fertility Rate (TFR)*, pemakaian kontrasepsi modern,

dan penurunan *unmet need* KB mencerminkan komitmen Kemendukbangga/BKKBN dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta memperkuat layanan kesehatan reproduksi. Target yang ditetapkan juga menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan KB yang lebih merata di seluruh wilayah.

Selain fokus pada pengendalian kelahiran, sasaran dan indikator kinerja Kemendukbangga/BKKBN menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan sistem data. Peningkatan cakupan Kampung KB, pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) oleh daerah, serta kenaikan indeks kualitas data menjadi landasan bagi perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah layanan, melainkan juga dari kualitas informasi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga.

Lebih lanjut, indikator yang terkait dengan pembangunan keluarga, seperti penguatan kelembagaan dan peningkatan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang mengusung 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh, menegaskan perhatian pada ketahanan keluarga secara menyeluruh. Target yang ditetapkan menggambarkan arah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek demografis, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, sasaran dan indikator kinerja Kemendukbangga/BKKBN tersebut menjadi pedoman yang mengarahkan pelaksanaan program menuju terwujudnya pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Capaian Kinerja Renstra 2020-2024

Pada periode 2020-2024, Kemendukbangga/BKKBN telah melaksanakan arah kebijakan dan strategi terkait Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Perbandingan Capaian 2020-2024 terhadap Target akhir Indikator Kinerja Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam Renstra BKKBN 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi					% Capaian 2024 *)	Status Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024		
A. Indikator Sasaran Strategis										
1	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-Rata kelahiran per WUS 15-49 Tahun	2,10	2,45	2,24	2,14	2,14	2,11	99,53	 Tercapai

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi					% Capaian 2024 *)	Status Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024		
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	63,41	57,90	57,00	59,40	60,40	61,70	97,30	 Tercapai
3	Percentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need KB</i>)	Persen	7,40	13,40	18,00	14,70	11,50	11,10	50	 Kurang
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18,00	25,00	24,00	21,00	19,70	18,00	100	 Sangat Tercapai
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai (Skala 1-100)	61,00	53,94	54,01	56,07	61,43	62,40	102,30	 Sangat Tercapai
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	22,10	20,70	20,71	21,00	22,30	22,30	100,90	 Sangat Tercapai
B. Indikator Sasaran Program/Indikator Sasaran Outcome										
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana										
7	Persentase Baduta <i>Stunting</i>	Persen	19,00	27,80	20,80	17,90	18,30	16,1	118,0	 Sangat Tercapai
8	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Nilai (Skala 1-100)	61,00	54,20	58,00	58,60	60,10	61,80	101,3	 Sangat Tercapai
9	Indeks kepedulian terhadap Isu Kependudukan	Nilai (Skala 1-100)	53,40	52,2	52,0	53,16	53,46	53,70	100,45	 Sangat Tercapai
10	Persentase Kampung KB mandiri	Persen	50,00	9,30	17,56	20,07	59,43	47,95	95,91	 Tercapai
11	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	28,39	24,60	24,50	22,20	23,60	25,50	89,82	 Cukup
12	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	Persen	75,00	55,20	76,00	81,26	80,10	81,0	108,0	 Sangat Tercapai
13	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (<i>Drop Out/DO</i>)	Persen	20,00	27,60	21,00	21,60	20,30	20,20	99	 Tercapai
14	Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten	Persen	80,00	32,70	57,20	80,30	82,0	125,70	157,10	 Sangat Tercapai
15	Persentase Kerjasama Internasional	Persen	90,00	88,00	100,00	100,00	100,00	87,50	97,20	

No	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi					% Capaian 2024 *)	Status Capaian
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Bangga Kencana yang diimplementasikan									Tercapai
16	Percentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangga Kencana	Persen	87,00	85,80	80,30	80,30	110,30	87,24	100,30	 Sangat Tercapai
Program Dukungan Manajemen										
17	Tingkat kepuasan (Indeks) layanan Dukungan Manajemen Program Bangga Kencana	Nilai (Skala 1-5)	4,20	3,07	4,12	4,15	4,41	4,48	110,25	 Sangat Tercapai
18	Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Unit Kerja	11	9	9	10	11	14	127	 Sangat Tercapai
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Skala 1-100)	82,00	74,07	75,79	77,34	77,35	82,17	100,2	 Sangat Tercapai
20	Opini atas laporan keuangan dari BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	 Sangat Tercapai
21	Tingkat maturitas SPIP	Level Maturitas 1-5	3,20	3,693	3,056	3,202	3,237	3,608	112,75	 Sangat Tercapai
22	Indeks Sistem Merit	Nilai (Skala 1-4)	4,0	3,645	3,645	3,78	3,78	3,78	94,5	 Sangat Tercapai
23	Sertifikasi ISO 37001	Unit Kerja	5	1	3	10	27	40	760	 Sangat Tercapai
24	Percentase Materialitas Temuan Eksternal terhadap anggaran BKKBN	Persen	0.05	0,0039	0,0026	0	0,0001 06	0	105	 Sangat Tercapai
25	Level Kapabilitas APIP (IACM)	Level Kapabilitas	Level 4	Level 4 (41,3% indikator elemen)	Level 4 (42% indikator elemen)	Level 4 (60% indikator elemen)	Level 3 (Skor 3,015)	Level 4	100	 Sangat Tercapai

Sumber Data : Laporan Kinerja di Lingkungan Kemendukbangga/BKKBN

*) Persen Capaian 2024 adalah realisasi 2024 dibandingkan dengan target 2024

Penjelasan warna capaian:

Evaluasi Akhir Renstra K/L (Data Pemutakhiran)

No.	Interval	Warna	Keterangan Capaian
1	$\geq 100\%$	biru	Sangat Tercapai/Absolut Sustainability
2	>90-99%	hijau	Tercapai/Berkelanjutan
3	60-90%	kuning	Cukup
4	<60%	merah	Kurang
5		putih	Belum dapat diberikan notifikasi

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 (enam) indikator sasaran strategis, dengan uraian sebagai berikut:

- 5 (lima) indikator dapat dicapai dengan kategori sangat tercapai, yaitu, Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dari target 2,10 tercapai 2,11 (rasio capaian 99,53 persen); Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) dari target 63,41 persen tercapai 61,7 persen (rasio capaian 97,30 persen); Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19*) dari target 18 tercapai 18 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun (rasio capaian 100 persen); Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari target 61 tercapai 62,4 (rasio capaian 102,30 persen), dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan dari target 22,1 tahun terealisasi 22,3 tahun (rasio capaian 100,9 persen);
- Sementara itu hanya 1 (satu) indikator dengan capaian kurang yaitu persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) dengan capaian 50 persen. Target *unmet need* tahun 2024 adalah 7,40 persen dan hanya terealisasi 11,1 persen.

Pada program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana terdapat 10 (sepuluh) indikator sasaran program dan sasaran *output*, dengan capaian sebagai berikut:

- 6 (enam) indikator masuk dalam kategori Sangat Tercapai. Keenam indikator ini meliputi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (101,3%), Indeks kepedulian terhadap Isu Kependudukan (100,45%), Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana (108,0%), Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten (157,10%), Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangga Kencana (100,30%), dan Prevalensi Baduta Stunting (118,0%);

- b. 3 (tiga) indikator masuk dalam kategori Tercapai/Berkelanjutan Persentase Kampung KB mandiri (95,91%), Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO) (99%), dan Persentase Kerja Sama Internasional Bangga Kencana yang diimplementasikan (97,20%);
- c. 1 (satu) indikator masuk dalam kategori Cukup yaitu Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (89,82%).

Selanjutnya, terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian pada program dukungan manajemen, dengan capaian sebagai berikut:

- a. 8 (delapan) indikator masuk dalam kategori sangat tercapai yaitu, Tingkat kepuasan (Indeks) layanan Dukungan Manajemen Program Bangga Kencana (110,25%), Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (127%), Indeks Reformasi Birokrasi (100,2%), Opini atas laporan keuangan dari BPK (100%), Tingkat maturitas SPIP (112,75%), Sertifikasi ISO 37001 (760%), Persentase Materialitas Temuan Eksternal terhadap anggaran BKKBKN (105%), serta Level Kapabilitas APIP (IACM) (100%).
- b. 1 (satu) indikator lainnya masuk dalam kategori Tercapai/Berkelanjutan yaitu, Indeks Sistem Merit (94,5%).

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, sasaran program dan dukungan manajemen di atas, BKKBKN pada periode 2020-2024 menargetkan pembuatan 28 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) meliputi Peraturan Kepala, Buku Pedoman maupun Petunjuk Teknis di bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana). Target tersebut dapat direalisasi sepenuhnya.

Dapat disimpulkan pencapaian program Bangga Kencana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi. Untuk program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, perhatian terutama akan diberikan untuk lebih memperbaiki kualitas pelayanan termasuk pemberian informasi komprehensif kepada klien. Diharapkan dengan makin baiknya informasi komprehensif yang diberikan maka akan berdampak pada turunnya tingkat putus pakai dan juga angka *unmet need*. Upaya penurunan tingkat kelahiran akan fokus pada daerah yang TFR dan ASFR 15-19 masih di atas angka rata-rata nasional serta daerah yang MUKP di bawah rata-rata nasional dan daerah yang MUKP 15 tahun ke bawah yang cenderung meningkat.

Untuk program pembangunan keluarga, target membangun keluarga Indonesia menjadi keluarga yang berkembang sudah tercapai. Pembangunan keluarga Indonesia di periode mendatang akan diarahkan pada bagaimana menjadi keluarga yang tangguh. Sedangkan, untuk program kependudukan ke depan diarahkan agar daerah serta lintas sektor di tingkat pusat makin mengintegrasikan Desain Besar Pembangunan Kependudukan

(DBPK) ke dalam perencanaan pembangunan daerah maupun sektoral.

C. Fokus Utama Kemendukbangga/BKKBN

1. Fokus utama Kemendukbangga/BKKBN yang pertama adalah Pembangunan Keluarga. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga Indonesia berkualitas didukung dengan lingkungan yang sehat. Kemendukbangga/BKKBN menetapkan kebijakan dalam penerapan fungsi keluarga secara optimal, diantaranya:
 - a. Mengoptimalkan penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga sesuai siklus hidup dari mulai pra-konsepsi, kehamilan, kelahiran, balita, anak, remaja, hingga lanjut usia;
 - b. Memperkuat ketangguhan keluarga dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anggota keluarga; dan
 - c. Mendorong terbentuknya modal sosial yang akan berdampak positif terhadap pencapaian keluarga yang tenteram, mandiri, dan bahagia menuju keluarga sejahtera dan berkualitas sebagai pondasi bangsa dan negara yang kuat.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 1 butir 10, menyatakan bahwa keluarga yang berkualitas adalah yang terbentuk dari perkawinan yang sah dan memiliki karakteristik sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang sesuai, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga adalah sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk kepribadian, merangsang pertumbuhan dan perkembangan, menanamkan nilai-nilai moral, membentuk karakter, mengembangkan budi pekerti, dan akhlak mulia. Keluarga juga sebagai tempat perlindungan dan ketenteraman dari ancaman fisik maupun psikis. Sehingga pada gilirannya nanti setiap individu dapat berkembang optimal dan berkontribusi serta memberikan manfaat dan berdampak sosial untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya, hingga lanjut usia.

Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan keluarga berkualitas di Indonesia secara periodik, pemerintah mengembangkan 2 (dua) indikator, yaitu: (1) indikator berupa Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK). Indeks ini merupakan komposit berbagai variabel dinamika kehidupan di dalam keluarga ditambah dengan kondisi dinamika sosial di luar keluarga. Indikator ini adalah indikator puncak/akhir dari keluarga berkualitas; dan (2) indeks pembangunan keluarga atau iBangga yang secara khusus melihat perkembangan dinamika kehidupan di dalam keluarga. Hasil dari indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga melalui kategori Tangguh, Berkembang, atau Rentan.

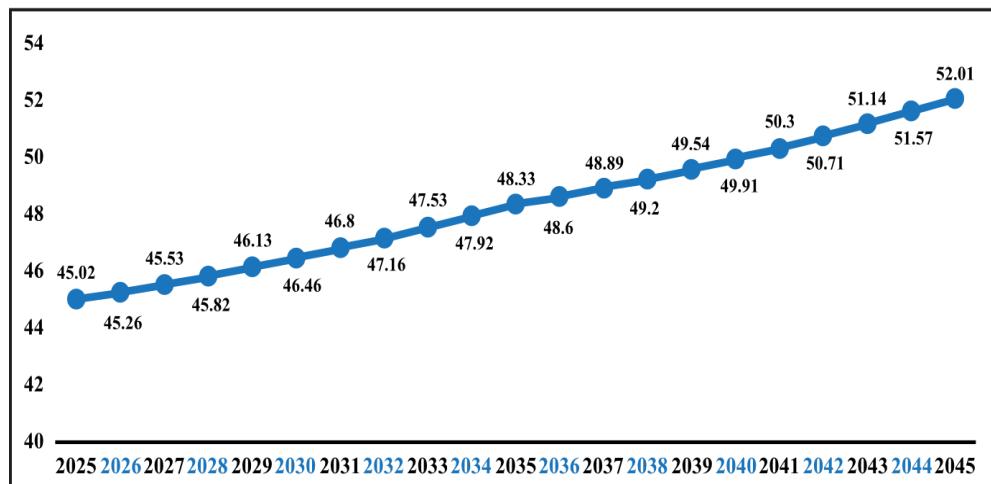
2. Fokus utama yang kedua adalah Kependudukan, yang diarahkan untuk pengarusutamaan penduduk sebagai objek pembangunan dan kerangka isu kependudukan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Mengacu pada Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga, Kemendukbangga/BKKBN mendapat mandat untuk melakukan penyerasian kebijakan perkembangan kependudukan. Penyerasian kebijakan merupakan hal strategis yang harus dilaksanakan agar tujuan pembangunan berwawasan kependudukan dapat dicapai. Selain itu Kemendukbangga/BKKBN mendapat mandat untuk melakukan pengembangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Indonesia (GDPK), yang kemudian saat ini disusun teknis pelaksanaanya melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Dalam pengendalian Kuantitas Penduduk, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, kebijakan dasar meliputi:

- a. Mempertahankan *Total Fertility Rate* (TFR) = 2,1 serta *Net Reproductive Rate* (NRR) = 1 untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang;
- b. Mengurangi disparitas *Total Fertility Rate* (TFR) antar wilayah yang saat ini masih cukup tinggi. Untuk daerah yang TFR-nya telah mencapai atau mendekati 2,1 strateginya untuk menjaga kestabilan agar tidak terus menurun. Sebaliknya, pada provinsi dengan TFR yang masih jauh di atas target nasional (2,1), strateginya untuk menurunkan angka kelahiran secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi wilayah (tidak harus langsung mencapai 2,1). Agar kebijakan ini tepat sasaran, secara berkala akan dilakukan proyeksi kelahiran di setiap provinsi untuk melihat mana yang perlu menjaga tingkat kelahirannya dan mana yang masih harus diturunkan, dengan tetap menjadikan TFR 2,1 sebagai acuan nasional;
- c. Mengkapitalisasi Bonus Demografi. Saat ini Indonesia sedang dalam periode jendela peluang bonus demografi, kondisi di mana proporsi kelompok usia non-produktif berada di bawah 50 persen (Gambar 1.2). Agar bonus demografi dapat secara maksimal berdampak bagi kesejahteraan penduduk dan pembangunan nasional maka perlu dikembangkan dan dikoordinasikan kebijakan kependudukan yang komprehensif yang mampu mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif dan usia lanjut dalam mengelola perekonomian mereka yang dapat berdampak pada perekonomian nasional. Kebijakan kependudukan yang komprehensif tersebut disinergikan secara timbal balik dengan kebijakan sektor pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan diterapkan di seluruh tingkatan wilayah.

Gambar 1.2 Rasio Ketergantungan 2025-2045



Jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan dan dimanfaatkan dengan baik tentunya justru akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan tingkat pengangguran, serta dampak pada bidang lain yang dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

3. Fokus yang ketiga adalah Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif. Perspektif yang pertama merupakan bagian dari hak asasi manusia (hak reproduksi dan keluarga berencana berbasis hak) yang harus dijamin oleh negara, hal ini diperkuat dengan adanya piagam hak asasi manusia secara internasional yang diadopsi oleh Indonesia di mana Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) merupakan hak dasar manusia untuk menentukan kehidupan reproduksinya. Perspektif yang kedua dari sudut pandang bahwa keluarga berencana merupakan investasi yang dapat memberikan manfaat finansial (penghematan) pada pembangunan nasional berkelanjutan, khususnya pembiayaan pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Rujukan utama Peraturan Perundangan Nasional terkait dengan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan keluarga berencana ditujukan untuk mengatur kehamilan, membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Dari perspektif manfaat untuk program pembangunan nasional, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) diarahkan untuk mempertahankan angka kelahiran tetap di sekitar *replacement level* yaitu *Total Fertility Rate* (TFR) 2,1 (hasil PK 2024: TFR 2,11) dan *Net Reproductive Rate* (NRR) 1. Hal ini penting agar Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2045 dapat dicapai. Penduduk Tumbuh Seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Dengan penduduk

tumbuh seimbang, pertumbuhan penduduk dijaga pada tingkat fertilitas ideal, pemenuhan kebutuhan dasar yang diupayakan oleh negara juga dapat lebih terjamin, apakah itu pelayanan kesehatan, pendidikan maupun pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang dilakukan pemerintah secara umum telah mampu mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia, hal ini perlu terus dijaga dengan keberlangsungan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang baik karena Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) setiap saat bisa kembali naik. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat berdampak terhadap peningkatan pembiayaan program/kegiatan dalam pembangunan nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, termuat bahwa kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dengan salah satu fokusnya adalah pengembangan kebijakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang (*Total Fertility Rate/TFR=2,1* dan *Net Reproductive Rate (NRR) =1*) melalui pengendalian dan pencegahan kehamilan berisiko yang didukung peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses dan kualitas pelayanan KBKR dari sisi tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah.

Selain berdampak pada pengaturan aspek kuantitas penduduk, KBKR juga berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Program KBKR bukan sebatas pelayanan kesehatan, namun juga merupakan perubahan nilai atau pola pikir dan perwujudan perubahan perilaku masyarakat dalam merencanakan kehidupan berkeluarga mereka untuk mencapai keluarga berkualitas yang tenteram, mandiri dan bahagia yang secara tidak langsung sangat mendukung dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya ini merupakan dampak lebih lanjut dari upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat utamanya menyangkut kesehatan ibu, bayi, dan anak (termasuk anak usia di bawah dua tahun [Baduta] dan bawah lima tahun [Balita]) serta kesehatan remaja (kelompok usia produktif) sebagai generasi penerus bangsa dan modal Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk meraih Indonesia Emas 2045.

Memperhatikan pentingnya program KBKR bagi pengelolaan kuantitas dan kualitas penduduk, maka program ini telah menjadi perhatian pemerintah sejak tahun 1970. Pada awal pelaksanaannya di Indonesia, program KBKR diarahkan untuk tujuan demografis namun sejalan dengan berkembangnya pelaksanaan program dan berbagai kesepakatan global maka program ini mulai diarahkan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi individu dan keluarga yang dilakukan melalui pendekatan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak.

Hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2020 menunjukkan jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu sekitar 284 juta jiwa. Kualitas SDM merupakan isu yang sangat penting untuk ditangani. Program KBKR harus terus dijalankan secara beriringan dengan program kesehatan lain. Pentingnya KB dan Kesehatan Reproduksi juga tertuang dalam kesepakatan global tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sasaran pembangunan berkelanjutan tidak mungkin tercapai jika program KBKR diabaikan. Dalam sasaran SDGs, secara eksplisit dicantumkan indikator KBKR yang perlu dicapai oleh masing-masing negara.

Kemendukbangga/BKKBN mendukung Tujuan 3 (tiga) dari SDGs Kehidupan Sehat dan Sejahtera, pada 2 (dua) indikator, yaitu: (1) *modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) dengan target 62,2 persen; dan (2) *Total Fertility Rate* (TFR) dengan target menjaga TFR nasional sebesar 2,1.

Selanjutnya, Kemendukbangga/BKKBN juga mendukung Tujuan 5 (lima), yaitu Kesetaraan Gender, dengan indikator proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait dengan kehidupan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan reproduksi. Indikator ini diukur melalui: (1) proporsi perempuan yang melahirkan antara 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19) dengan target 17,8; dan (2) meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan dengan target 22,8 tahun.

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dilaksanakan oleh Kemendukbangga/BKKBN juga memiliki kontribusi besar pada percepatan penurunan *stunting*. Perencanaan kehamilan yang baik akan berdampak pada kesiapan fisik dan mental calon orang tua termasuk kesehatan dan gizi ibu sejak dari pra-nikah, selama kehamilan, dan setelah kelahiran. Secara teori, *stunting* akan dapat dicegah jika 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat dipersiapkan dengan baik. Program 1000 (seribu) HPK sangat sejalan dengan program Bangga Kencana terutama terkait dengan Program Pembangunan Keluarga dan KBKR. Integrasi program pencegahan *stunting* dilakukan pada pelaksanaan program penyiapan kehidupan keluarga bagi calon pengantin, penguatan pencegahan 4 Terlalu (Terlalu Banyak, Terlalu Dekat, Terlalu Muda dan Terlalu Tua), pendampingan calon pengantin, pendampingan ibu hamil, dan pasca persalinan, serta pola asuh bayi di bawah dua tahun (baduta) dan bayi di bawah lima tahun (balita).

Perubahan status kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga/BKKBN menunjukkan besarnya komitmen pemerintah terhadap isu pembangunan keluarga, kependudukan, serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Mandat baru tersebut direspon dengan adanya transformasi dari sebelumnya dengan fokus utama adalah perencanaan keluarga berencana menjadi berfokus pada

perencanaan komunitas dan pengelolaan kependudukan serta pembangunan keluarga. Dengan peningkatan status kelembagaan, pencapaian program Bangga Kencana diharapkan akan lebih baik lagi di masa mendatang.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Potensi dan Peluang

Dalam menyusun Renstra Kemendukbangga/BKKBN tahun 2025-2029, Kemendukbangga/BKKBN mempertimbangkan berbagai potensi dan peluang yang berkaitan dengan sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, dan kerja sama lintas sektor sebagai berikut:

1. Meningkatnya Komitmen Pemerintah terhadap pengelolaan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana dalam pembangunan SDM untuk Mencapai Indonesia Emas 2045.

Dalam RPJPN 2025-2045 dan visi misi pemerintah 2025-2029 yang terkait dengan pembangunan SDM disebutkan secara eksplisit tentang pentingnya keluarga dan keluarga berencana. Di samping itu juga disebutkan bahwa penduduk Indonesia harus dikelola dengan baik agar menjadi potensi untuk pembangunan nasional. Selanjutnya, penguatan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana dijabarkan dengan penguatan kelembagaan menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kemendukbangga/BKKBN).

2. Telah terbentuk Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA) dan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Kemendukbangga/BKKBN memiliki berbagai kelompok kegiatan yang berfungsi sebagai wadah pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam mendukung pembangunan kependudukan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun kelompok kegiatan tersebut adalah:

- a. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagai sarana edukasi, pembinaan, dan pendampingan keluarga sesuai siklus kehidupan.
- b. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) berfungsi sebagai ruang pembelajaran dan pengembangan kapasitas remaja agar terhindar dari perilaku berisiko, serta siap menjadi generasi berencana.
- c. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama akseptor KB dan keluarganya.

Selain itu, berdasarkan website kampungkb.bkkbn.go.id sampai dengan bulan September 2025 Kemendukbangga/BKKBN telah membentuk 76.929 Kampung KB sebagai wadah integrasi program lintas sektor di level *grassroot*. Melalui Kampung KB, berbagai pelayanan terkait dengan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan

Pembangunan Keluarga dapat dihadirkan lebih dekat dengan masyarakat.

Pemanfaatan potensi kelompok kegiatan dan Kampung KB ini perlu diiringi dengan penguatan kapasitas kader dan pengelola melalui pelatihan berkelanjutan dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan pengelolaan kelompok. Selain itu, integrasi program lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital juga perlu dipertimbangkan dalam mendukung efektivitas program. Dengan demikian, keberadaan kelompok kegiatan tersebut dapat menjadi potensi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan keluarga berkualitas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

3. Keberadaan Kantor Perwakilan BKKBN di tingkat Provinsi.

Kantor Perwakilan BKKBN di provinsi memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di daerah. Keberadaan Kantor Perwakilan BKKBN di provinsi menjadi penting dalam memastikan kebijakan nasional dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi dapat memperkuat peran pemerintah pusat di daerah dalam hal:

- a. Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Perangkat Daerah (PD) terkait, serta mitra pembangunan lainnya, yang memungkinkan pelaksanaan program dilakukan secara terpadu lintas sektor;
- b. Mendukung pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program di lapangan melalui jaringan kader, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan kelompok kegiatan di lapangan;
- c. Pemanfaatan teknologi digital untuk pendataan, monitoring, evaluasi, serta edukasi masyarakat; dan
- d. Pengembangan kebijakan dan intervensi berbasis karakteristik lokal.

Peran Perwakilan BKKBN Provinsi yang dimanfaatkan secara optimal diharapkan dapat mendukung percepatan pencapaian target pembangunan nasional.

4. Penyuluhan KB dan PLKB yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan

Penyuluhan Keluarga Berencana (Penyuluhan KB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan instrumen strategis dalam implementasi kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga di lapangan. Sampai dengan tahun 2025 Penyuluhan KB, PLKB, dan PPPK sejumlah 17.912 dengan perincian 9.387 ASN, 8.248 PPPK, 277 CPNS yang bekerja di tingkat lapangan. Penyuluhan KB dan PLKB diharapkan mampu menjadi agen pembangunan sosial yang berperan dalam mentransformasikan norma, pengetahuan, dan perilaku masyarakat menuju tercapainya keluarga berkualitas. Melalui

penyuluhan, pendampingan, serta pendataan keluarga, Penyuluhan KB dan PLKB memiliki peran yang besar dalam mendukung perencanaan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional. Posisi mereka yang bersentuhan langsung dengan komunitas menjadikan Penyuluhan KB dan PLKB sebagai jembatan antara kebijakan makro yang telah disusun di tingkat pusat dengan realitas sosial di lingkungan masyarakat.

5. Kader dan Tim Pendamping Keluarga serta Kemitraan Pentahelix.

Kemitraan merupakan kunci keberhasilan program KB di Indonesia. Seribu Mitra dan Sejuta Kader adalah salah satu jargon keberhasilan program KB. Kemendukbangga/BKKBN memiliki jaringan kader dan tim pendamping keluarga yang tersebar di seluruh daerah. Berdasarkan data yang ada, berdasarkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sampai dengan September 2025 kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (Kader IMP) aktif berjumlah 763.318 orang dan tim pendamping keluarga (TPK) berjumlah 597.694 orang.

Dalam teori komunikasi perubahan perilaku, peran materi dan penyampaian pesan merupakan kunci penting terjadinya perubahan perilaku. Perlu perubahan sikap dan cara pandang dari pengelola program Bangga Kencana, khususnya di tingkat lapangan dalam melihat kebutuhan program dari sisi penerima manfaat. Sesungguhnya informasi tidak lagi bersifat asimetris di mana Kemendukbangga/BKKBN atau petugas dan kader sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan penerima manfaat Program Bangga Kencana dapat mengakses sendiri ribuan bahkan jutaan informasi yang dibutuhkannya. Maka peranan petugas dan kader bukan lagi sebagai sumber informasi, melainkan sebagai pemilah informasi.

Peningkatan profesionalisme kader di tengah berbagai kondisi yang ada saat ini masih menjadi tantangan. Namun demikian, hal ini juga dapat menjadi potensi jika dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana keberadaan kader dikombinasikan dengan tenaga program yang lebih profesional. Dengan dukungan pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi lintas sektor, kader dan TPK dapat bertransformasi menjadi agen perubahan sosial yang berdaya guna dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam rangka penguatan pelaksanaan program, dikembangkan kerja sama dengan berbagai pihak yang meliputi: kementerian/lembaga pemerintah lain, organisasi profesi, organisasi masyarakat, BUMN, swasta, dan organisasi internasional. Kerja sama yang dijalankan dapat dalam bentuk bantuan finansial, teknologi, dukungan pelatihan, penelitian, serta jejaring dalam perluasan program dalam rangka pencapaian target pembangunan. Kerja sama yang telah dikembangkan saat ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko

PMK); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg); Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek; BRIN; BPJS Kesehatan; Bank Indonesia; OJK; BKPM; PLN; IDAI; IDI; IBI; POGI; NU; Muhammadiyah; Asosiasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (AKU); UNFPA; *Partners in Population and Development* (PPD); World Bank; USAID; UNICEF; dan JHCCP.

6. Integrasi Layanan KB dengan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan.

Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan masih merupakan masalah yang serius di Indonesia. *Maternal Mortality Rate* (MMR) berdasarkan hasil *Long Form* (LF) Sensus Penduduk 2020 berada pada angka 189 kematian per 100.000 kelahiran. Angka tersebut masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia yaitu 70 kematian per 100.000 kelahiran. Kematian ibu hamil dan melahirkan sebagian besar dapat dicegah jika kehamilan direncanakan dengan baik oleh pasangan.

Penggunaan kontrasepsi memungkinkan setiap pasangan terutama perempuan untuk merencanakan kehamilan secara sadar, bertanggung jawab, dan sesuai kesiapan fisik maupun psikologis. Perencanaan kehamilan yang matang merupakan langkah awal yang krusial dalam menjamin keselamatan ibu dan anak. Karena itu, program KB memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kematian ibu selama masa kehamilan dan persalinan. Menyadari hal tersebut maka pemerintah melalui berbagai peraturan dan kebijakan kesehatan telah mengintegrasikan layanan KB dengan kesehatan ibu dan anak melalui dorongan untuk mewajibkan seluruh jaringan pelayanan kesehatan ibu dan anak mempromosikan layanan KB.

7. Tersedianya Satu Data Keluarga dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Kemendukbangga/BKKBN menerapkan prinsip Satu Data dalam pengelolaan data keluarga dengan diterbitkannya Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Peraturan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana kementerian/lembaga harus memiliki tata kelola satu data. Satu Data Keluarga adalah data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan

pendataan keluarga dan pemutakhirannya yang dikelola melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Salah satu keunggulan dari data pendataan keluarga maupun hasil pemutakhirannya adalah data tersebut merekam data keluarga serta individu di dalam keluarga sampai *by name by address* (BNBA) sehingga penggunaannya sebagai data per sasaran dan dimanfaatkan sebagai peta operasional Program Bangga Kencana maupun program pembangunan lain berbasis keluarga. Satu data keluarga hasil pendataan keluarga telah digunakan bukan hanya diperuntukkan untuk Program Bangga Kencana tetapi juga oleh kementerian/lembaga lain. Saat ini, satu data keluarga digunakan untuk penetapan kebijakan dalam intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk pencegahan dan penurunan *stunting*, melengkapi kekurangan data intervensi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memperkuat data keluarga penyandang disabilitas dan lanjut usia, pengukuran *Early Child Development Index* (ECDI).

Dengan adanya Satu Data Keluarga ini diharapkan dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih tepat sasaran terutama dalam pengembangan *evidence-based policy* di Kemendukbangga/ BKKBN dan kementerian/lembaga lain. Dengan demikian, kebijakan yang disusun diharapkan mampu menjawab tantangan atas isu strategis yang berkembang di masing-masing wilayah, sehingga dalam penentuan program/kegiatan dapat lebih spesifik dengan memperhatikan karakteristik segmentasi sasaran dan kewilayahan yang akan diintervensi.

8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Teknologi dan penggunaan internet telah berkembang pesat di dunia termasuk juga di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 ini, tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka terdapat peningkatan sebesar 1,4%.

Kontribusi penetrasi internet Indonesia berdasarkan jenis kelamin bersumber dari laki-laki 50,7% dan perempuan 49,1%. Sementara dari segi umur, mayoritas pengguna internet adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun), dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,40%;
- b. Generasi Milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62%; dan
- c. Gen X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 18,98%.

Sisanya, *Post Gen Z* (kelahiran kurang dari 2023) sebanyak 9,17%, *baby boomers* (kelahiran 1946-1964) sebanyak 6,58% dan *pre-boomer* (kelahiran 1945 sebanyak 0,24%). Sedangkan tingkat penetrasi pengguna internet berdasarkan wilayahnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan daerah urban masih paling besar dengan kontribusi 69,5% dan daerah rural kontribusi 30,5%.

Memperhatikan struktur umur penduduk Indonesia yang dalam kurun waktu 20 tahun mendatang masih didominasi oleh penduduk produktif (Indonesia masih dalam masa bonus demografi sampai dengan tahun 2040-2045) maka dapat dipastikan penggunaan internet di Indonesia akan terus berkembang. Masifnya perkembangan teknologi dan penggunaan internet ini akan dijadikan modal oleh Kemendukbangga/BKKBN untuk melaksanakan program Bangga Kencana baik untuk penyampaian informasi dan pendidikan langsung kepada masyarakat maupun menguatkan program di lini lapangan.

Sistem pelatihan tenaga lapangan diarahkan pada pelatihan berbasis *online* dan belajar mandiri. Modul yang dikembangkan haruslah mudah diakses dan dipahami oleh mereka dan dituntut untuk belajar mandiri. Demikian pula materi dan media yang dipakai untuk menyampaikan pesan langsung kepada masyarakat akan didesain sesuai dengan kebutuhan pasar terutama kelompok orang muda yang mendominasi penggunaan internet di Indonesia. Potensi ini sekaligus menimbulkan tantangan pada manajemen Kemendukbangga/BKKBN untuk lebih cepat lagi beradaptasi dengan peluang tersebut. Mereka yang bertanggung jawab terhadap pelatihan tenaga program dan juga mendesain komunikasi perubahan perilaku harus lebih cepat melakukan perubahan strategi pelatihan dan komunikasi perubahan perilaku yang selama ini dilakukan.

Sejak tahun 2015, Kemendukbangga/BKKBN telah mulai melakukan digitalisasi pelaksanaan program Bangga Kencana, meliputi: SIGA, Kartu Kembang Anak (KKA) *Online*, Media Sosial Bangga Kencana, Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu), Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi (SIRIKA), Go Lansia Tangguh (Golantang), Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil), Bank Komunikasi Informasi dan Edukasi (Bank KIE), *website* Kampung KB, Sistem Belajar Mandiri (SiBima), dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan modal yang baik dan akan terus dikembangkan sesuai dengan perubahan teknologi informasi yang terus berkembang.

Namun demikian, penggunaan TIK perlu mempertimbangkan aspek inklusivitas dengan mengakomodasi kebutuhan yang berbeda dari penerima manfaat seperti kelompok disabilitas. Dengan demikian, semua kelompok akan mendapat manfaat dari program Kemendukbangga/BKKBN.

Semakin terpelajarnya penduduk dan berkembangnya penggunaan TIK berpengaruh pada terbukanya pemikiran masyarakat untuk hal-hal baru. Dalam hal ini, masyarakat relatif lebih mudah untuk menerima informasi dan juga semakin besar keinginan mereka untuk mencari informasi. Penduduk juga makin kritis terhadap informasi yang mereka terima. Mereka tidak dengan mudah percaya dengan informasi yang mereka terima. Mereka juga tidak mudah menerima informasi yang berlawanan dengan sistem nilai yang mereka miliki. Kondisi ini merupakan tantangan bagi pengelola program Bangga Kencana.

Validitas dan reliabilitas data dan informasi menjadi sangat penting. Demikian juga tingkat kepercayaan kepada mereka yang menyampaikan pesan. Sehingga, perlu dipastikan tenaga program termasuk kader harus memiliki profesionalitas.

Audiens saat ini membutuhkan sentuhan profesional yang dapat memilah konten untuk mereka. Kelompok-kelompok kegiatan Bangga Kencana di tengah masyarakat akan ditinggalkan ataupun kesulitan dalam mengumpulkan audiens jika tidak mengubah cara pandang ini. Perhatian khusus perlu diberikan untuk meningkatkan:

- a. *Operational effectiveness*, apakah segala saluran yang bersentuhan dengan masyarakat sudah memperlihatkan performa operasional yang efektif dan efisien.
- b. Kolaborasi dan advokasi, apakah setiap saluran yang bersentuhan dengan masyarakat berjalan dan mengantarkan pesan sendiri-sendiri atau memperlihatkan kolaborasi dan kerjasama. Apakah sudah ada upaya-upaya dan bagaimana tingkat efektivitasnya untuk mempengaruhi berbagai program yang ada sehingga berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih.

B. Permasalahan dan Tantangan

Kemendukbangga/BKKBN telah melakukan identifikasi permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan program Bangga Kencana, di antaranya sebagai berikut:

1. Disparitas tingkat kelahiran Total, Remaja, dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan antar Daerah.

Struktur penduduk Indonesia saat ini menunjukkan ciri positif yang ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini tidak lepas dari keberhasilan program KB dan Kesehatan Reproduksi yang telah dilakukan sejak awal tahun 70-an. Keberhasilan KBKR telah menurunkan tingkat kelahiran total secara nasional dari 5,6 pada awal tahun 70-an menjadi 2,14 pada tahun 2023.

Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) dan *window of opportunity*. Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi dan

window of opportunity secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas SDM sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

Total Fertility Rate (TFR) 2,1 secara nasional akan terus diupayakan untuk segera dicapai dan dipertahankan sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Penetapan sasaran ini sebagai salah satu prasyarat meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Skenario bonus demografi dan *window of opportunity* yang diproyeksikan puncaknya terjadi pada periode 2030-2035 akan berubah jika sasaran TFR di atas tidak dapat terpenuhi. TFR yang menurun terlalu cepat di bawah 2,1 akan berdampak pada peningkatan secara drastis proporsi penduduk lansia dan berpotensi menjadi negara dengan pertumbuhan negatif. Sebaliknya, TFR yang kembali melonjak di atas 2,1 akan berdampak pada lonjakan penduduk usia muda non-produktif (0-14 tahun). Peningkatan drastis kedua kelompok non-produktif tersebut (muda dan tua) akan berpengaruh pada kontribusi positif struktur usia penduduk terhadap pembangunan nasional khususnya pembangunan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Untuk memenuhi hal tersebut, perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Selain berupaya mencapai TFR 2,1 dan mempertahankannya, perhatian di bidang pengendalian tingkat kelahiran juga harus diberikan pada isu disparitas tingkat kelahiran yang ada saat ini. Walaupun secara nasional angka TFR sudah mendekati angka ideal yaitu 2,1 namun penghitungan pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2024 menunjukkan besarnya disparitas antar kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan beberapa hal berikut:

- a. 19,1% kabupaten/kota memiliki TFR yang berada di bawah *replacement level* (di bawah 2,1 anak);
- b. 29,4% kabupaten/kota memiliki TFR antara 2,1 anak hingga 2,3 anak;
- c. 8,1% kabupaten/kota memiliki rata-rata TFR di atas 2,3 anak sampai 2,4 anak;
- d. 43,4 % kabupaten/kota memiliki TFR yang berada di atas 2,4 anak.

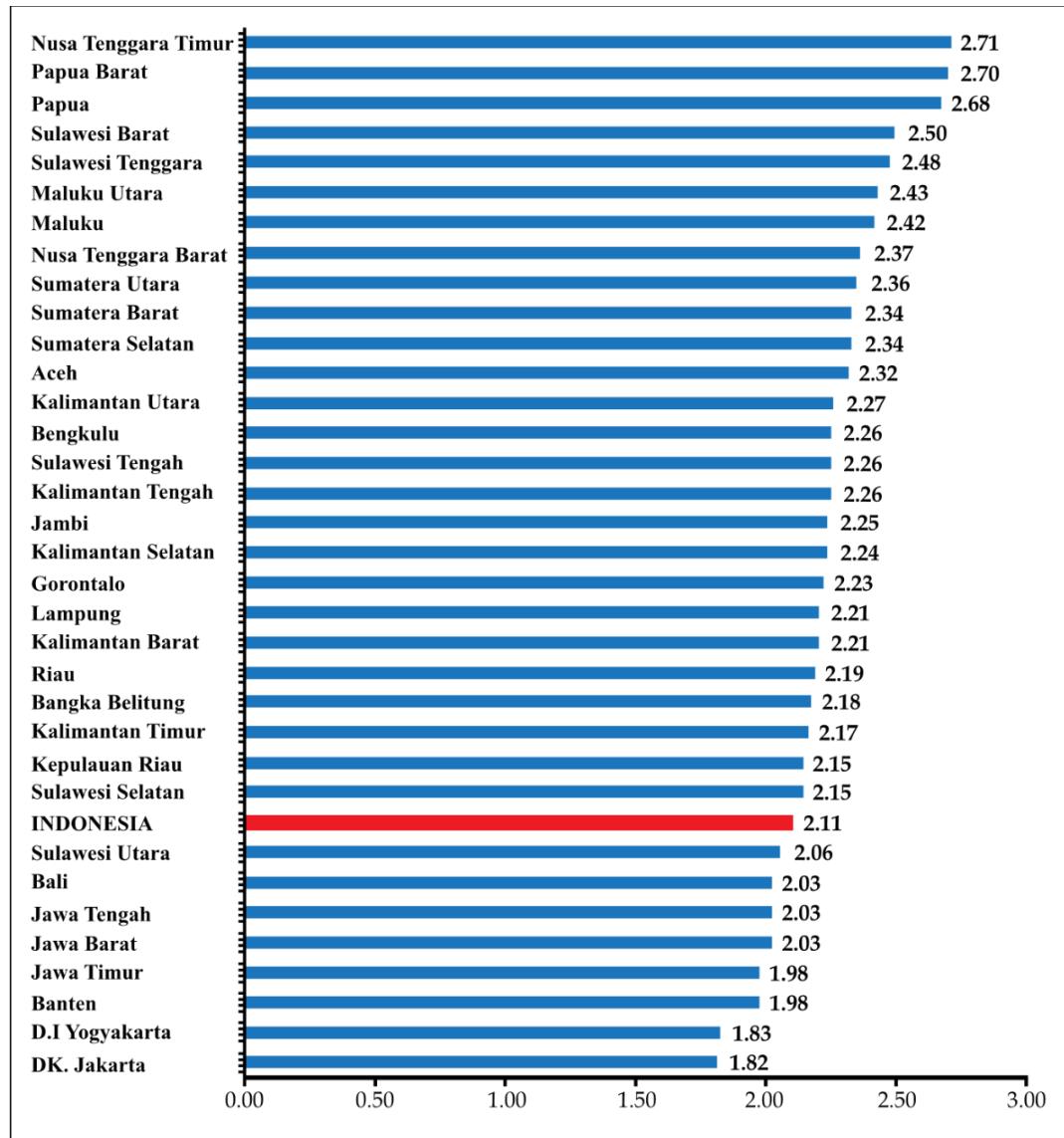
TFR terendah yaitu 1,45 berada di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sedangkan TFR tertinggi 3,92 berada di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua.

Masih banyak kabupaten/kota yang memerlukan waktu lama untuk mencapai TFR pada tingkat *replacement level* terutama kabupaten/kota di luar Pulau Jawa. Konsekuensi dari disparitas TFR ini adalah segmentasi kebijakan dan program khususnya terkait dengan promosi dan pelayanan KBKR tidak dilakukan dengan seragam secara nasional.

Perbedaan tingkat kelahiran pada level provinsi juga masih cukup lebar. Gambar 1.3 memperlihatkan *range* tingkat kelahiran yang diukur dengan TFR berkisar dari 1,82 di provinsi DKI Jakarta sampai 2,71 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walaupun angka nasional sudah mendekati angka ideal 2,1, namun jumlah provinsi yang memiliki TFR lebih tinggi dari angka nasional jauh lebih banyak dibandingkan dengan provinsi yang di bawah angka nasional.

Kemendukbangga/BKKBN akan fokus untuk menurunkan tingkat kelahiran di provinsi-provinsi yang masih di atas angka nasional (2,11) dengan pendekatan KIE massal dan pelayanan KB pada kelompok umur 15-49 tahun. Sedangkan untuk provinsi yang sudah di bawah angka nasional apalagi sudah berada di bawah 2,1, difokuskan untuk menjaga agar tingkat kelahiran jangan turun lebih besar. Pada provinsi yang memiliki TFR mendekati atau lebih rendah dari 2,1, strategi yang diperlukan lebih fokus pada konseling dan pelayanan KB pada kelompok penduduk perempuan yang masih hamil namun mereka masuk dalam kelompok berisiko tinggi yaitu mereka yang terlalu muda, terlalu tua, jarak kehamilannya terlalu dekat, dan jumlah anak terlalu banyak (4T). KB pascapersalinan dan juga penggunaan kontrasepsi jangka panjang akan lebih difokuskan pada kelompok sasaran ini.

Gambar 1.3 Total Fertility Rate Berdasarkan Provinsi



Sementara itu *Age Specific Fertility Rate (ASFR)* 15-19 tahun atau sering disebut sebagai fertilitas remaja dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) juga merupakan indikator KBKR yang penting. 2 (dua) indikator ini menggambarkan sehat atau tidaknya kondisi kehidupan reproduksi perempuan.

Para ibu yang masih berusia muda atau masih remaja menghadapi risiko kematian yang disebabkan oleh kehamilan berisiko dan komplikasi persalinan, serta kelahiran prematur dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Kehamilan dan kelahiran pada saat masih remaja juga mempunyai dampak sosial dan ekonomi salah satunya adalah hilangnya kesempatan pendidikan ketika kehamilan yang memaksa perempuan muda untuk meninggalkan sekolah. Karena berbagai dampak buruk tersebut, maka fertilitas remaja dan perkawinan usia muda (di bawah 18 tahun) akan terus diupayakan untuk diturunkan.

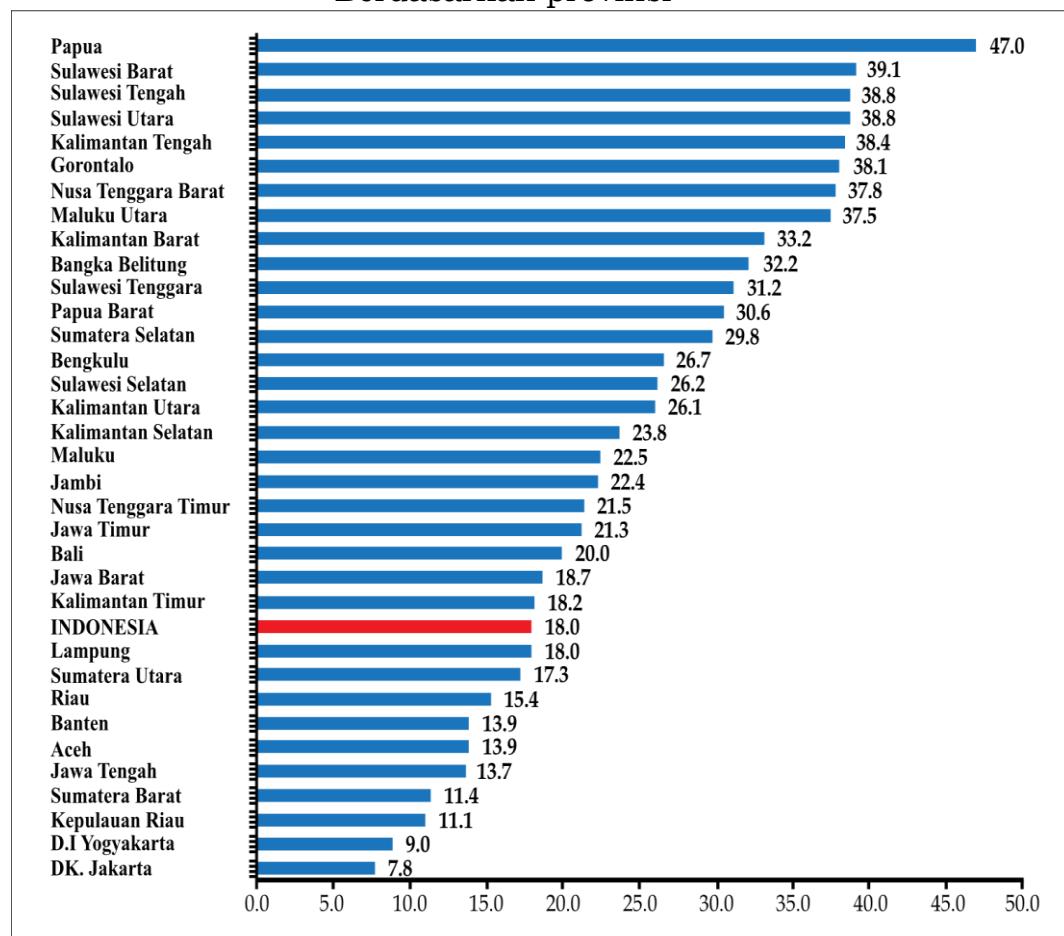
Perhatian seksama akan difokuskan terhadap daerah yang memiliki tingkat kelahiran remaja yang tinggi dibandingkan angka nasional. Pendataan Keluarga 2024 mencatat 29,2 persen kabupaten/kota yang berada di bawah angka nasional (18 kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun) sedangkan sisanya 70,8 persen masih berada di atas angka

nasional. Daerah-daerah yang masih di atas angka nasional inilah yang akan menjadi fokus penggarapan program pada periode Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029.

Sedangkan untuk tingkat provinsi, program Genre akan lebih menyasar pada provinsi-provinsi yang ASFR 15-19 masih di atas angka nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 1.4.

Range Tingkat kelahiran pada usia remaja yang diukur dengan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 berkisar dari 7,8 di provinsi DKI Jakarta sampai 47 di provinsi Papua (Gambar 1.4). Dari Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa sebagian besar provinsi angkanya masih di atas rata-rata nasional bahkan beberapa provinsi hampir 3 (tiga) kali lebih tinggi daripada angka nasional.

Gambar 1.4 *Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun Berdasarkan provinsi*



Provinsi dengan *Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun* yang masih tinggi (di atas angka nasional) akan mendapat perhatian dari Kemendukbangga/BKKBN melalui program remaja dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada kelompok Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah (PUS MUPAR). Penurunan kehamilan dan kelahiran pada kelompok remaja ini akan berdampak besar pada kualitas anak dan keluarga di masa mendatang.

Selaras dengan peningkatan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) menjadi 22,3 tahun di tahun 2024, angka perkawinan

anak juga menunjukkan penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023 serta 5,90 persen tahun 2024 (KemenPPPA dan BPS). Namun ada kecenderungan kenaikan perkawinan pada usia yang lebih muda yaitu 15 tahun.

Perkawinan pada usia anak membawa banyak risiko. Perempuan yang menikah pada usia anak cenderung lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, kehamilan berisiko tinggi dan kematian ibu, risiko berat bayi lahir rendah, dan *stunting*. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi selanjutnya yaitu jebakan lingkaran kemiskinan dikarenakan rendahnya akses terhadap fasilitas penunjang keterampilan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, dan gizi serta lingkungan tempat tinggal yang kondusif, sehingga mengurangi kesempatan untuk seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya. Perkawinan anak meningkatkan kerentanan keluarga. Namun kerentanan keluarga juga salah satu dari penyebab perkawinan anak.

2. Belum Idealnya pencapaian Angka mCPR, *Unmet Need*, dan Putus Pakai Penggunaan KB

Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), *unmet need* KB dan putus pakai/*drop out* merupakan ukuran penting dalam menilai capaian program KB. Ketiga indikator tersebut merupakan *proximate determinant* yang penting dalam penghitungan tingkat kelahiran. Belum idealnya pencapaian tiga indikator tersebut terkait dengan belum maksimalnya KIE dan konseling serta akses dan kualitas pelayanan. Karena itu upaya meningkatkan mCPR, menurunkan *unmet need* dan menurunkan tingkat putus pakai akan dilakukan dengan meningkatkan kualitas KIE dan konseling serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB.

Peningkatan kualitas KIE dan konseling dimaksudkan agar masyarakat terutama generasi muda dan mereka yang belum ber-KB makin memahami manfaat KB sesuai dengan kebutuhan mereka. Data memperlihatkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia mengetahui program KB namun kurang dari 50 persen yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses reproduksi (SDKI 2017). Kegiatan KIE ke depan akan lebih difokuskan pada komunikasi *below the line* melalui kegiatan kelompok. Kualitas konseling yang dilakukan oleh tenaga pelayanan KB juga akan ditingkatkan agar klien lebih merasa nyaman dalam ber-KB dan dampaknya pada penurunan tingkat putus pakai dan meningkatnya kesertaan ber-KB.

Peningkatan akses ber-KB dimaksudkan untuk meningkatkan layanan KB bagi calon akseptor di manapun mereka berada. Dengan demikian, *unmet need* KB dapat diturunkan, mCPR

pada gilirannya akan meningkat serta kehamilan tidak diinginkan dapat ditekan. Upaya perluasan akses ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran pelayanan bergerak (*mobile*), serta semakin mempererat kerja sama dengan pihak swasta terutama bidan praktik swasta, perusahaan swasta serta mitra kerja lainnya yang memiliki sarana pelayanan KB seperti organisasi masyarakat dan juga TNI/Polri. Sedangkan peningkatan kualitas pelayanan berupa pemberian konseling yang baik dan komprehensif serta pelayanan kontrasepsi yang berkualitas. Kondisi ini meningkatkan kenyamanan klien untuk ber-KB dan menurunkan efek samping yang pada gilirannya akan menurunkan *drop out* KB dan *unmet need* KB serta meningkatkan mCPR. Kualitas konseling di Indonesia masih merupakan kendala besar. Data *Method Information Index* (MII) saat ini adalah 47,72 persen dan akan diupayakan meningkat menjadi 61,74 ada tahun 2029. MII merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan KB yang disepakati secara global saat ini.

3. Program Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang Sudah Memasuki Tahapan Dewasa.

Program KB di Indonesia sudah masuk pada tahap dewasa/matang (USAID yang salah satunya ditandai dengan relatif tingginya tingkat *Modern Contraceptive Prevalence Rate* [mCPR] yaitu sekitar 60%). KB sudah menjadi kebutuhan hidup pada sebagian besar keluarga Indonesia. Mereka dengan pengetahuan dan kesadaran akan memilih apakah ingin ber-KB atau tidak. Klien pun dapat dengan mudah untuk berpindah dari ber-KB menjadi tidak ber-KB manakala mereka mendapat informasi atau pelayanan yang berbeda dengan “*value*” atau nilai yang ada di benak mereka. Mereka juga makin cerdas dalam mengambil keputusan, serta memiliki kesadaran dalam menentukan jumlah anak ideal yang diinginkan.

Pembelajaran dari berbagai negara dan bukti ilmiah memperlihatkan bahwa program KBKR yang sudah masuk pada tahap dewasa perlu lebih menekankan pada aspek kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Pendekatan program harus dikembangkan secara inovatif dan inklusif dengan memperhatikan kondisi yang ada di masing-masing wilayah. Dalam kaitan ini maka kajian dan analisis kebijakan serta peninjauan pembelajaran dari berbagai negara yang sebanding perlu selalu dilakukan.

Tantangan program KBKR pada periode 2025-2029 ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pemberian informasi dan pendidikan, serta penyediaan pelayanannya. Peningkatan kualitas yang dimaksud termasuk untuk kesiapan tenaga pemberi pelayanan dan informasi, materi informasi dan pelayanan, serta ketersediaan data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program.

4. Perubahan Dinamika Demografi Secara Global yaitu Bonus Demografi, Penuaan Penduduk, dan Migrasi

Dinamika kependudukan/demografi Indonesia ke depan akan semakin kompleks. Faktor globalisasi juga memberi pengaruh besar terutama terkait dengan migrasi internasional baik yang keluar maupun masuk. Karena itu dibutuhkan kebijakan dan program yang komprehensif untuk merespons dinamika demografi tersebut.

Berikut adalah dinamika demografi Indonesia yang akan mendapat perhatian pada periode 2025-2029:

a. Bonus Demografi.

Indonesia saat ini sedang berada di dalam periode bonus demografi. Periode tersebut akan menutup setelah tahun 2045. Tantangannya adalah bagaimana mengcapitalisasi pemanfaatan bonus demografi tersebut. Besarnya proporsi penduduk usia produktif menghadirkan peluang besar bagi pembangunan nasional. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, penduduk usia produktif dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing bangsa. Namun, peluang tersebut hanya dapat dioptimalkan jika tersedia lapangan kerja yang memadai dan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki angkatan kerja. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja baru setiap tahun menuntut penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan inklusif. Apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, melimpahnya penduduk usia produktif justru dapat menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran massal, meningkatnya angka kemiskinan, dan melemahnya stabilitas sosial-ekonomi. Dalam hal ini, penyiapan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Dibutuhkan kebijakan kependudukan yang komprehensif yang kemudian disinergikan dengan kebijakan pembangunan lainnya seperti kebijakan ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, kesehatan, dsb. Kemendukbangga/BKKBN akan berperan dalam mengembangkan kebijakan dan *grand design* kependudukan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk kemudian disinergikan dengan kebijakan pembangunan lainnya baik di pusat maupun di daerah.

Besarnya proporsi penduduk usia produktif terutama kelompok usia 15-24 tahun dan masih besarnya jumlah penduduk kelompok usia 0-14 tahun berimplikasi pada strategisnya program pemberdayaan keluarga (pilar pertama program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana [Bangga Kencana]). Keluarga sebagai wadah pertama dan utama pembentukan karakter individu harus terus diperkuat.

Pendataan Keluarga tahun 2023 memperlihatkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indonesia sudah mencapai 61,43 pada tingkat nasional, yang artinya masih berada pada fase keluarga berkembang dan belum mencapai keluarga tangguh. Ini tentu bukan kondisi yang ideal. Kegagalan Indonesia menyiapkan penduduk usia 0-14 tahun saat ini, yang mana mereka akan menjadi penduduk usia produktif pada tahun 2035-2040/2045, tentu berdampak buruk pada pembangunan nasional dan kehidupan bangsa, sehingga diperlukan penyiapan generasi berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kemendukbangga/BKKBN juga akan berperan dalam menyiapkan anak balita dan generasi muda melalui program BKB dan Genre. Anak dan remaja perlu dipersiapkan dengan keterampilan hidup (*life skill*) di samping isu kehidupan berkeluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Diharapkan para anak dan remaja lebih adaptif dan responsif dengan perubahan dan tantangan kehidupan anak dan generasi muda termasuk kesiapan untuk bersaing dalam pasar kerja.

- b. Meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut
Proporsi penduduk lanjut usia (Lansia) di Indonesia akan terus meningkat. Saat ini 7,59 persen penduduk yang ada adalah lansia. Angka ini akan meningkat menjadi 8,92 persen pada tahun 2029. Bila tidak disiapkan dengan baik, perubahan ini akan menambah beban sistem kesehatan dan perlindungan sosial. Namun disisi lain, kelompok lansia sebenarnya memiliki potensi besar sebagai agen stabilitas sosial dan transmisi nilai dalam keluarga.

Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat. Penting untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang spesifik, yang bertujuan untuk memperkuat lansia secara fisik, mental, dan sosial, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang tangguh dan berdaya yang bercirikan Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif.

Dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penghormatan, kemandirian, kesejahteraan, dan kebahagiaan lansia, pemerintah dapat memastikan bahwa generasi yang lebih tua dapat menjalani masa tua mereka dengan martabat dan kualitas hidup yang baik. Ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu lansia, tetapi juga untuk membangun keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang inklusif secara keseluruhan.

Dengan menyiapkan lansia sedini mungkin maka Indonesia akan dapat memanfaatkan bonus demografi kedua yaitu mereka yang walaupun secara usia sudah dikategorikan sebagai penduduk lansia namun mereka masih tetap produktif atau paling tidak, tidak menjadi beban bagi keluarga dan negara.

Dalam kaitan dengan lanjut usia, perlu diperhatikan pula segmen usia produktif yang masuk dalam kategori pra-lansia, selain dari segmen lansia itu sendiri. Saat ini di Indonesia, sebagian besar lansia masih tinggal bersama keluarganya yang produktif. Oleh karena itu penyiapan keluarga dalam memahami dan mendampingi lansia untuk perawatan jangka panjang dapat pula diarahkan untuk penyiapan diri mereka dalam konteks tahapan pra lansia.

Pada segmen pra-lansia, edukasi dan penguatan perilaku penting untuk dilakukan khususnya terkait persiapan fisik dan kesehatan, pengetahuan tentang proses penuaan, kesehatan mental dan emosional, serta kesiapan finansial. Edukasi pra-lansia memberikan kesempatan bagi individu untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk memasuki tahap lansia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal di atas, individu dapat memasuki masa pensiun dengan lebih percaya diri dan siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi.

Sementara itu bagi lansia yang berada dalam pengawasan dan perlindungan mereka, keluarga juga harus dipersiapkan agar memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka panjang (*long-term care*) lansia. Tujuh dimensi lansia tangguh tersebut adalah; (1) Spiritual, (2) Intelektual, (3) Fisik, (4) Emosional, (5) Sosial-Kemasyarakatan, (6) Profesional Vokasional, dan (7) Lingkungan. Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi lansia yang aktif (*active aging*) yang dapat bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya.

Kemendukbangga/BKKBN melalui kegiatan BKL akan berperan dalam meningkatkan “Lansia Produktif” dengan modul keterampilan sosial dan peran mentoring pasangan muda, pelibatan lansia dalam pendidikan keluarga, *parenting*, dan pendidikan nilai serta upaya pengintegrasian kebijakan berbasiskan kebutuhan lansia ke dalam sistem perlindungan sosial.

- c. Meningkatnya Mobilitas Penduduk baik Internal maupun Internasional.

Makin mengecilnya jumlah anak ditambah dengan kemudahan komunikasi dan transportasi memberi kesempatan kepada orang tua (ayah maupun ibu) untuk bekerja di luar rumah bahkan melampaui batas wilayah tempat tinggalnya. Bahkan banyak dari orang tua yang

melakukan mobilitas untuk bekerja di tempat lain bahkan sampai melewati batas negara pada kurun waktu tertentu. Fenomena keluarga dengan orang tua tunggal atau bahkan anak yang diasuh oleh keluarga besar karena mobilitas salah satu dari orang tuanya atau keduanya makin sering dijumpai di daerah tertentu (daerah pengirim migran) dan ini diperkirakan akan terus meningkat. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pada kurun waktu Januari - Oktober 2023 tercatat sekitar 237 ribu Tenaga Kerja Indonesia yang pergi ke luar negeri. Dari data pengiriman uang, Bank Indonesia mencatat bahwa tahun 2022 ada sekitar 3,44 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Fenomena mencari pekerjaan di luar wilayah tempat tinggal tentunya berdampak positif pada ekonomi keluarga namun juga memiliki dampak pada kehidupan sosial dan komunikasi dalam keluarga, termasuk pola pengasuhan anak. Program Bangga Kencana khususnya program utama yang pertama, pembangunan keluarga, mengantisipasi peningkatan fenomena orang tua tunggal atau anak yang diasuh oleh keluarga besar. Perubahan dinamika kependudukan utamanya perubahan struktur umur dan pola mobilitas dan migrasi penduduk saat ini belum terlalu mendapat perhatian dari pengambil kebijakan terutama di tingkat lokal dan akan menjadi fokus perhatian dalam periode renstra 2025-2029.

5. Perubahan Pola Pengasuhan Generasi Z dan *Post Generasi Z* (Generasi Alfa)

Berbagai studi mengenai keluarga menunjukkan pentingnya pengasuhan (*parenting*) dalam membentuk karakter seseorang. Isu pengasuhan semakin menguat di abad 21 terutama terkait dengan masalah-masalah sosial yang marak timbul, seperti kekerasan pada anak, anak jalanan, putus sekolah, dan remaja yang berhadapan dengan hukum menghiasi berbagai diskusi mengenai pendidikan di dalam keluarga.

Visi besar untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas yang menjadi komitmen pemerintah telah menjadi visi bersama di tingkat keluarga, keinginan dan kebutuhan untuk meninggalkan generasi yang lebih baik. Generasi muda semakin mawas terhadap tantangan zaman mereka, sehingga semakin berhati-hati dan semakin rajin mencari informasi serta referensi untuk tumbuh kembang anak-anak mereka.

Hal ini menjadi tantangan bagi Kemendukbangga/BKKBN dalam penyelenggaraan programnya. Kompetensi penyelenggara program dibutuhkan dalam melahirkan dan mengantarkan intervensi program pembangunan yang sungguh-sungguh bermakna dan memiliki nilai praktis bagi keluarga-keluarga modern ini. Nilai dan aspirasi yang semakin beragam menyebabkan intervensi program dan turunannya dituntut untuk dapat inovatif dan mampu menyesuaikan dengan konteks situasi. Bukan lagi *one-fit-for-all*. Dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan akan diturunkan dalam tataran program praktis untuk menemukan

makna di tengah generasi baru Indonesia. Sehingga setiap program dapat benar-benar menemukan relevansinya dalam mempersiapkan keluarga Indonesia yang lebih berdaya untuk menghadapi perubahan zaman.

Wajah usia produktif Indonesia pada 5 (lima) tahun ke depan terdiri dari Generasi Z (yang saat ini berada pada rentang usia 12-27 tahun) dan Generasi Post Gen Z atau dikenal juga dengan Generasi Alfa (yang saat ini berada pada usia 11 tahun ke bawah), serta para orang tua mereka dari Generasi X (44 tahun hingga 59 tahun) dan Milenial (28 hingga 43 tahun). Mereka adalah penerima manfaat akhir utama dari keberhasilan program Bangga Kencana, khususnya di bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK).

Untuk itu perlu pemahaman yang komprehensif terhadap karakter dan tantangan yang dihadapi oleh kedua generasi di atas dan orang tua mereka agar intervensi program Bangga Kencana dapat efektif dan tepat guna. Generasi Z yang sering juga disebut sebagai Generasi Digital atau iGen, lahir dan tumbuh dalam era teknologi yang semakin maju dan terkoneksi. Mereka dikenal sebagai individu yang terampil dalam penggunaan teknologi, menguasai berbagai platform sosial, dan memiliki akses ke informasi dengan mudah. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan budaya dan identitas, kreatif, ambisius, dan berani mengemukakan pendapat, mendebat, serta memiliki keinginan untuk bebas.

Di sisi lain, Generasi Alfa lahir dan tumbuh di tengah-tengah perkembangan teknologi yang bahkan lebih canggih lagi. Dikelilingi oleh kemajuan *artificial intelligence (AI)*. Tahun kelahiran mereka bersamaan dengan meledaknya penggunaan aplikasi, layar sentuh, dan akses pada internet. Mereka selalu terkoneksi secara global. Mereka menjadi akrab dengan perangkat digital sejak usia dini, bahkan sebelum mereka mulai berbicara dengan lancar. Mereka tidak bisa membayangkan dunia tanpa teknologi. Generasi Alfa cenderung lebih terbiasa dengan lingkungan *virtual* daripada generasi sebelumnya, menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan teknologi dan cara berkomunikasi yang baru. Keterampilan *multitasking* mereka dan keterampilan berpikir cepat sering kali mengejutkan.

Sementara itu orang tua dari Generasi Z dan Alfa berada dalam posisi menantang dalam menghadapi era digital. Mereka adalah Generasi Milenial dan Generasi X. Dalam waktu 10 tahun perkembangan teknologi memutarbalikkan realita keseharian mereka. Generasi Milenial dan Generasi X mengalami perubahan teknologi yang begitu cepat. Mereka mengalami perubahan-perubahan yang dibawa oleh teknologi, dari mulai mengalami sistem kirim uang dengan cara wesel hingga sekarang menjadi *cashless society*; surat, telegram, majalah, koran, dan *channel TV* yang terbatas, kemudian bergeser menjadi *WA call*, *zoom* serta *video conferencing*, bioskop, *channel*, dan ratusan pilihan *channel* untuk *entertainment* dan berita.

Kehadiran teknologi yang begitu cepat dalam satu dekade ke belakang menjadi tantangan besar bagi mereka yang lahir dan sebagian dari usianya tumbuh dengan cara hidup yang lebih konvensional. Meskipun sebagian dari mereka berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan ini, namun masih ada yang kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut.

Beberapa implikasi yang terjadi:

- a. Generasi Z dan Alfa seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana menggunakan teknologi dan ini dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga. Misalnya, orang tua mungkin tidak sepenuhnya memahami betapa pentingnya peran media sosial bagi anak-anak mereka, sementara anak-anak bisa merasa terisolasi jika tidak diizinkan untuk terlibat dalam aktivitas *online* yang populer di kalangan teman sebayanya.
- b. Adiksi terhadap teknologi adalah salah satu fenomena sosial lainnya, yang berpengaruh pula pada kesehatan mental, kesehatan fisik, mengurangi jam tidur dan istirahat, dan mempengaruhi interaksi sosial secara keseluruhan dalam keluarga, mengubah dinamika komunikasi dan memperumit cara-cara tradisional dalam menyelesaikan masalah.
- c. Bermunculan kerentanan-kerentanan jenis baru, seperti: *cyber bullying*, *phising*/pencurian data informasi pribadi, prostitusi *online*, rentenir *online*, dst. Kompleksitas di atas diperkaya juga dengan kesenjangan ekonomi, edukasi, dan akses infrastruktur yang berbeda jauh antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Menuntut semakin cermat dan teliti komunikasi perubahan perilaku dan sosial harus dilakukan serta program-program intervensi penguatan fungsi keluarga. Perlunya sosialisasi fungsi keluarga secara intens ke sasaran utama Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) namun juga perlu menerjemahkannya dalam konteks kebutuhan yang lebih kontemporer dan konteks situasi yang berbeda pada segmen khalayak sasaran yang berbeda pula.

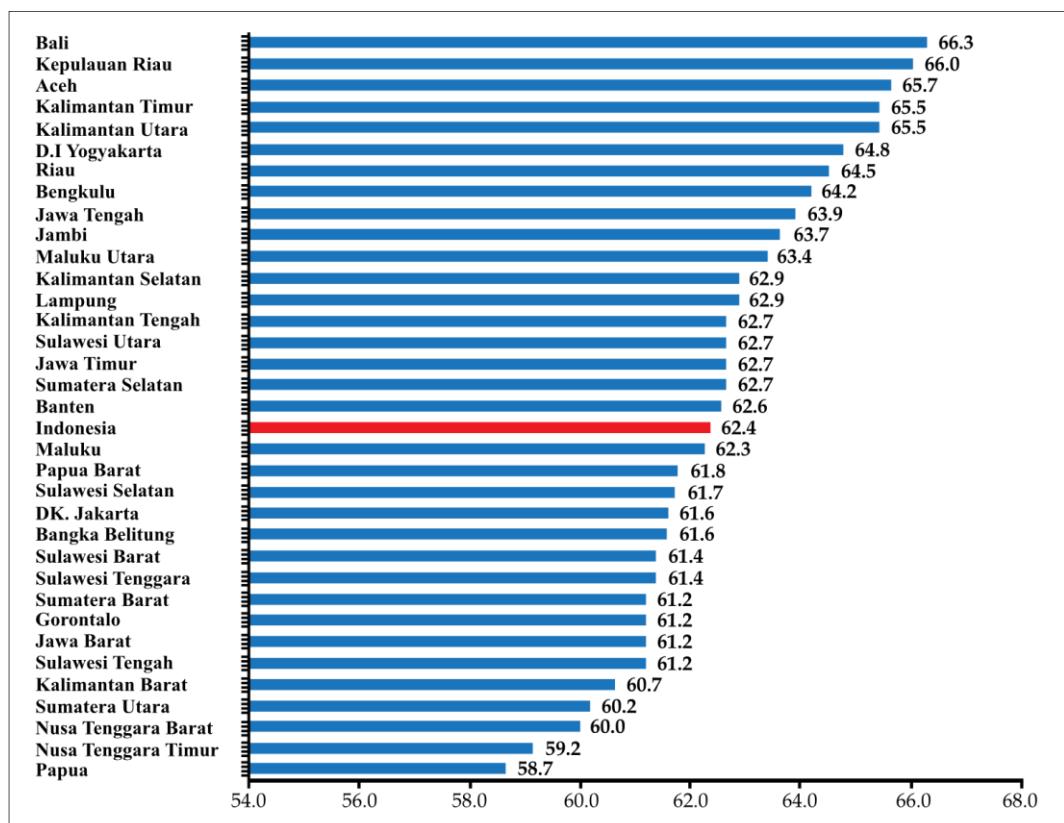
Dalam hal ini, informasi dan konten yang terstandarkan harus tersedia, namun didampingi dengan tenaga lapangan yang semakin handal untuk membawakan sesi yang bermakna, dengan menggunakan berbagai saluran yang ada, optimisasi digital, serta melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk sungguh-sungguh mengatasi kesenjangan yang harus diisi dan senantiasa diperbaiki.

6. Meningkatkan kapasitas keluarga dalam melaksanakan 8 Fungsi Keluarga

Program pembangunan keluarga dalam Renstra 2020-2024 telah berhasil meningkatkan indeks pembangunan keluarga (iBangga) melampaui dengan apa yang ditargetkan. Namun hasil tersebut masih jauh dari kondisi ideal dimana saat ini

keluarga Indonesia masih masuk dalam kategori berkembang. Disparitasnya pun masih sangat lebar sebagaimana terlihat pada Gambar 1.5 iBangga tertinggi berada di Provinsi Bali dan terendah berada di Provinsi Papua. Perhatian perlu diberikan kepada provinsi-provinsi yang tingkat indeksnya masih di bawah rata-rata nasional termasuk 2 provinsi utama di Indonesia yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pada periode 2025-2029 perhatian besar akan diberikan pada upaya meningkatkan kapasitas keluarga dalam melaksanakan 8 fungsi keluarga yang nantinya status pembangunan keluarga Indonesia akan menjadi kategori tangguh.

Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Keluarga Berdasarkan Provinsi



Jika dirunut dari sejak persiapan pernikahan sebelum keluarga baru lahir dan tumbuh, program penyiapan calon pengantin merupakan pintu masuk strategis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2021–2023) jumlah pernikahan setiap tahunnya berkisar antara 1,5–1,7 juta.

Sebagian besar dari mereka yang baru menikah memutuskan untuk memiliki anak. Selanjutnya orang tua memasuki tahapan kehamilan, menyusui, balita, anak pra-remaja, dan remaja. Pasangan baru memulai kehidupan menjadi orang tua seringkali tanpa persiapan dan cenderung mewarisi pola asuh dan komunikasi masa lalu saat mereka dahulu dibesarkan.

Berangkat dari latar belakang pola asuh orang tua di rumah, akhir-akhir ini, terdapat banyak peristiwa menyediakan terkait dengan perkembangan mental anak dan remaja di Indonesia. Angka perkawinan anak meningkat karena banyaknya remaja yang hamil di luar nikah, angka penculikan anak meningkat

karena pertemanan di media sosial, serta semakin banyak kasus anak dan remaja yang menjadi pelaku kriminal seperti penganiayaan kepada sesama remaja, bahkan hingga menjadi bandar narkoba.

Hal-hal yang disebutkan di atas sebenarnya tidak terjadi seketika. Perkembangan otak dan kepribadian anak terjadi secara bertahap. Penelitian mengenai perkembangan otak manusia menjelaskan bahwa dalam masa perkembangannya, anak dan remaja memiliki dorongan yang tinggi untuk melakukan hal-hal baru, sedangkan mereka masih bisa sangat impulsif dalam berperilaku, dan tidak pandai dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Maka dari itu, diperlukan peran orang tua atau dewasa lain di lingkungan anak yang mampu mendampingi perkembangan mereka untuk memenuhi tugas perkembangan mereka, seperti memfasilitasi keingintahuan, mengajarkan nilai-nilai dan batasan, hingga memberikan pengalaman yang bermakna dan positif.

Kebutuhan pendampingan pada anak dan remaja oleh orang tua atau dewasa lain di sekitarnya bukan hal yang mudah, karena dalam prosesnya akan membutuhkan banyak pengetahuan dan keterampilan yang perlu dipelajari dan dilatih.

Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak melalui pengasuhan anak usia dini, merupakan tahapan pembinaan dan penguatan keluarga yang dapat dilakukan pada persiapan calon pengantin dan pasangan muda. Isu kekerasan pada anak yang cukup tinggi, penelantaran anak, serta ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan anak yang wajar dapat menjadi bagian dalam intervensi pembinaan pasangan muda untuk perencanaan keluarga dan kesiapan orang tua.

Pemerintah akan membuat peraturan perundangan dan kebijakan pembangunan kualitas keluarga yang komprehensif dan terintegrasi di tiap tingkatan wilayah, yang mengikuti siklus tahapan hidup berkeluarga. Secara lebih komprehensif perkembangan keluarga dan kebutuhannya dapat digambarkan pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Tahapan Keluarga dan Kebutuhannya

No.	Tahapan	Kebutuhan
1	Pasangan suami istri tanpa anak.	<ul style="list-style-type: none">a. Menavigasi cara hidup bersama.b. Menyesuaikan hubungan dengan keluarga asal dan jejaring sosial untuk menyertakan pasangan.
2	Keluarga mempunyai anak dengan usia anak tertua antara kelahiran dan 30 bulan.	<ul style="list-style-type: none">a. Mempersiapkan dan menyesuaikan sistem keluarga untuk mengakomodasi anak-anak.b. Mengembangkan peran sebagai orang tua.

No.	Tahapan	Kebutuhan
		c. Mendefinisikan ulang peran dengan keluarga besar.
3.	Keluarga dengan anak usia pra sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mensosialisasikan, mendidik, dan membimbing anak. b. Menilai dan menyesuaikan peran pengasuhan sesuai usia dan tugas perkembangan anak-anak dan c. Mendorong anak untuk lebih banyak bersama keluarga.
4.	Keluarga dengan anak usia sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan bimbingan kepada anak-anak pada saat berkolaborasi dengan sumber daya luar (misalnya, sekolah, kegiatan ekstrakurikuler).
5.	Keluarga dengan anak usia remaja	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyesuaikan hubungan orang tua-anak dengan remaja untuk memberikan lebih banyak kemandirian dengan batas aman. Merawat hubungan paruh baya dan masalah karir orang tua.
6.	Keluarga yang anak-anaknya mulai berpisah (anak pertama hingga terakhir meninggalkan rumah).	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun hubungan orang dewasa-ke-orang dewasa dengan anak-anak. b. Menyelesaikan masalah paruh baya. c. Merawat anggota keluarga yang menua.
7.	Keluarga paruh baya hingga pensiun.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyesuaikan diri menjadi pasangan tanpa anak yang tinggal di rumah. b. Merawat anggota keluarga yang menua.
8.	Keluarga yang menua (pensiun sampai kedua pasangan meninggal dunia)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari peran baru yang berkaitan dengan pensiun, menjadi kakek-nenek, kehilangan pasangan, dan perubahan terkait kesehatan.

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber

7. Kuantitas dan Distribusi Penyuluhan KB dan PLKB.

Salah satu isu krusial dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga adalah terkait dengan jumlah/kuantitas tenaga Penyuluhan KB dan PLKB yang minim dan distribusi/persebarannya yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Penyuluhan KB dan PLKB merupakan ujung tombak pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat lapangan, khususnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, mendampingi keluarga, serta mengawal/memastikan berbagai kegiatan dan intervensi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana terlaksana dengan baik di seluruh tingkatan wilayah.

Ketersediaan tenaga Penyuluhan KB dan PLKB dan ketidakmerataan persebarannya ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Disparitas jumlah tenaga Penyuluhan KB dan PLKB antar wilayah. Dalam hal ini terdapat daerah yang memiliki rasio Penyuluhan KB dan PLKB lebih tinggi/lebih banyak dibandingkan daerah lain, terutama daerah-daerah perkotaan/kabupaten besar. Sementara di wilayah tertentu, terutama daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan, justru mengalami kekurangan tenaga Penyuluhan KB dan PLKB. Perlu adanya strategi khususnya terkait persebaran/redistribusi tenaga lapangan dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya kondisi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta daerah dengan pertimbangan capaian program yang belum maksimal.
- b. Disparitas jumlah sebagaimana pada poin 1 (satu) di atas, juga secara langsung berpengaruh pada skema mobilitas dan beban kerja Penyuluhan KB dan PLKB – di sejumlah daerah, satu orang Penyuluhan KB dan PLKB harus membina beberapa desa sekaligus, hal ini menyebabkan tingkat efektivitas pendampingan kepada keluarga/masyarakat di lapangan menjadi tidak optimal.
- c. Keterbatasan rekrutmen dan regenerasi – sebagian besar Penyuluhan KB dan PLKB saat ini telah memasuki usia mendekati pensiun, sementara proses pengadaan tenaga baru tidak mampu mengimbangi kebutuhan riil di lapangan. Hal ini telah dicoba diatasi dengan adanya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun masih terdapat kekurangan diantaranya kapasitas dan kapabilitas yang dituntut harus secara cepat memahami langkah-langkah kerja Program Bangga Kencana di lini lapangan.
- d. Keterbatasan kapasitas kelembagaan di daerah (Kabupaten dan Kota)-tidak seluruh pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai dan komitmen yang sama dalam mendukung penganggaran dalam hal rekrutmen tenaga lini lapangan KB (termasuk dalam hal ini penggajian) serta dukungan pembiayaan penggerakan Penyuluhan KB dan PLKB, maupun pembiayaan dalam upaya peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan KB.

Beberapa hal sebagaimana dijelaskan di atas, terutama yang terkait dengan disparitas dan kesenjangan kapasitas tenaga Penyuluhan KB dan PLKB ini dapat berdampak langsung terhadap efektivitas, baik terhadap upaya pencapaian sasaran strategis, indikator-indikator Program Bangga Kencana, maupun kinerja program lini lapangan. Upaya teknis terkait pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pembangunan keluarga, peningkatan kesertaan ber-KB, penurunan angka *stunting*, maupun program/kegiatan prioritas lainnya di lini lapangan tidak dapat berjalan secara maksimal. Pelayanan Program Bangga Kencana secara langsung terhadap masyarakat (terutama KIE Program dan pendampingan masyarakat secara langsung) tidak dapat terlaksana dengan

baik dan menyeluruh. Apabila isu ini tidak segera diatasi, terdapat risiko ketimpangan capaian program antar-wilayah, menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan penerimaan masyarakat atas Program Bangga Kencana tidak dapat terlaksana secara maksimal.

8. Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Program.

Peningkatan status kelembagaan dari Badan menjadi Kementerian membawa konsekuensi pada transformasi dalam mengelola program yang ada. Kemendukbangga/BKKBN dalam 5 tahun mendatang akan lebih fokus pada perencanaan kependudukan dan komunitas serta pembangunan keluarga dibandingkan dengan perencanaan keluarga. Ada 4 pilar manajemen dalam mengelola program 5 tahun mendatang yaitu, (1) Kebijakan dan program berbasis data dan bukti, (2) Orkestrasi kebijakan lintas kementerian dan daerah, (3) Promosi inovasi sosial dan layanan digital, (4) Mendorong kemitraan transformasional (pentahelix). Melalui transformasi manajemen tersebut, maka Kemendukbangga/BKKBN akan melakukan upaya penguatan yang berkaitan pada hal -hal berikut:

a. Kebijakan, Strategi, dan Pelaksanaan Program Akan Makin Dipertajam dengan Menyasar Segmen Sesuai dengan Kondisi yang Ada

Dalam 5 tahun kedepan penajaman kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program akan terus diperkuat dengan melihat potensi dan masalah yang dimiliki masing-masing daerah dan komunitas. Kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana serta Kependudukan akan mengintegrasikan perspektif gender dan inklusi sosial untuk memastikan seluruh penduduk mendapatkan manfaat pembangunan. Kajian dan analisis kebijakan termasuk juga ketersediaan data mikro keluarga mutlak diperlukan. Analisis atas ketimpangan yang ada antara potensi dan permasalahan harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat (tepat sasaran) sekaligus mampu menjawab tantangan atas isu strategis yang berkembang di masing-masing wilayah, sehingga dalam penentuan program/kegiatan lebih spesifik dengan memperhatikan karakteristik segmentasi sasaran dan kewilayahan yang akan diintervensi.

b. Sinkronisasi Pendanaan Program Bangga Kencana antara Dana Pusat (APBN), Dana Pusat yang Disalurkan Ke Daerah (DAK), serta Dana Daerah (APBD).

Untuk memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program Pembangunan Bangga Kencana sampai daerah (lapangan), maka perlu diperkuat sinkronisasi pendanaan dari pusat dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Jenis Keluarga Berencana (KB) dan Bantuan

Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Kemendukbangga/BKKBN pusat ke kabupaten/kota.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Jenis Keluarga Berencana (KB) memiliki tren yang cenderung menurun sedangkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) cukup signifikan, namun belum diimbangi dengan serapan yang baik. Optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) akan menjadi perhatian, antara lain melalui sinergi antara anggaran Belanja K/L dan dana transfer khusus, dengan menjamin ketersediaan alokan di fasyankes dan TPMB setara fasyankes dan pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) paska salin (pengadaan alokan, distribusi dan pelayanan KB).

Selain itu terus disempurnakan mekanisme pendanaan untuk mendukung pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Rumah Sakit (RS) (saat ini Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanya mendukung pelayanan rujukan atas indikasi medis), ke depan perlu direncanakan agar Kemendukbangga/BKKBN bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mengelola dana program untuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) – untuk mendukung pelayanan Keluarga Berencana (KB) sehingga membuka peluang bagi rumah sakit untuk melayani semua sasaran, terutama yang tidak mampu (Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP)). Saat ini cakupan pelayanan Keluarga Berencana (KB) Kesehatan Reproduksi (KR) di rumah sakit masih sangat rendah, diperlukan rancangan sistem untuk mengoptimalkan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di rumah sakit oleh seluruh K/L yang terkait.

Sinergitas sumber pendanaan telah diatur oleh Kementerian Keuangan RI dalam mekanisme yang dapat mewujudkan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan di seluruh tingkatan wilayah perlu terus diperkuat. Sumber pendanaan menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pusat dan Kemendukbangga/BKKBN perwakilan provinsi. Perangkat Daerah Keluarga Berencana (PD KB) provinsi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah masing-masing. Perangkat Daerah Keluarga Berencana (PD KB) kabupaten/kota mendapatkan dana alokasi khusus fisik dan non-fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)). Saat ini yang masih menjadi kendala dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh kabupaten/kota meliputi:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pencapaian kinerja program

- Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni semakin berkurang seiring bertambahnya alokasi anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - 3) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh kabupaten/kota.
- c. Makin Tingginya Tuntutan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Program.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program sudah menjadi keharusan baik dalam pelaksanaan program teknis maupun dukungan Manajemen. Tuntutan datang dari internal birokrasi pemerintahan, legislatif, masyarakat sipil maupun masyarakat internasional dimana pemerintah Indonesia telah menandatangani berbagai deklarasi dan kesepakatan seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan *Family Planning 2030* (FP2030).

Terkait dengan transparansi kinerja dukungan manajemen, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahun mempublikasikan analisis pencapaian perbandingan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) antar Kementerian Lembaga yang sebanding. Kebijakan ini merupakan kebijakan nasional untuk lebih mendorong adanya *Benchmark* Kinerja. Pada tahun 2023 Kemendukbangga/BKKBN berada di urutan ke 5 (lima) dari 7 (tujuh) K/L sebanding untuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023 halaman 233) dan urutan ke 4 dari 7 K/L sebanding untuk Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023).

Untuk itu Kemendukbangga/BKKBN antara lain:

- 1) Melakukan penyempurnaan aplikasi digital berkaitan dengan program dan dukungan manajemen yang ada sehingga mengikuti standar pelayanan pemerintah berbasis elektronik;
- 2) Melakukan penyempurnaan sistem pelatihan berbasis digital dan terakreditasi;
- 3) Penyelarasan arah dan strategi kebijakan agar berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) dan perlindungan terhadap hak klien serta menghindari terjadinya pemaksaan;
- 4) Terus menyempurnakan sistem perencanaan dan monitoring logistik Alkon secara digital; dan
- 5) Terus memperbaiki sistem pembinaan internal dan juga infrastruktur yang dibutuhkan sehingga peringkat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terus membaik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN

2.1 Visi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

Sesuai dengan arahan Presiden kepada seluruh Kementerian dan Lembaga, Kemendukbangga/BKKBN tidak membuat visi dan misi tersendiri namun mendukung visi dan misi Presiden.

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Dalam mendukung Visi Presiden RI 2025 – 2029 sebagaimana tertera di atas maka formulasi dukungan Kemendukbangga/BKKBN terhadap Visi Presiden adalah “Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Berkualitas untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

2.2 Misi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

Untuk mewujudkan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan, diperlukan panduan yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, Presiden menetapkan visi yang menjadi pijakan utama seluruh program kerja pemerintahan. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi, politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mendukung Misi Presiden di atas maka formulasi Misi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN adalah “Mendukung Misi Presiden melalui Penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga”, melalui:

1. Memperkuat sinergitas kebijakan pengendalian kependudukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, serta pembangunan yang berwawasan kependudukan;
2. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup dalam meningkatkan kualitas keluarga;
3. Menyelenggarakan dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB dan KR) secara komprehensif;
4. Memperkuat analisis kebijakan, sistem informasi dan data keluarga yang berkualitas dan terintegrasi, serta meningkatkan inovasi teknologi informasi, komunikasi, dan edukasi program Bangga Kencana;
5. Meningkatkan jejaring kemitraan, peran serta masyarakat, tenaga lini lapangan, dan kerja sama global; dan
6. Meningkatkan kualitas kelembagaan, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan SDM aparatur, serta pengawasan dan pembinaan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.

2.3 Tujuan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Kemendukbangga/BKKBN memiliki tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas.

2.4 Sasaran Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

Untuk menjamin dukungan Kemendukbangga/BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2025-2029 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2025-2029, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan Kemendukbangga/BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga;
2. Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan kependudukan dan pengendalian penduduk;
4. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang merata dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana; dan
6. Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Selain itu, tahun 2024 dalam memperkuat proses manajemen risiko telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), bahwa penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Entitas MRPN pengelola keuangan negara.

Kemendukbangga/BKKBN telah menerapkan manajemen risiko melalui regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2. Peraturan Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Reviu Proses Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
3. Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 39/KEP.SES/B1/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN selaku pemilik risiko untuk level entitas Kemendukbangga/BKKBN bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun secara berjenjang.

Kemendukbangga/BKKBN telah mengidentifikasi/mitigasi indikasi risiko yang akan muncul dalam pencapaian sasaran strategis yang disusun sesuai Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikasi Risiko terhadap Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
1.	Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga	<ol style="list-style-type: none">a. Rendahnya partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluargab. Tidak terselenggaranya pendamping keluarga secara optimalc. Kurangnya sinergi dengan kementerian/lembaga lain terkait pembangunan keluarga
2.	Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun	<ol style="list-style-type: none">a. Kurangnya edukasi dan akses informasi kesehatan reproduksi remajab. Norma budaya dan sosial yang tidak mendukung keterbukaan pembahasan kesproc. Meningkatnya penggunaan media sosial tanpa kontrol yang dapat mendorong perilaku berisiko

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemutakhiran data kependudukan tidak dilakukan secara tertib dan kualitas pemutakhiran rendah b. Resistensi dari pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru
4.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang tidak merata b. Penolakan masyarakat terhadap KB c. Keterbatasan tenaga medis, penyuluhan KB di wilayah terpencil
5.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang merata dalam pelaksanaan program Bangga Kencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Program Bangga Kencana tidak tersampaikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat b. Ketimpangan akses antarwilayah (perkotaan vs perdesaan) c. Keterbatasan jumlah SDM tenaga lini lapangan (penyuluhan KB, PLKB dan kader) untuk menjangkau seluruh wilayah d. Mitra kerja belum seluruhnya memahami mekanisme kolaborasi dalam program Bangga Kencana e. Belum terbentuknya kelompok kerja/unit khusus dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat kelurahan/desa
6.	Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang Kolaboratif, Kapabel dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Munculnya praktik gratifikasi, <i>fraud</i>, dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program b. Keterbatasan kompetensi ASN dalam manajemen modern dan digitalisasi layanan c. Kurangnya budaya kerja kolaboratif lintas unit dan mitra kerja

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam kerangka kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 terdapat 4 Prioritas Nasional yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Kementerian Kemendukbangga/BKKBN, yaitu: Prioritas Nasional 2 (dua), 4 (empat), dan 6 (enam).

Kemendukbangga/BKKBN mendukung Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru” khususnya pada Program Prioritas Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi pada Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional.

Pada Prioritas Nasional (PN) 4: “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, Kemendukbangga/BKKBN secara langsung berkontribusi terhadap 4 (empat) program prioritas sebagai berikut:

1. Program Prioritas Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, pada kegiatan prioritas:
 - a. Penurunan Kematian Ibu dan Anak;
 - b. Pencegahan dan Penurunan Stunting; dan
 - c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro.
2. Program Prioritas Peningkatan Ketangguhan Keluarga, pada kegiatan prioritas:
 - a. Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak;
 - b. Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga; dan
 - c. Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi bagi Keluarga Rentan.
3. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Pemuda, pada Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko.
4. Program Prioritas Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, pada Kegiatan Prioritas Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Pada Prioritas Nasional (PN) 6 dalam “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”, Kemendukbangga/BKKBN berkontribusi pada 2 (dua) program prioritas yaitu:

1. Pada Program Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif pada Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi Perawatan (*Care Economy*); dan
2. Program Prioritas Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan pada Kegiatan Prioritas Tata Kelola Pendampingan/Penyuluhan.

Kemendukbangga/BKKBN juga memperhatikan lingkup/area penyelenggaraan Program Bangga Kencana mulai dari kelompok masyarakat paling kecil yaitu keluarga sampai pada seluruh tingkatan wilayah baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

Program Bangga Kencana berkontribusi pada terwujudnya keamanan dan kemandirian bangsa melalui penguatan pembangunan keluarga untuk memunculkan keluarga yang berketahtanan. Dengan memastikan keluarga yang kuat dan berketahtanan, maka SDM yang dihasilkan dapat berkualitas dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor.

Arah kebijakan dan strategi RPJMN 2025-2029 menjadi panduan untuk dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi program di Kemendukbangga/BKKBN.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendukbangga/BKKBN

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di atas, maka Kemendukbangga/BKKBN mengembangkan kerangka arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas”. Dalam pengembangan dan rencana pelaksanaan arah kebijakan dan strategi dimaksud, Kemendukbangga/BKKBN akan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, bermitra dengan seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dengan pola kemitraan pentahelix, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Kerangka arah kebijakan dan strategi dalam bidang pembangunan keluarga diarahkan melalui penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga melalui pendekatan siklus hidup mulai dari ibu hamil, balita, remaja, dewasa/produktif dan lanjut usia dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial. Dalam mendukung upaya terwujudnya pengasuhan yang berkualitas, integrasi perspektif gender dilakukan untuk memastikan peran yang setara antar orang tua dalam melakukan pengasuhan dan tidak terjadinya diskriminasi antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Pada kerangka kebijakan dan strategi di bidang kependudukan, Kemendukbangga/BKKBN akan berfokus pada koordinasi dan sinkronisasi lintas Kementerian/Lembaga dan pembinaan (bimbingan teknis) kepada pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan berwawasan kependudukan.

Kerangka kebijakan dan strategi dalam lingkup bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi akan fokus pada upaya

peningkatan akses dan kualitas layanan KB dan Kespro, dengan upaya menurunkan disparitas pelayanan yang masih terjadi, memberikan perhatian pada daerah tertinggal, kepulauan dan perbatasan, kelompok marginal, serta pelibatan laki-laki dalam program KB, sehingga layanan KB dapat dilakukan secara universal dan inklusif.

Untuk menjamin pengembangan dan pelaksanaan arah kebijakan dan strategi di atas dibutuhkan penguatan manajerial. Dengan mempertimbangkan kondisi umum, potensi dan peluang, serta permasalahan dan tantangan pada bab I, Kemendukbangga/BKKBN akan melakukan transformasi manajemen pengelolaan program, meliputi: (1) Pengembangan kebijakan berbasis data dan bukti, dalam hal ini penyusunan kebijakan dapat ditingkatkan kualitasnya dengan basis data sektoral yang berkualitas (sebagai contoh; data Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program/SKAP dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI); (2) Orkestrasi kebijakan lintas Kementerian/Lembaga dan daerah, sebagai contoh melalui penerapan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK); (3) Promosi inovasi sosial dan layanan digital, sebagai contoh melalui pengembangan pelayanan masyarakat dengan *Super Apps* berbasis AI; serta (4) Kemitraan transformational (pentahelix). Transformasi manajemen tersebut tetap dalam kerangka mandat yang diberikan oleh pemerintah dan peraturan perundungan yang berlaku.

Transformasi manajemen pengelolaan program menjadi kunci untuk memastikan arah kebijakan dan strategi benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik. Melalui penguatan kebijakan berbasis data dan bukti, kebijakan yang dirumuskan lebih tajam, terukur, dan dapat mendarat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Integrasi lintas K/L dan pemerintah daerah dapat mendorong terwujudnya sinergi implementasi strategi di seluruh tingkatan wilayah. Inovasi sosial dan pemanfaatan layanan digital hadir sebagai penggerak agar pelayanan lebih cepat, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dukungan kemitraan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, diharapkan dapat mendorong legitimasi implementasi strategi, tidak hanya datang dari atas ke bawah, tetapi juga berakar dari kebutuhan nyata masyarakat. Dengan cara ini, transformasi manajemen pengelolaan program menjadi penghubung yang memastikan arah kebijakan dan strategi dapat diterjemahkan ke dalam langkah nyata yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

Secara detail, arah kebijakan dan strategi meliputi:

1. Bidang Pengendalian Penduduk

Meningkatkan sinergi kebijakan pengendalian penduduk secara holistik dan komprehensif dalam kerangka demografi (fertilitas, mortalitas, mobilitas, struktur penduduk, distribusi, dan kepadatan penduduk) dalam rangka mendukung upaya kapitalisasi bonus Demografi, melalui strategi:

- a. Penguatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di seluruh tingkatan wilayah;
- b. Penguatan sinergitas perencanaan dan konvergensi pelaksanaan pengendalian penduduk di pemerintah pusat dan daerah;
- c. Penyediaan dan pemanfaatan parameter pengendalian kependudukan;

- d. Peningkatan kerja sama pendidikan kependudukan dengan instansi/lembaga pendidikan; dan
 - e. Penguatan implementasi penanganan terpadu dampak kependudukan.
2. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
- Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan siklus hidup dalam mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, melalui strategi:
- a. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak usia dini (0-6 tahun), terutama fase 1000 HPK;
 - b. Pendampingan pengasuhan di tempat penitipan anak melalui standarisasi kompetensi fasilitator pengasuhan anak usia dini, pemantauan tumbuh kembang anak usia dini secara berkala, pelibatan orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan memperkuat layanan rujukan;
 - c. Peningkatan kualitas remaja termasuk pra-remaja dalam pengetahuan kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - d. Peningkatan pengetahuan remaja dan calon pengantin dalam pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - e. Peningkatan kualitas ayah dalam pengetahuan pengasuhan anak dan pendampingan remaja;
 - f. Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga dan keterlibatan lansia dalam perawatan kesehatan, aktivitas sosial, kesempatan berwirausaha serta pemberian fasilitas kemudahan bagi lansia dengan keterlibatan multisektor;
 - g. Pendampingan dan pembinaan sasaran keluarga rentan melalui pelayanan konsultasi dan konseling keluarga pada Satyagatra;
 - h. Pendampingan dan pembinaan kemandirian ekonomi keluarga; dan
 - i. Penguatan program pembangunan keluarga berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan inklusif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran sesuai dengan siklus hidup melalui strategi:

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR);
- c. Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) berdasarkan siklus hidup;
- d. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah dan sasaran khusus;

- e. Penguatan komunikasi, informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sesuai segmentasi sasaran;
 - f. Mendorong pengembangan inovasi pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR); dan
 - g. Peningkatan jejaring kemitraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).
4. Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat
- Meningkatkan kualitas penggerakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), peran serta masyarakat dan dukungan mitra kerja (pentahelix) dalam penyelenggaraan program di seluruh tingkatan wilayah, melalui strategi:
- a. Peningkatan kualitas penggerakan program oleh tenaga lini lapangan Penyuluh KB dan PLKB;
 - b. Peningkatan kualitas peran serta Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)/Sub IMP Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana));
 - c. Pendampingan, pembinaan, komunikasi, informasi dan edukasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
 - d. Pendampingan dan pembinaan keluarga dalam pencegahan dan penurunan *stunting* terutama terkait dengan penyiapan 1000 hari pertama kehidupan; dan
 - e. Peningkatan kualitas dan peran serta aktif mitra kerja (pentahelix) dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
5. Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)

Mewujudkan tata kelola kebijakan publik bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berkualitas dalam memanfaatkan jendela peluang bonus demografi, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas ekosistem perumusan kebijakan dan strategi makro pengendalian kuantitas penduduk;
- b. Peningkatan kualitas ekosistem perumusan kebijakan dan strategi makro kerangka pembangunan keluarga dan keluarga berencana;
- c. Peningkatan kualitas ekosistem perumusan kebijakan dan strategi makro akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga; dan
- d. Peningkatan kualitas ekosistem perumusan kebijakan dan strategi makro sumber daya dan kemandirian keluarga berencana.

6. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama

Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam implementasi Bangga Kencana; dan
- b. Peningkatan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan Bangga Kencana (dirumuskan mengacu Permenpan 3 Tahun 2023).

7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan kualitas SDM Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana melalui strategi:

- a. Peningkatan kompetensi SDM Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana baik internal maupun eksternal termasuk Penyuluhan KB dan PLKB; dan
- b. Penilaian Potensi dan Kompetensi melalui Sertifikasi/Uji Kompetensi.

8. Pusat Data dan Teknologi Informasi

Meningkatkan kualitas Data dan Teknologi Informasi, serta inovasi dan kualitas dukungan TIK dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana, melalui strategi:

- a. Penyediaan Data Mikro Keluarga;
- b. Peningkatan akses pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis TI (*smart technology/smarter program*); dan
- c. Peningkatan inovasi dan kualitas dukungan TIK dalam penyelenggaraan Bangga Kencana.

A. Perencanaan Program dan Kegiatan Prioritas Berbasis Kewilayahan

Arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan pada bagian 2.2 memprioritaskan indikator sasaran strategis yang harus dicapai secara nasional. Namun capaian tingkat nasional juga tidak terlepas dari pencapaian target/sasaran di seluruh tingkatan wilayah.

Untuk menjamin penggarapan program dan kegiatan prioritas yang disusun secara nasional dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan wilayah diperlukan pemetaan target sasaran strategis setiap provinsi serta pemetaan potensi yang dapat menjadi fokus penggarapan di setiap wilayah (provinsi).

Pemetaan target sasaran setiap provinsi dan potensi yang menjadi fokus penggarapan di setiap provinsi dilakukan secara bersama oleh pengelola program di tingkat pusat dan perwakilan BKKBN provinsi. Target sasaran dan prioritas penggarapan program tersebut dituangkan di dalam matriks renstra provinsi. Dalam konteks isu pemerataan hasil pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di seluruh wilayah

Indonesia, Kemendukbangga/BKKBN akan juga memberi perhatian lebih pada provinsi yang capaiannya di bawah angka rata-rata nasional. Hal ini dilakukan agar disparitas pencapaian program dapat lebih diperkecil.

Untuk program KBKR, fokus garapan kewilayahan juga diperkuat dengan analisis kuadran yaitu menganalisis keterkaitan indikator determinan tingkat kelahiran yang telah diakui secara internasional yaitu pemakaian kontrasepsi, kebutuhan KB yang terpenuhi (*demand satisfied*), dan *unmet need*. Analisis kuadran dilakukan agar pengembangan kegiatan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna.

1. Keterkaitan antara *Total Fertility Rate (TFR)* dan *modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)*

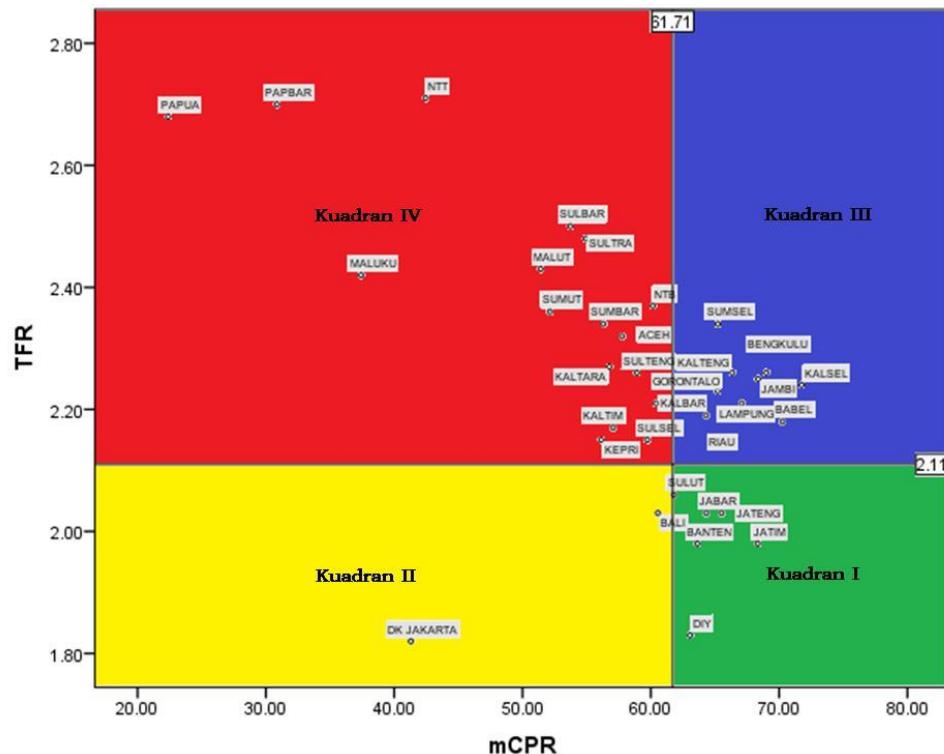
Gambar 3.1 memperlihatkan pola hubungan TFR dengan mCPR di setiap provinsi. Kuadran I adalah provinsi dengan TFR di bawah rata-rata nasional dan mCPR di atas rata-rata nasional. Kuadran II adalah provinsi dengan TFR di bawah rata-rata nasional dan mCPR di bawah rata-rata nasional. Kuadran III adalah provinsi dengan TFR di atas rata-rata nasional dan mCPR juga di atas rata-rata nasional. Kuadran IV adalah provinsi dengan TFR di atas rata-rata nasional dan mCPR di bawah rata-rata nasional.

Analisis kuadran TFR dan mCPR sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa:

- a. Kelompok kuadran I adalah kelompok yang pencapaian program KBKR-nya ideal. Dimana TFR telah berada di bawah rata-rata nasional dan mCPR-nya telah di atas rata-rata nasional. Provinsi yang masuk pada kuadran ini dapat didorong untuk masuk ke kuadran II.
- b. Kelompok kuadran II adalah kelompok yang pencapaian program KBKR-nya sangat ideal. Dimana TFR telah berada di bawah rata-rata nasional dan mCPR-nya di bawah rata-rata nasional. TFR pada kuadran II bisa di bawah rata-rata nasional walaupun mCPR-nya juga di bawah rata-rata nasional disebabkan tingginya pemakaian metode jangka panjang dan juga tingginya usia kawin pertama perempuan. Dengan pemakaian MKJP yang tinggi dan usia median kawin pertama perempuan yang tinggi menjadikan program KBKR lebih efisien secara ekonomi.
- c. Kelompok kuadran III adalah kelompok yang pencapaian program KBKR sangat tidak efisien. Pada kelompok ini walaupun mCPR sudah di atas rata-rata nasional namun TFR juga masih di atas rata-rata nasional. Kondisi ini dapat terjadi karena tingkat putus pakai yang sangat tinggi di kelompok ini. Tingginya mCPR tidak berdampak banyak pada penurunan TFR karena faktor putus pakai tersebut. Investasi dalam penyediaan kontrasepsi menjadi kurang bermakna. Fokus penggarapan program pada kuadran ini adalah menurunkan tingkat putus pakai.
- d. Kelompok kuadran IV adalah kelompok yang pencapaian program KBKR nya masih sangat rendah. Pada kelompok ini mCPR masih rendah dan TFR di atas rata-rata nasional.

Kondisi ini dapat terjadi karena pemahaman masyarakat tentang KB masih rendah, maupun tingginya *unmet need*. Fokus penggarapan program pada kelompok ini adalah *demand creation* dan perluasan jangkauan pelayanan.

Gambar 3.1 *Total Fertility Rate VS Tingkat Penggunaan Kontrasepsi Modern*



2. Keterkaitan antara *Total Fertility Rate (TFR)* dan Kebutuhan Ber-KB yang Terpenuhi

Kebutuhan ber-KB yang terpenuhi (*demand satisfied*) adalah salah satu indikator keberhasilan program KB yang dipakai secara global saat ini. *demand satisfied* merupakan hasil perhitungan dari mCPR dan *unmet need*. Karena itu penting juga melakukan analisis kuadran antara kebutuhan ber-KB yang terpenuhi dengan tingkat TFR untuk melihat pola hubungan keduanya dan menetapkan fokus kegiatan yang diperlukan.

Gambar 3.2 memperlihatkan analisis kuadran antara kebutuhan ber-KB yang terpenuhi dengan tingkat kelahiran.

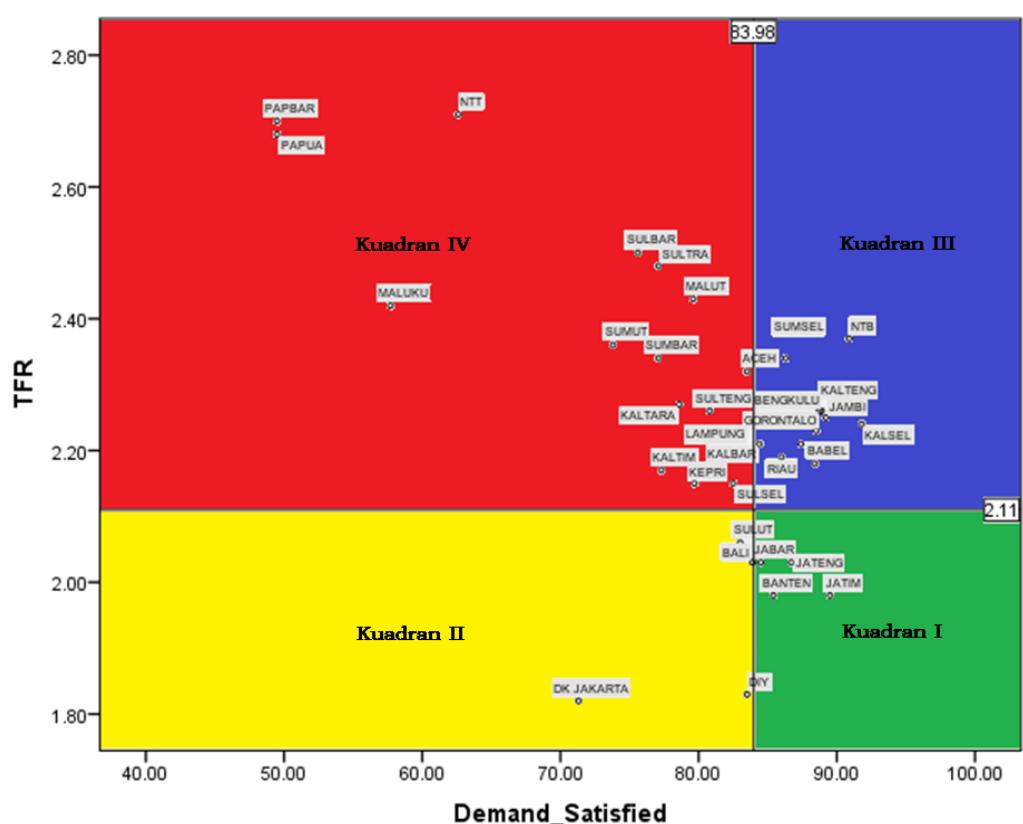
1. Kelompok kuadran I adalah kelompok dimana kebutuhan ber-KB terpenuhinya di atas rata-rata nasional (mCPR di atas rata-rata nasional dan *unmet need* di bawah rata-rata nasional) dan TFR-nya di bawah rata-rata nasional. Provinsi pada kelompok ini adalah ideal jika dilihat dari analisis kuadran *demand satisfied* dan TFR.
2. Kelompok kuadran II adalah kelompok dimana kebutuhan ber-KB terpenuhinya di bawah rata-rata nasional (mCPR di bawah rata-rata nasional dan *unmet need* di atas rata-rata nasional) dan TFR di bawah rata-rata nasional.
Jika fokus program hanya terkait TFR dan mCPR tanpa memperhatikan *unmet need* maka provinsi yang masuk

dalam kelompok ini sudah berhasil bahkan dikatakan sebagai sangat ideal dengan tingkat efisiensi program yang tinggi. Dalam gambar adalah provinsi DKI Jakarta. Namun jika dikaitkan dengan hak reproduksi yang ditunjukkan dengan *unmet need* maka kondisi tersebut tentulah belum ideal.

Karena itu jika menggunakan analisis kuadran kebutuhan ber-KB yang terpenuhi dengan TFR maka kondisi ideal adalah pada kuadran I. Sedangkan jika menggunakan analisis kuadran mCPR dengan TFR maka kondisi sangat ideal adalah pada kelompok kuadran II.

3. Kelompok kuadran III adalah kelompok dimana kebutuhan ber-KB terpenuhinya di atas rata-rata nasional (mCPR di atas rata-rata nasional dan *unmet need* di bawah rata-rata nasional) tapi TFR masih di atas rata-rata nasional. Isu utama pada kelompok ini adalah tingginya *drop out* atau putus pakai.
4. Kelompok kuadran IV adalah kelompok dimana kebutuhan ber-KB terpenuhinya di bawah rata-rata nasional (mCPR di bawah rata-rata nasional dan *unmet need* di atas rata-rata nasional) tetapi TFR di atas rata-rata nasional. Isu utama pada kelompok ini adalah perluasan jangkauan program dalam rangka menurunkan *unmet need* dan meningkatkan mCPR, serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program KBKR.

Gambar 3.2 Total Fertility Rate (TFR) vs Demand Satisfied



3.3 Kerangka Regulasi

Penguatan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) perlu didukung oleh kerangka regulasi yang kuat baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri. Kerangka regulasi yang direncanakan untuk dibuat dalam periode 5 tahun mendatang.

Untuk pembangunan keluarga dan kependudukan maka kerangka regulasi difokuskan agar seluruh pemangku kepentingan pembangunan utamanya pemerintah di setiap tingkatan wilayah mengimplementasikan pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga. Selain itu kerangka kebijakan juga diarahkan pada penguatan manajemen pelaksanaan program di tingkat kabupaten kota sampai ke lini lapangan.

Kerangka regulasi untuk pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) difokuskan pada upaya meningkatkan akses dan memperkuat kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) sehingga tercapai *universal access* dan pelayanan dapat memenuhi hak reproduksi setiap orang dan bersifat inklusif. Detail kerangka regulasi dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Transformasi kelembagaan dari BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjawab perubahan dinamika demografi nasional dan keluarga. Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam hal pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang cepat, meningkatnya proporsi lansia, migrasi serta ketimpangan wilayah yang semakin kompleks yang semuanya berdampak pada perubahan kehidupan dalam keluarga. Kondisi ini memerlukan penguatan kelembagaan dan penyusunan kebijakan yang tidak parsial, melainkan menyeluruh dan saling terhubung antar sektor.

Pembentukan Kemendukbangga melalui Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 membawa mandat baru dalam urusan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kementerian ini tidak hanya menjadi lembaga teknis pelaksana program keluarga berencana, tetapi juga pemegang kebijakan strategis yang bertugas merancang, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh proses pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk di Indonesia. Sementara itu, pelaksanaan fungsi operasional tetap diamanahkan kepada BKKBN berdasarkan Perpres Nomor 181 Tahun 2024.

Struktur kelembagaan Kemendukbangga dibangun dengan prinsip adaptif, responsif, dan efisien. Ditingkat pusat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dibantu oleh Wakil Menteri/Wakil Kepala yang mempunyai tugas membantu Menteri/Kepala dalam pelaksanaan tugas. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional didukung oleh 7 (tujuh) Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga,

- Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
3. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
 4. Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 5. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 6. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat; dan
 7. Inspektorat Utama.

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pimpinan yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN. Sementara para Deputi merupakan unsur pelaksana memiliki tugas dan fungsi spesifik secara operasional dalam implementasi kebijakan sesuai bidangnya.

Inspektorat Utama menjadi unsur pengawas yang menyelenggarakan pengawasan intern. Pada lingkungan Kemendukbangga/BKKBN juga terdapat Staf Ahli yang memiliki tugas untuk pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri. Staf Ahli terdiri atas:

1. Staf Ahli Bidang Hukum, Kelembagaan, dan Reformasi Birokrasi;
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kependudukan Berkelanjutan; dan
3. Staf Ahli Bidang Rekayasa Sosial Keluarga;

Di tingkat daerah, terdapat 32 (tiga puluh dua) Perwakilan BKKBN Provinsi yang menjembatani kebijakan nasional dan pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, tenaga lini lapangan seperti penyuluhan KB di kecamatan dan desa tetap menjadi ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kemendukbangga/BKKBN memiliki unit kerja setingkat Eselon II yaitu Pusat Data dan Teknologi Informasi serta Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana dibantu oleh 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan (UPT Balai Diklat) Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tersebar di 3 (tiga) Provinsi yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Saat ini Kemendukbangga/BKKBN sedang memasuki tahap transformasi kelembagaan. Empat pilar utama dari transformasi adalah (1) pengembangan kebijakan dan program berbasis data dan bukti, (2) orkestrasi kebijakan lintas Kementerian dan daerah, (3) promosi inovasi sosial dan layanan digital, (4) mendorong kemitraan transformasional (pentahelix). Peta proses bisnis kelembagaan Kemendukbangga terdiri dari proses utama (kebijakan, program, pemberdayaan, penggerakan masyarakat, dan pendataan), proses pendukung (administrasi dan pengawasan), serta proses lainnya seperti pengelolaan TIK, kerja sama, dan sumber daya manusia. Seluruh elemen ini bergerak dalam satu kesatuan sistem yang mendukung prinsip pemerintahan yang lincah, dinamis, dan berorientasi hasil.

Untuk memperkuat peran daerah, kementerian mendorong peningkatan kapasitas SDM di daerah melalui sertifikasi kompetensi, penetapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), serta penguatan hubungan kerja fungsional antara perwakilan BKKBN provinsi dan perangkat daerah dalam pengelolaan urusan pengendalian penduduk, pembangunan keluarga dan keluarga berencana.

Peran Pemerintah Daerah menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang diemban oleh Kemendukbangga/BKKBN. Untuk memastikan keselarasan antara pusat dan daerah, telah dilakukan penyelarasan indikator kinerja melalui forum perencanaan seperti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui forum tersebut, indikator prioritas program Bangga Kencana diusulkan agar dapat masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah sehingga menjaga keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di samping itu memastikan daerah juga turut berkontribusi terhadap target nasional.

Dalam rangka mendukung implementasi di lapangan, pemerintah pusat juga menyediakan dukungan pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Fisik maupun Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana/BOKB). DAK Jenis KB digunakan untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas di daerah, antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan KB, intervensi percepatan penurunan *stunting*, serta penguatan tenaga lini lapangan (Penyuluhan KB/PLKB). Dengan skema pendanaan yang berkelanjutan ini, pemerintah daerah memiliki instrumen yang lebih memadai untuk melaksanakan program secara efektif dan konsisten.

Namun demikian, alokasi dukungan melalui DAK Fisik dan Non Fisik (BOKB) sebagaimana dimaksud (yang diupayakan keberlanjutannya) juga sangat tergantung dengan kondisi keuangan negara. Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui DAK ini merupakan upaya dorongan dan bentuk kepedulian Pemerintah Pusat atas implementasi program/kegiatan prioritas agar dapat terlaksana dengan baik dengan tidak terlepas dari dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah. Mekanisme *sharing budget* juga sangat diharapkan sehingga kedua pihak menunjukkan komitmen (kolaborasi) yang kuat terhadap upaya penyampaian program/kegiatan secara langsung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lapangan dengan efektif, efisien dan akuntabel, mekanisme monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari PD KB di tingkat kabupaten/kota, Perwakilan BKKBN di provinsi, hingga pusat. Proses monev tersebut ditunjang oleh sistem informasi terintegrasi, antara lain SIGA (Sistem Informasi Keluarga) dan Morena (Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK Jenis KB). Sistem ini menghimpun dan menyajikan data secara *real time*, sehingga integrasi pusat-daerah dapat terwujud, dan hasilnya menjadi dasar pengambilan keputusan, evaluasi kebijakan, serta penguatan tata kelola program Bangga Kencana.

Melalui transformasi kerangka kelembagaan dan mekanisme kolaborasi yang kuat, Kemendukbangga/BKKBN dapat hadir sebagai garda depan

dalam penataan kependudukan nasional melalui Program Bangga Kencana. Program yang dicanangkan tidak semata-mata hanya terbatas pada upaya menyeimbangkan angka kelahiran, tetapi merancang arah pembangunan manusia Indonesia dari hulu, yang dimulai dari keluarga melalui Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang terstruktur dan terarah, terukur dan menyeluruh di seluruh tingkatan wilayah. Dengan desain kelembagaan yang kuat dan pendekatan kolaboratif, kementerian ini diharapkan mampu mempercepat penurunan *stunting*, pengentasan kemiskinan ekstrim, turut mendukung pengelolaan jendela peluang (*windows of opportunities*) menjadi bonus demografi yang sesungguhnya, serta mendukung upaya pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui berbagai kegiatan strategis Program Bangga Kencana.

Setelah bertransformasi menjadi kementerian, proses bisnis BKKBN mengalami perubahan yang mencerminkan peran baru yang lebih luas.

1. Proses inti Kemendukbangga terdiri atas: (a) Pengelolaan Pengendalian Penduduk; (b) Pengelolaan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR); (c) Pengelolaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; (d) Pengelolaan Penggerakan dan Peran serta Masyarakat; serta (e) Pengelolaan Pendataan Bangga Kencana. Penambahan elemen strategi data ini menunjukkan arah baru yang mengedepankan kebijakan dan program berbasis bukti serta integrasi lintas sektor.
2. Proses Pendukung Kemendukbangga/BKKBN terdiri atas: (a) urusan administrasi umum; (b) pengawasan; (c) Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, (d) Pengelolaan Kerjasama; dan (e) Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Proses ini merupakan elemen penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan terlaksananya proses inti.

Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan program-sentrис menuju pendekatan yang lebih strategis, berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan struktur baru ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diharapkan mampu memainkan peran yang lebih kuat dalam perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung target Indonesia Emas 2045.

Modal utama untuk membangun integrasi antar lembaga adalah penguatan lembaga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN). Kelembagaan yang lebih lincah dapat membantu Kemendukbangga/BKKBN beroperasi lebih efektif, dengan tim yang mampu berinovasi dan berkolaborasi dengan cepat di berbagai tingkatan. Sebagai Lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang dalam mengurus keluarga khususnya dalam penanggulangan dari hulu (pra-nikah), maka kelembagaannya perlu diperkuat.

Dalam transformasi kelembagaan Kemendukbangga/BKKBN memiliki *modality* tenaga lapangan yang tersebar diseluruh pelosok desa/kelurahan, optimalisasi pelaksanaan kependudukan dan pembangunan keluarga serta pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah dilaksanakan dengan pendekatan Paradigma *collaborative* dalam pengelolaan dan penanganan berbagai permasalahan masyarakat terutama

permasalahan keluarga. *Collaborative governance* sebagai suatu pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan langsung pemangku kepentingan di luar pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bersama yang formal. Pengambilan keputusan berorientasi pada konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk mengembangkan atau melaksanakan kebijakan publik.

Kemendukbangga/BKKBN kedepan dalam melaksanakan seluruh program berbasis pada data. Data merupakan hal paling penting dalam pengambilan kebijakan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki Sistem Informasi Pendataan Keluarga dan data keluarga *by name by address*. Akurasi data tersebut telah diakui dalam intervensi program percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain itu Kemendukbangga/BKKBN memiliki Jaringan yang sangat luas sebagai syarat *agile organization*. Penguatan kelembagaan dengan bentuk Kementerian sebagai pengharmonisasian aktor-aktor dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. TFR asimetris;
2. Bonus Demografi; dan
3. Percepatan penurunan *stunting*.

Peningkatan kolaborasi lintas fungsi dan tingkatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Kemendukbangga/BKKBN, penerapan *Agile Transformation* berarti organisasi ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan kebijakan kependudukan nasional. Struktur kelembagaan yang lebih lincah dapat membantu Kemendukbangga/BKKBN beroperasi lebih efektif, dengan tim yang mampu berinovasi dan berkolaborasi dengan cepat di berbagai tingkatan. Dalam alternatif kelembagaan BKKBN diintegrasikan ke dalam struktur Kementerian Kependudukan dan pembangunan keluarga. Berikut adalah beberapa elemen penting dari pendekatan kelembagaan ini:

1. Struktur Kementerian yang Lebih Terpusat Pada tingkat pusat, Kemendukbangga/BKKBN akan menjadi kementerian yang dipimpin oleh seorang Menteri Kependudukan. Struktur ini memberikan kekuatan untuk mengoordinasikan program-program terkait kependudukan, pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara lebih terpusat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan seragam, sesuai dengan prinsip *Agile* yang menekankan kecepatan dan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan;
2. Kantor Wilayah (Kanwil) Kemendukbangga/BKKBN di tingkat provinsi yang akan dibentuk, bertugas sebagai koordinator utama untuk program Bangga Kencana. Kantor ini berfungsi untuk mengawasi dan memberikan bimbingan teknis di tingkat kabupaten dan kota. Prinsip *Agile* dapat diterapkan di sini, dimana Kanwil akan bertindak sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di lapangan, memastikan bahwa setiap provinsi dapat menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap dalam koridor kebijakan pusat;
3. Tata kelola kependudukan tidak dapat dilakukan secara parsial pada satu kota/kabupaten saja, tetapi harus terintegrasi dan terkoneksi, oleh karenanya dibutuhkan Koordinator Tim Kerja di Kabupaten/Kota Pada tingkat kabupaten/kota, akan dibentuk tim kerja yang dipimpin oleh seorang koordinator. Koordinator ini

bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan dan program nasional diimplementasikan dengan baik di daerahnya. Dengan adanya tim yang otonom, seperti yang dianjurkan dalam *Agile Transformation*, tim kerja ini dapat bergerak cepat untuk menanggapi masalah-masalah lokal, melakukan inovasi, dan memberikan solusi yang relevan bagi masyarakat di daerah tersebut;

4. Peran di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, penyuluhan KB dan penyuluhan Lapangan KB akan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas kependudukan dan pembangunan keluarga. Mereka bertugas melakukan advokasi, edukasi, serta pendampingan kepada masyarakat, para penyuluhan ini dapat bertindak sebagai agen perubahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, memberikan informasi dan layanan yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat;
5. Dukungan administratif setiap tingkatan dalam struktur ini akan dibantu oleh tenaga administrasi untuk memastikan kelancaran operasional dan menekankan pentingnya dukungan yang efisien dari *back-office*, sehingga tim di lapangan dapat fokus pada pelaksanaan tugas utama mereka tanpa terhambat oleh masalah administrasi yang berlebihan;
6. Penguatan kapasitas perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, minimal berkaitan dengan:
 - a) Penerapan kompetensi pemerintahan bidang kependudukan dan pembangunan keluarga pada pejabat di perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - b) Koordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dalam pelaksanaan sertifikasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan KB; dan
 - c) Penguatan program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB di daerah dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
7. Penetapan kebijakan yang mengatur hubungan fungsional antara perwakilan BKKBN Provinsi dengan perangkat daerah yang menangani urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Memperkuat pengendalian, pendistribusian, dan menjamin kualitas kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota berdasarkan jarak antar wilayah, letak geografis, kebutuhan masyarakat dan pemerataan pelayanan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan berbagai strategi operasional Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka berikut ini dirumuskan target kinerja dan kerangka pendanaan untuk periode 2025-2029.

Kemendukbangga/BKKBN memiliki 1 (satu) program teknis yaitu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan 1 (satu) program pendukung yaitu Program Dukungan Manajemen Kemendukbangga/BKKBN. Berikut adalah ruang lingkup kedua program tersebut.

1. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), terdiri dari:
 - a. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK);
 - b. Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK);
 - c. Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR);
 - d. Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat (PERMAS);
 - e. Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (JAKSTRA);
 - f. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PUSBANG SDM); dan
 - g. Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN).
2. Program Dukungan Manajemen Kemendukbangga/BKKBN, terdiri atas:
 - a. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (SETMEN/SETTAMA); dan
 - b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama (ITTAMA).

Secara khusus, PUSBANG SDM melaksanakan kegiatan yang mendukung baik program teknis maupun program pendukung, yaitu: (1) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) eksternal kelembagaan untuk mendukung program teknis Bangga Kencana; dan (2) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) internal kelembagaan untuk mendukung program dukungan manajemen.

4.1 Target Kinerja

- A. Keterkaitan Target Kinerja Renstra 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Target kinerja pada Renstra 2025-2029 disusun berdasarkan target indikator RPJMN 2025-2029. Dalam hal ini, seluruh indikator yang dimandatkan kepada Kemendukbangga/BKKBN pada level Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP), telah diakomodir pada Renstra 2025-2029 dengan menyesuaikan pada struktur organisasi serta tugas dan fungsi Kemendukbangga/BKKBN. Berikut adalah uraian detil kesesuaian

Renstra 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029 yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kesesuaian Indikator RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Posisi Indikator dalam RPJMN	Posisi Indikator dalam Rancangan Renstra	Target RENSTRA					Kese suaiant Target RENSTRA dan RPJMN
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	Rata-Rata Kelahiran per WUS 15-49 Tahun	Indikator PN 4	Indikator Tujuan	2,12	2,11	2,10	2,10	2,10	Sesuai
2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)</i>	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	Indikator dalam KP: Penurunan kematian ibu dan anak	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	19,4	19,0	18,6	18,2	17,8	Sesuai
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (<i>Proportion of demand satisfied by modern methods</i>)	Persen	Indikator dalam PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	84.7	85.3	85.9	86.5	87.1	Sesuai
4	Persentase KB Pasca Persalinan	Persen	Indikator dalam KP: Penurunan kematian ibu dan anak	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	57	60	64	69	75	Sesuai
5	Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 HPK	Persen	Indikator dalam KP: Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>	Indikator Kinerja Kegiatan	75	80	85	90	95	Sesuai
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need KB</i>)	Persen	Indikator dalam KP: Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro	Indikator Kinerja Sasaran Program	10.5	10	9.5	9	8.5	Sesuai
7	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern contraceptive prevalence rate (mCPR)</i>	Persen	Indikator Kinerja Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	61.8	61.9	62	62.1	62.2	Sesuai

No.	Indikator	Satuan	Posisi Indikator dalam RPJMN	Posisi Indikator dalam Rancangan Renstra	Target RENSTRA					Keseuaian Target RENSTRA dan RPJMN
					2025	2026	2027	2028	2029	
8	Persentase peserta KB aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen		Indikator Kinerja Kegiatan	25,7	26	26,2	26,4	26,7	Sesuai
9	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks (Skala 1-100)	Indikator PN 4	Indikator Tujuan	72,89	73,83	74,5	75,09	75,5	Sesuai
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 1-100)	Indikator dalam PP 14 - Peningkatan Ketangguhan Keluarga	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	64,1	65,8	67,5	69,2	70,9	Sesuai
11	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Tahun		Indikator Kinerja Sasaran Program	22,4	22,5	22,6	22,7	22,8	Sesuai
12	Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini	Indeks (Skala 1-100)	Indikator dalam KP 01 - Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak	Indikator Kinerja Kegiatan	55,66	56,16	56,61	57,04	57,43	Sesuai
13	Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja	Persen		Indikator Kinerja Kegiatan	45	51	57	63	70	Sesuai
14	Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah	Persen		Indikator Kinerja Kegiatan	45	51	57	63	70	Sesuai
15	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	Indeks (Skala 1-100)	Indikator dalam KP 02 - Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga	Indikator Kinerja Kegiatan	85,20	85,70	86,20	86,70	87,20	Sesuai
16	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau	Persen		Indikator Kinerja Kegiatan	70	75	80	85	90	Sesuai
17	Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	Persen		Indikator Kinerja Kegiatan	10	20	30	40	50	Sesuai

No.	Indikator	Satuan	Posisi Indikator dalam RPJMN	Posisi Indikator dalam Rancangan Renstra	Target RENSTRA					Keseuaian Target RENSTRA dan RPJMN
					2025	2026	2027	2028	2029	
18	Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	Indeks (Skala 1-100)	Indikator dalam KP 03 - Pemenuhan Hak Sipil, Hukum, dan Ekonomi Keluarga dan Afirmasi bagi Keluarga Rentan	Indikator Kinerja Kegiatan	55,41	56,41	57,41	58,41	59,41	Sesuai
19	Indeks Kerentanan Keluarga	Persen		Indikator Kinerja Sasaran Program	8,6	8,4	8,2	8,0	7,8	Sesuai
20	Percentase lansia yang mendapatkan pendampingan	Persen	Indikator dalam KP 01 - Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Indikator Kinerja Kegiatan	10	12	14	16	18	Sesuai

Renstra Kemendukbangga/BKKBN juga memuat indikator yang tidak dimandatkan dalam RPJMN 2025-2029 namun merupakan penerjemahan tugas dan fungsi organisasi serta dinilai dapat memberikan dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional.

B. Target Indikator Kinerja Kemendukbangga/BKKBN

Kemendukbangga/BKKBN telah menetapkan target kinerja pada masing-masing level indikator, mulai dari tujuan, sasaran strategis, program, hingga kegiatan. Capaian indikator diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Indikator tujuan Kemendukbangga/BKKBN dapat tercapai melalui kontribusi dari capaian indikator di level sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis merupakan pencerminan dari berhasilnya capaian keluaran pada level output/kegiatan dan pada level program.

Pada level tujuan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki tiga indikator yang dapat merefleksikan keberhasilan penyelenggaraan program Bangga Kencana dapat dilihat pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target

Kode	Indikator Tujuan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
T1	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas							
	1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	61,8 (2024)	63,5	65,2	66,8	68,4	69,8	Indeks (Skala 1-100)
	2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	69,51 (2023)	72,89	73,83	74,53	75,09	75,55	Indeks (Skala 1-100)
	3. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	2,14 (PK,2023)	2,12	2,11	2,10	2,10	2,10	Rata-rata anak per wanita

Dalam mencapai tujuan di atas, dibutuhkan kontribusi dari 6 (enam) Sasaran Strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 di bawah ini. Masing-masing sasaran strategis memiliki indikator dan target sebagai refleksi dari hasil kinerja Kemendukbangga/BKKBN dalam 5 tahun kedepan.

Tabel 4.3 Sasaran strategis, Indikator Sasaran Strategis, dan target

Kode	Indikator Sasaran Strategis	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SS1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga							
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,4 (PK, 2024)	64,1	65,8	67,5	69,2	70,9	Indeks (Skala 1-100)
SS2	Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun							
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)</i>	19,7 (PK, 2023)	19,4	19,0	18,6	18,2	17,8	Kelahiran per WUS 15-19 tahun
SS3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk							
	Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	53,7 (2024)	54,4	55,1	55,8	56,5	57,2	Indeks (Skala 1-100)

Kode	Indikator Sasaran Strategis	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SS4	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi							
	1. Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) / <i>Unwanted Pregnancy</i>	13,20 (PK, 2024)	12,60	12,20	11,90	11,60	11,30	Persen
	2. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (<i>Proportion of Demand Satisfied by Modern Method</i>)	83,9 (PK, 2024)	84,7	85,3	85,9	86,5	87,1	Persen
SS5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat yang merata dalam pelaksanaan program Bangga Kencana							
	Indeks Partisipasi Masyarakat (IPaM) dalam Program Bangga Kencana	N/A	60,36	63,82	67,29	70,76	74,22	Indeks (Skala 1-100)
SS6	Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang Kolaboratif, Kapabel dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat							
	Indeks Reformasi Birokrasi	82,17 (RB, 2024)	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	Indeks (Skala 1-100)

Sasaran Strategis Kemendukbangga/BKKBN dapat dicapai melalui kontribusi dari hasil pelaksanaan program baik secara teknis maupun pendukung. Program Teknis Bangga Kencana pada Renstra Kemendukbangga/BKKBN 2025-2029 diimplementasikan oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon 1 (Kedeputian), dan 2 (dua) Unit Pusat (Eselon-2). Target kinerja dari Unit Kerja Eselon 1 dituangkan dalam sasaran program dan indikatornya. Pada level dibawahnya/Unit Kerja Eselon II, terdapat Sasaran Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator pengukurnya. Berikut adalah uraian dari masing-masing unit kerja tersebut:

- Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) melingkupi: (1) Bina Ketahanan Remaja; (2) Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak; (3) Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan, dan (4) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Berikut ini adalah uraian sasaran program dan kegiatan serta indikator di bawah lingkup bidang KSPK.

Tabel 4.4 Sasaran Program dan Kegiatan beserta Target Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Bidang KSPK

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SP1	Meningkatnya kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)							
	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	22,3 (PK, 2024)	22,4	22,5	22,6	22,7	22,8	Tahun
SP2	Meningkatnya ketahanan keluarga sesuai siklus hidup							
	1. Indeks Kerentanan Keluarga	8,83 (PK, 2024)	8,60	8,40	8,20	8,00	7,80	Indeks (skala 1-100)
	2. Indeks Lansia Berdaya	56,99 (PK, 2024)	61,25	61,5	61,75	62	62,25	Indeks (skala 1-100)
Direktorat Bina Ketahanan Remaja								
SK1	Meningkatnya kualitas remaja (termasuk pra remaja) dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja							
	1. Indeks Ketahanan Remaja	67,43 (Susenas, 2024)	68,07	68,72	69,40	70,10	70,81	Indeks (skala 1-100)
	2. Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pranikah	39,7 (Elsimil Catin dan Simkah, 2023)	45	51	57	63	70	Per센
SK2	Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan remaja serta kualitas ayah dalam pengasuhan anak dan pendampingan remaja							
	1. Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja	N/A	45	51	57	63	70	Per센
	2. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	84,60 (PK, 2024)	85,20	85,70	86,20	86,70	87,20	Indeks (skala 1-100)
Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak								
SK1	Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak usia dini (0-6 tahun)							
	1. Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini	54,31 (Susenas & PK)	55,66	56,16	56,61	57,04	57,43	Indeks (skala 1-100)
	2. Persentase tempat penitipan anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	N/A	10	20	30	40	50	Per센

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan		
			2025	2026	2027	2028	2029			
Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan										
SK1	Meningkatnya Kualitas Hidup Lansia dan Pelayanan Keluarga Rentan									
	1. Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	8,19 (SIGA)	10	12	14	16	18	Persen		
	2. Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau	65,97 (SIGA)	70	75	80	85	90	Persen		
	Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga									
SK1	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Keluarga									
	Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	54,0 (PK, 2024)	55,41	56,41	57,41	58,41	59,41	Indeks (skala 1-100)		

- b. Bidang Pengendalian Penduduk melingkupi: (1) Perencanaan Pengendalian Penduduk; (2) Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk; (3) Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan; dan (4) Analisa Dampak Kependudukan. Berikut ini adalah uraian sasaran program dan kegiatan serta indikator di bawah lingkup bidang Pengendalian Penduduk.

Tabel 4.5 Sasaran Program dan Kegiatan beserta Target Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SP1 Meningkatnya Sinergi Kebijakan Pengendalian Penduduk secara Holistik dan Komprehensif								
	1. Persentase Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	N/A	15,2	30,2	43,9	60,0	76,7	Persen
	2. Persentase Kementerian/Lembaga yang Melaksanakan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	N/A	33 (8 K/L)	50 (12 K/L)	67 (16 K/L)	83 (20 K/L)	100 (24 K/L)	Persen
	3. Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan	54,7 (2024)	55,4	56,1	56,8	57,5	58,2	Persen

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
	4. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	30 (SIGA, 2024)	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	Persen
Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk								
SK1	Meningkatnya Pemanfaatan Parameter Kependudukan untuk Perencanaan Pengendalian Penduduk di Daerah							
	1. Jumlah Pemerintah Daerah yang Memiliki Peta Jalan Pembangunan Kependudukan berkualitas	N/A	6 Prov 77 kab/ kota (83)	12 Prov 153 kab/ kota (165)	17 Prov 223 kab/ kota (240)	23 prov 305 kab/ kota (328)	38 prov 381 Kab/ kota (419)	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)
	2. Jumlah Pemerintah Daerah yang Menyediakan dan Memanfaatkan Data Parameter dan Proyeksi Kependudukan dalam Pembangunan Daerah	N/A	2 Prov 39 Kab/ Kota (41)	8 Prov 83 Kab/ Kota (91)	14 Prov 132 Kab/ Kota (146)	22 Prov 186 Kab/ Kota (208)	38 Prov 245 Kab/ Kota (283)	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)
	3. Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang menjadi rujukan perencanaan dan intervensi di desa/kelurahan	N/A	514	2.056	4.626	8.224	13.364	Rumah DataKu
Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk								
SK1	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk di Seluruh Tingkatan Wilayah							
	1. Persentase Kementerian/Lembaga yang Menjalankan seluruh Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	N/A	30	48	65	83	100	Persen
	2. Persentase Pemerintah Daerah yang Menjalankan seluruh Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	N/A	13	28	42	58	75	Persen
Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan								
SK1	Meningkatnya sinergitas penerapan program pendidikan kependudukan							
	1. Jumlah institusi pendidikan jalur formal (Sekolah/Madrasah/Perguruan	735 (2024)	798	908	1077	1305	1563	Lembaga

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Tinggi) yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan							
	2. Jumlah Mitra Kerja yang melaksanakan pendidikan kependudukan Jalur Nonformal	26	34	68	102	136	170	Mitra Kerja
	3. Jumlah Pusat Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat (PESAT) yang Melaksanakan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal	1096	1134	1253	1372	1491	1610	Kelompok Masyarakat
Direktorat Analisa Dampak Kependudukan								
SK1	Meningkatnya Implementasi Penanganan Terpadu Dampak Kependudukan							
	1. Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan Sistem Peringatan Dini Dampak Kependudukan sebagai bahan advokasi kebijakan daerah	50,7 (20 Prov 257 Kab/Kota) (2024)	60,6 (23 Prov 308 Kab/ Kota)	65,9 (26 Prov 334 Kab/ Kota)	71,4 (30 Prov 360 Kab/ Kota)	76,7 (34 Prov 385 Kab/ Kota)	82,2 (38 Prov 411 Kab/ Kota)	Persen
	2. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan	30 (2024)	35	40	45	50	55	Persen
	3. Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan sektor terkait	81,6 (2024)	89,5	92,1	94,7	97,4	100	Persen

- c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi melingkupi: (1) Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana (KB); (2) Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB); (3)

Bina Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Wilayah dan Sasaran Khusus; dan (4) Bina Kesehatan Reproduksi. Berikut ini adalah uraian sasaran program dan kegiatan serta indikator di bawah lingkup bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Tabel 4.6 Sasaran Program dan Kegiatan beserta Target Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK1	Meningkatnya Kesertaan KB pada Wilayah dan Sasaran Khusus							
	1. Persentase kesertaan KB di Wilayah Khusus	55,17 (PK, 2024)	55,49	55,81	56,13	56,45	56,77	Persen
	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Pria	2,61 (PK, 2024)	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	Persen
Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi								
SK1	Meningkatnya kualitas kesehatan reproduksi							
	1. Indeks Keterpaparan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	37,5	40,0	41,5	43,0	44,5	46,0	Indeks (Skala 1-100)
	2. Persentase KB Pasca persalinan	48,90 (SIGA 2024)	57	60	64	69	75	Persen

- d. Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat meliputi: (1) Bina Penggerak Lini Lapangan; (2) Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan; (3) Bina Peran serta Masyarakat; dan (4) Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan. Berikut ini adalah uraian sasaran program dan kegiatan serta indikator di bawah lingkup bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat

Tabel 4.7 Sasaran Program dan Kegiatan beserta Target Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SP1	Meningkatnya kualitas penggerakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang kolaboratif							
	Indeks kualitas penggerakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (IKAP)	N/A	56.48	62.35	68.25	74.13	80.00	Indeks (Skala 1-100)
Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan								
SK1	Meningkatnya kinerja tenaga ASN penyuluhan KB dan PLKB							
	1. Persentase tenaga ASN Penyuluhan KB dan PLKB yang berkinerja sangat baik	N/A	50	55	60	65	70	Persen
	2. Persentase wilayah kerja binaan yang memiliki Kinerja	35	40	45	50	55	60	Persen

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Program Bangga Kencana dengan kategori baik							
Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan								
SK1	Meningkatnya efektivitas Pendayagunaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan untuk Program Bangga Kencana							
	1. Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang memiliki klasifikasi mandiri	4	19	34	49	64	80	Persen
	2. Persentase keluarga sasaran yang mendapatkan pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	60	75	80	85	90	95	Persen
	Direktorat Bina Peran serta Masyarakat							
SK1	Meningkatnya Penerimaan masyarakat terhadap program Bangga Kencana							
	1. Indeks penerimaan Masyarakat terhadap Program Bangga Kencana	57,4	59,9	62,4	65	67,5	70	Indeks (Skala 1 – 100)
	2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Program Bangga Kencana melalui pengelola program, petugas dan kader	N/A	82	83	84	85	86	Persen
	Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan							
SK1	Meningkatnya efektivitas Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan untuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana							
	1. Persentase mitra yang berkontribusi dalam gerakan pencegahan dan penurunan Stunting	N/A	95	96	97	98	99	Persen
	2. Persentase mitra kerja yang melaksanakan MOU/Perjanjian Kerja Sama sesuai rencana aksi	40	50	60	70	80	90	Persen

- e. Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana meliputi: (1) Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk; (2) Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana; (3) Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan Keluarga dan Pelayanan Keluarga, serta (4) Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana. Berikut ini adalah uraian sasaran program dan kegiatan serta indikator di bawah lingkup bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Tabel 4.8 Sasaran Program dan Kegiatan beserta Target Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan	
			2025	2026	2027	2028	2029		
SP1	Terwujudnya ekosistem <i>evidence-based policy</i> Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana								
	1. Indeks Kualitas Kebijakan	66,03 (RB,2023)	66,1	66,2	66,3	66,4	66,5	Indeks (Skala 1 – 100)	
Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk									
SK1	Terwujudnya sistem tata kelola data dan informasi secara terbuka serta terintegrasi, yang dimanfaatkan dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi bidang penyerasian kebijakan pengendalian kuantitas penduduk								Persen
	1. Persentase dokumen rekomendasi kebijakan bidang penyerasian kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang disusun dengan menggunakan data/informasi yang terbuka dan terintegrasi	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00		
	2. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem tata kelola data dan informasi pada rekomendasi kebijakan bidang penyerasian kebijakan pengendalian	N/A	3,43	3,48	3,53	3,58	3,63	Indeks (Skala 1 – 4)	

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana								
SK1	Terwujudnya sistem tata kelola data dan informasi secara terbuka serta terintegrasi, yang dimanfaatkan dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi bidang penyerasian pembangunan keluarga dan keluarga berencana							
	1. Persentase dokumen rekomendasi kebijakan bidang penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana yang disusun dengan menggunakan data/informasi yang terbuka dan terintegrasi	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	Persen
	2. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem tata kelola data dan informasi pada rekomendasi kebijakan bidang penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana	N/A	3,43	3,48	3,53	3,58	3,63	Indeks (Skala 1 – 4)
	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan Keluarga dan Pelayanan Keluarga							
SK1	Terwujudnya sistem tata kelola data dan informasi secara terbuka serta terintegrasi, yang dimanfaatkan dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga							
	1. Persentase dokumen rekomendasi kebijakan bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	Persen

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
	keluarga dan pelayanan keluarga yang disusun dengan menggunakan data/informasi yang terbuka dan terintegrasi							
	2. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem tata kelola data dan informasi pada rekomendasi kebijakan bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga	N/A	3,43	3,48	3,53	3,58	3,63	Indeks (Skala 1 – 4)
Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana								
SK1	Terwujudnya sistem tata kelola data dan informasi secara terbuka serta terintegrasi, yang dimanfaatkan dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi bidang peningkatan kualitas sumber daya dan kemandirian keluarga berencana							
	1. Persentase dokumen rekomendasi kebijakan bidang peningkatan kualitas sumber daya dan kemandirian keluarga berencana yang disusun dengan menggunakan data/informasi yang terbuka dan terintegrasi	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	Persen
	2. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem tata kelola data dan informasi pada rekomendasi kebijakan	N/A	3,43	3,48	3,53	3,58	3,63	Indeks (Skala 1 – 4)

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
	bidang peningkatan kualitas sumber daya dan kemandirian keluarga berencana							

- f. Inspektorat Utama meliputi: (1) Inspektorat Wilayah I; (2) Inspektorat Wilayah II; dan (3) Inspektorat Wilayah III. Berikut ini adalah uraian sasaran program dan kegiatan serta indikator di bawah lingkup Inspektorat Utama

Tabel 4.9 Sasaran Program dan Kegiatan beserta Target Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Inspektorat Utama

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SP1	Terwujudnya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang Akuntabel dan Berintegritas							
	1. Persentase Materialitas Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan	0	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	Persen
	2. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,10	18,35	18,60	18,85	19,10	19,35	Nilai
	3. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level (1 – 5)	
	4. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,514	3,549	3,584	3,619	3,655	3,690	Indeks (Skala 1 – 5)
	5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	1	2	2	2	2	2	Skala (0 – 3)
Inspektorat Wilayah I								
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal yang Berbasis Risiko dan Berorientasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola di Wilayah I							
	1. Persentase Penerapan PKPT Berbasis Risiko pada Wilayah I	72	75	100	100	100	100	Persen
	2. Persentase Temuan LHE AKIP Kementerian PAN dan RB yang Telah Direkomendasikan Perbaikannya	41,67	90	90	90	90	90	Persen

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
	dalam LHE AKIP Internal di Wilayah I							
	3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP	100	100	100	100	100	100	Persen
	4. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK pada Wilayah I	N/A	100	100	100	100	100	Persen
	5. Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti secara Substantif pada Wilayah I	N/A	90	90	90	90	90	Persen
	6. Persentase Fasilitasi Unit Kerja Potensial yang akan Diusulkan Berpredikat ZI di Wilayah I	100	100	100	100	100	100	Persen
Inspektorat Wilayah II								
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal yang Berbasis Risiko dan Berorientasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola di Wilayah II							
	1. Persentase Penerapan PKPT Berbasis Risiko pada Wilayah II	72	75	100	100	100	100	Persen
	2. Persentase Temuan LHE AKIP Kementerian PAN dan RB yang Telah Direkomendasikan Perbaikannya dalam LHE AKIP Internal di Wilayah II	41,67	90	90	90	90	90	Persen
	3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP	100	100	100	100	100	100	Persen
	4. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut	N/A	100	100	100	100	100	Persen

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Kerja Potensial yang akan Diusulkan Berpredikat ZI di Wilayah III							

- g. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama meliputi: (1) Biro Sumber Daya Manusia (SDM); (2) Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana; (3) Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); (4) Biro Perencanaan dan Keuangan; dan (5) serta Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik. Berikut ini adalah uraian sasaran program dan kegiatan serta indikator di bawah lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

Tabel 4.10 Sasaran Program dan Kegiatan beserta Target Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SP1	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang Akuntabel dan Berintegritas							
	1. Opini atas Laporan Keuangan dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK	
	2. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,13	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4	Level Maturitas (Level 1-5)
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	71	71,5	72	72,5	73	73,5	Indeks (Skala 1-100)
	4. Indeks Sistem Merit	0,92	0,94	0,94	0,96	0,96	0,97	Indeks (Skala 0-1)
	5. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,35	4,4	4,45	4,5	4,55	4,6	Indeks (Skala 1-5)
	6. Indeks Pemerintahan Digital	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4	Indeks (Skala 1-5)
	7. Indeks Kepuasan Layanan Dukungan manajemen	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	Indeks (Skala 1-4)
Biro Sumber Daya Manusia (SDM)								
SK1	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendukbangga/BKKBN yang Berkualitas Prima							
	1. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Kemendukbangga/	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62	3,63	Indeks (Skala 1-4)

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
	BKKBN							
	2. Indeks BerAKHLAK Kemendukbangga/ BKKBN	82,3	82,33	82,36	82,39	82,42	82,45	Indeks (Skala 1-100)
Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana								
SK1	Terwujudnya landasan hukum dan penataan organisasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan Program Bangga Kencana							
	1. Indeks Reformasi Hukum; dan	97,62	97,63	97,64	97,65	97,66	97,67	Indeks (Skala 1-100)
	2. Persentase Penataan Organisasi.	N/A	60	70	80	90	100	Persen
Biro Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)								
SK1	Terwujudnya pelayanan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan dan protokol, kesekretariatan pimpinan, sarana prasarana, pengelolaan BMN serta kearsipan yang berkualitas							
	1. Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan , pengadaan barang dan jasa, dan Pengelolaan BMN;	N/A	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	Skala (1-4)
	2. Nilai Komposit IPA dan IPGA;	N/A	3	3,1	3,2	3,3	3,4	Skala (1-4)
	3. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa; dan	60	60	65	69	70	71	Indeks (Skala 1-100)
	4. Nilai Hasil Pengawasan kearsipan.	66,53	67	69	71	73	75	Indeks (Skala 1-100)
Biro Perencanaan dan Keuangan								
SK1	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, serta Pengelolaan Keuangan Program Bangga Kencana yang berkualitas							
	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN);	98,78	98,79	98,80	98,81	98,82	98,83	Nilai (Skala 1-100)
	2. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA);	96,42	96,43	96,44	96,45	96,46	96,47	Nilai (Skala 1-100)
	3. Persentase AoI Tindak Lanjut Evaluasi Penilaian	N/A	20	30	40	50	60	Persen

Kode	Indikator Program/Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Mandiri Maturitas SPIP; dan							
	4. Persentase Jurnal Koreksi BPK atas Realisasi Belanja.	N/A	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Persen
Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik								
SK1	Terwujudnya layanan Kehumasan dan Komunikasi Publik yang berkualitas							
	1. Persentase Pengetahuan Masyarakat terhadap Program Bangga Kencana melalui media; dan	N/A	50	60	70	80	90	Persen
	2. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.	N/A	3	3,1	3,2	3,3	3,5	Indeks (Skala 1-4)

- h. Selain Unit Kerja Eselon I, terdapat 2 Unit Pusat yang mendukung tercapainya sasaran strategis Kemendukbangga/BKKBN, yaitu: (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana; dan (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi. Berikut adalah uraian Sasaran Kegiatan beserta indikator dan target dari kedua pusat tersebut.

Tabel 4.11 Sasaran Kegiatan beserta Indikator dan Target pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana dan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Kode	Indikator Kegiatan	Baseline	Target					Satuan		
			2025	2026	2027	2028	2029			
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana										
SK1	Terwujudnya SDM Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang berkualitas									
	Jumlah SDM Eksternal yang mendapatkan pelatihan Program	545	545	558	574	586	596	Orang		

Kode	Indikator Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana.							
SK2	Terwujudnya SDM internal Kemendukbangga/BKKBN pusat yang Berkualitas							
	1. Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKK BN pusat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi untuk Pemenuhan Standar Kompetensi	N/A	75	76	77	78	79	Persen
	2. Persentase Pegawai yang telah Dilakukan Pemetaan Penilaian Potensi dan Kompetensi	27	36	45	54	63	72	Persen
Pusat Data dan Teknologi Informasi								
SK 1	Terwujudnya satu data keluarga melalui sistem informasi keluarga yang berkualitas dan terintegrasi							
	Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana	70,05	73,8 7	76,8 9	79,4 3	81,5 4	84,6 2	Indeks (Skala 1-100)
SK 2	Terwujudnya pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berbasis teknologi Informasi yang berkualitas di setiap tingkatan wilayah							
	1. Indeks keamanan manajemen sistem informasi	3,93	4	4,05	4,1	4,15	4,2	Indeks (Skala 1-5)
	2. Indeks Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,5	3,7	3,9	4,1	4,2	4,3	Indeks (Skala 1-5)

- i. BKKBN Perwakilan Provinsi meliputi: (1) Bidang Pengendalian Penduduk; (2) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; (3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; (4) Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat; (5) Pusbang SDM; (6) Data dan Teknologi Informasi di Provinsi; (7) Bidang Kebijakan dan Strategi; serta (8) Dukungan Manajemen Provinsi. Berikut ini adalah uraian sasaran kegiatan serta indikator di bawah lingkup BKKBN Perwakilan Provinsi.

Tabel 4.12 Sasaran Kegiatan beserta Indikator dan Target Kegiatan BKKBN Perwakilan Provinsi

Kode	Indikator Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
Bidang Pengendalian Penduduk								
SK1	Meningkatnya Integrasi Kebijakan Kependudukan dalam Pembangunan Daerah							
	1. Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di atas nilai Nasional	61,1	61,4	62	63,9	65,2	66,5	Persen
SK1	2. Persentase Kabupaten/Kota dengan klasifikasi nilai Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) minimal kategori "Sedang"	45,33 (233 kab/kota) (2024)	47,27 (243 kab/kota)	49,22 (253 kab/kota)	51,17 (263 kab/kota)	53,11 (273 kab/kota)	55,06 (283 kab/kota)	Persen
	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga							
SK1	Terwujudnya keberhasilan pembangunan keluarga yang merata di Provinsi							
	1. Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian iBangga diatas capaian iBangga provinsi	53,31	56,61	58,95	63,23	65,18	68,87	Persen
SK1	2. Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun dibawah capaian provinsi	52,92	56,77	61,66	66,55	71,44	76,34	Persen
	Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi							
SK1	Meningkatnya penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang merata di Provinsi							
	1. Persentase kabupaten/kota dengan capaian Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut	54,86	56,42	59,14	63,62	66,34	67,9	Persen

Kode	Indikator Kegiatan	Baseline	Target					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK1	Terwujudnya Implementasi kebijakan strategi yang termanfaatkan di Tingkat Provinsi							
	Indeks Implementasi Kebijakan Strategi Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di provinsi	N/A	65	65,1	65,2	65,3	65,4	Indeks (Skala 1-100)
Dukungan Manajemen Provinsi								
SK1	Terwujudnya penyelenggaraan Dukungan manajemen yang berkualitas di Tingkat Provinsi							
	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen di Tingkat Provinsi	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	Indeks (Skala 1- 4)
SK2	Terwujudnya pengelolaan program yang akuntabel dan berintegrasi di Tingkat Provinsi							
	Indeks Zona Integritas (ZI)	71,6	75	75	75	75	75	Indeks (Skala 1-100)
SK3	Terwujudnya SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang Berkualitas							
	Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKK BN provinsi yang mengikuti pengembangan kompetensi untuk pemenuhan standar kompetensi	N/A	75	76	77	78	79	Persen

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pendekatan penganggaran diarahkan agar berbasis program (*money follows program*) melalui penganggaran berbasis kinerja.

Kerangka pendanaan disusun guna pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rasionalisasi Kerangka Pendanaan Kemendukbangga/BKKBN 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran perlu berorientasi pada hasil dengan menetapkan prioritas nasional dan pengembangan aspek kewilayahan. Penentuan prioritas nasional sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah dan hasil evaluasi capaian indikator Renstra Kemendukbangga/BKKBN serta mempertimbangkan daya ungkit terhadap capaian nasional dan sasaran strategis;
2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang menjadi bahan pertimbangan besaran pagu anggaran dalam waktu 3 tahun kedepan perlu diperkuat. Reviu *baseline* yang menjadi dasar pengukuran efektivitas dan efisiensi anggaran Kemendukbangga/BKKBN perlu memberikan input terhadap Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang disusun. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja (*value for money*) dan penajaman anggaran berbasis kinerja berdasarkan kinerja tahun berjalan dan bukan terhadap realisasi;
3. Transfer Ke Daerah (TKD) merupakan skema alternatif kerangka pendanaan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah. Skema alternatif pendanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang diperuntukan bagi daerah dapat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan DAK non-fisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Penyaluran skema alternatif pendanaan tetap melalui proses sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi, baik sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada); Demikian pula skema transfer dilakukan dengan sinkronisasi dalam penjabaran kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta tetap memperhatikan isu strategis program/ kegiatan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Skema hibah dalam dan luar negeri melalui mitra pembangunan juga dapat berkontribusi dan diberikan ruang untuk pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang bersifat inovatif; dan
5. Kerangka pendanaan melalui kemitraan dengan swasta atau *public private partnership (PPP)* juga memiliki potensi besar dalam kerangka pendanaan dan akan dalam kemungkinannya.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kemendukbangga/BKKBN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga Renstra Kemendukbangga/BKKBN ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah ditetapkan pemerintah.

Secara umum, kerangka logis yang dibangun dalam Renstra Kemendukbangga/BKKBN ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan kontribusi secara langsung dan terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029. Salah satu acuan yang paling mendasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah 17 (tujuh belas) Arah/Tujuan Pembangunan Indonesia Emas.

Dalam arah/tujuan tersebut, Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) berkontribusi pada tujuan transformasi sosial khususnya terkait dengan kesehatan untuk semua dan perlindungan sosial yang adaptif. Selain itu program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) juga berkontribusi pada tujuan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi khususnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.

Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kerangka waktu dalam pencapaian sasaran program/kegiatan prioritas, baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya (program/kegiatan jangka pendek/tahunan). Pembangunan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) diharapkan mampu mengikuti perkembangan isu dan lingkungan strategis sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan Kemendukbangga/BKKBN.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun melalui rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian beserta evaluasinya. Dengan demikian, seluruh Unit Kerja di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN memiliki target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi, baik pada setiap tahunnya, pertengahan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, maupun pada akhir periode 5 tahun (2029) sesuai ketentuan yang berlaku.

Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Tahun 2025-2029 juga sudah memenuhi kaidah-kaidah *management strategic planning* yang dapat menggambarkan keefektifan organisasi dalam menjalankan amanat Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Oleh karena itu, pada saat penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN diparalelkan dengan penyusunan Pohon Kinerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi.

Secara umum model perencanaan strategis dengan menggambarkan pohon kinerja dapat membantu Kemendukbangga/BKKBN dalam memperjelas dan menerjemahkan upaya dukungan terhadap Visi, Misi, dan Janji Presiden melalui berbagai strategi yang tertera dalam Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029, serta untuk mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis dalam merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis.

Selanjutnya, dalam operasionalisasi Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029, revitalisasi program/kegiatan dapat dilakukan melalui penajaman tugas/fungsi Kemendukbangga/BKKBN dengan mengacu pada kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan yang telah disusun. Tentunya pengembangan kegiatan operasional tidak hanya menitikberatkan pada penyusunan kebijakan, tapi juga harus memperhatikan kaidah perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, memberikan tempat yang lebih terhadap fungsi-fungsi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta sinkronisasi program/kegiatan lintas sektor.

Sebagai penutup, Rencana Strategis Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029, apabila terdapat hal-hal krusial dan strategis yang perlu disesuaikan maka dapat dilakukan perubahan (tertentu) dengan terlebih dahulu melakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik untuk menilai capaian kinerja, efektivitas program, serta dampaknya terhadap pembangunan nasional.

Monitoring dan evaluasi (Monev) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Renstra Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2025-2029. Monev dilakukan secara komprehensif dan berlapis, melibatkan peran aktif Perwakilan BKKBN di provinsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah. Untuk memperkuat efektivitas Monev, Kemendukbangga/BKKBN memanfaatkan aplikasi dan sistem data yang dimiliki, seperti Sistem Informasi Keluarga (SIGA), serta berbagai platform digital pendukung lainnya. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui manajemen risiko Pembangunan Nasional, kajian kelayakan, serta sistem data, informasi, dan teknologi terintegrasi, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Rencana Strategis (Renstra).

LAMPIRAN 1:

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN TAHUN 2025-2029**

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KEMENDUKBANGGA)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)									4.411.387,36	4.666.021,59	4.942.073,28	5.238.673,54	5.546.677,62	
	SS 1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga												
	ISS 1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Pusat	62,4 (PK, 2024)	64,1	65,8	67,5	69,2	70,9					
	SS 2	Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun												
	ISS 2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19)	Pusat	19,7 (PK, 2023)	19,4	19,0	18,6	18,2	17,8					
	SS 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk												
	ISS 3	Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	Pusat	53,7 (2024)	54,4	55,1	55,8	56,5	57,2					
	SS 4	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi												
	ISS 4	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (<i>Proportion of Demand Satisfied by Modern Method</i>)	Pusat	83,9 (PK, 2024)	84,7	85,3	85,9	86,5	87,1					
	ISS 5	Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)/ <i>Unwanted Pregnancy</i>	Pusat	13,20 (PK, 2024)	12,60	12,20	11,90	11,60	11,30					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SS 5	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang merata dalam pelaksanaan program Bangga Kencana												
	ISS 6	Indeks Partisipasi Masyarakat (IPaM) dalam Program Bangga Kencana	Pusat	N/A	60,36	63,82	67,29	70,76	74,22					
	SS 6	Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang Kolaboratif, Kapabel dan Berintegritas untuk Melayani Masyarakat												
	ISS 7	Indeks Reformasi Birokrasi	Pusat	82,17 (RB, 2024)	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50					
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana									1.103.546,66	1.166.424,75	1.232.444,00	1.306.466,06	1.378.537,48	
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	SP 1	Sasaran Program (<i>Outcome</i>): Meningkatnya kualitas persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)												Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
	IKP 1	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Pusat	22,3 (PK, 2024)	22,4	22,5	22,6	22,7	22,8					
	SP 2	Sasaran Program (<i>Outcome</i>): Meningkatnya ketahanan keluarga sesuai siklus hidup												
	IKP 2	Indeks Kerentanan Keluarga	Pusat	8,83 (PK)	8,60	8,40	8,20	8,00	7,80					
	IKP 3	Indeks Lansia Berdaya	Pusat	56,99 (PK)	61,25	61,5	61,75	62	62,25					
Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak	SK 1.1	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>): Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan anak usia dini (0-6 tahun)							6.262,04	6.637,76	7.036,02	7.458,19	7.905,68	Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak
	IKK 1	Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini	Pusat	54,31 (Susenas & PK)	55,66	56,16	56,61	57,04	57,43					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 2	Pusat	N/A	10	20	30	40	50						
	001	Pusat	32	38	38	38	38	38	1.400,00	1.484,00	1.573,04	1.667,42	1.767,47	
	001.01	Pusat	32	38	38	38	38	38						
	001.02	Pusat	2.923.137	3.537.380	4.280.060	5.178.688	6.265.687	7.581.204						
	002	Pusat	93.800 (SIGA)	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	562,04	595,76	631,50	669,39	709,56	
	002.01	Pusat	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800						
	003	Pusat	N/A	38	38	38	38	38	4.300,00	4.558,00	4.831,48	5.121,37	5.428,65	
	003.01	Pusat	N/A	38	38	38	38	38						
Pembinaan Ketahanan Remaja	SK 2.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya kualitas remaja (termasuk pra remaja) dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja							3.349,95	3.550,95	3.764,00	3.989,84	4.229,23	Direktorat Bina Ketahanan Remaja

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK 1	Pusat	39,7 (Elsimil Catin dan Simkah, 2023)	45	51	57	63	70						
	IKK 2	Pusat	67,43 (Susenas, 2024)	68,07	68,72	69,40	70,10	70,81						
	SK 2.2		Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>): Meningkatnya kemampuan keluarga dalam pengasuhan remaja serta kualitas ayah dalam pengasuhan anak dan pendampingan remaja						6.009,10	6.369,65	6.751,82	7.156,93	7.586,35	
	IKK 3	Pusat	84,60 (PK, 2024)	85,20	85,70	86,20	86,70	87,20						
	IKK 4	Pusat	N/A	45	51	57	63	70						
	001	Pusat	34	38	38	38	38	38	340,15	360,56	382,19	405,12	429,43	
	001.01	Pusat	Jumlah provinsi yang mendapatkan Pembinaan Pelembagaan BKR dalam rangka Pendampingan Masa Perkembangan Remaja dan Penguatan Karakter	34	38	38	38	38						
	002	Pusat	Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Ketahanan Remaja	34	38	38	38	38	368,95	391,09	414,55	439,43	465,79	
	002.01	Pusat	Jumlah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Bidang Pembinaan Ketahanan Remaja	34	38	38	38	38						
	003	Pusat	Provinsi yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Genre	34	38	38	38	38	2.498,75	2.648,68	2.807,60	2.976,05	3.154,61	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	003.01	Pusat	34	38	38	38	38	38						
	004	Pusat	34	38	38	38	38	38	451,20	478,27	506,97	537,39	569,63	
	004.01	Pusat	34	38	38	38	38	38						
	005	Pusat	34	38	38	38	38	38	4.300,00	4.558,00	4.831,48	5.121,37	5.428,65	
	005.01	Pusat	34	38	38	38	38	38						
	006	Pusat	34	38	38	38	38	38	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,02	1.262,48	
	006.01	Pusat	34	38	38	38	38	38						
	007	Pusat	384	384	384	384	384	384	400,00	424,00	449,44	476,41	504,99	
	007.01	Pusat	384	384	384	384	384	384						
	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	SK 3.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Kualitas Hidup Lansia dan Pelayanan Keluarga Rentan						2.547,00	2.699,82	2.861,81	3.033,52	3.215,53	Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	IKK 1	Pusat	8,19 (SIGA) (1.774.431)	10 (2.166.582)	12 (2.599.898)	14 (3.033.215)	16 (3.466.531)	18 (3.899.847)						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau	Pusat	65,97 (SIGA) (3.290)	70 (3.491)	75 (3.740)	80 (3.990)	85 (4.239)	90 (4.488)						
	001 Pedoman terkait peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga	Pusat	1	1	1	1	1	1	190,00	201,40	213,48	226,29	239,87	
	001. 01 Jumlah pedoman terkait peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga	Pusat	1	1	1	1	1	1						
	002 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia	Pusat	34	38	38	38	38	38	210,00	222,60	235,96	250,11	265,12	
	002. 01 Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia	Pusat	34	38	38	38	38	38						
	003 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Lansia Berdaya	Pusat	34	38	38	38	38	38	1.300,00	1.378,00	1.460,68	1.548,32	1.641,22	
	003. 01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Lansia Berdaya	Pusat	34	38	38	38	38	38						
	004 Keluarga yang mendapatkan pelayanan konsultasi dan konseling keluarga	Pusat	135.361 (SIGA)	208.175	279.959	351.744	423.528	495.312	193,50	205,11	217,42	230,46	244,29	
	004. 01 Jumlah Keluarga yang mendapatkan pelayanan konsultasi dan konseling keluarga	Pusat	135.361 (SIGA)	208.175	279.959	351.744	423.528	495.312						
	005 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan	Pusat	34	38	38	38	38	38	233,50	247,51	262,36	278,10	294,79	
	005. 01 Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan	Pusat	34	38	38	38	38	38						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	006	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Pusat	34	38	38	38	38	420,00	445,20	471,91	500,23	530,24	
	006.01	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Pusat	34	38	38	38	38						
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	SK 4.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Keluarga							2.465,22	2.613,14	2.769,92	2.936,12	3.112,29	Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
	IKK 1	Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	Pusat	54,0 (PK, 2024)	55,41	56,41	57,41	58,41	59,41					
	001	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga	Pusat	34	38	38	38	38	2.465,22	2.613,14	2.769,92	2.936,12	3.112,29	
	001.01	Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga	Pusat	34	38	38	38	38						
	SP 3	Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya Sinergi Kebijakan Pengendalian Penduduk secara Holistik dan Komprehensif												Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk
Bidang Pengendalian Penduduk	IKP1	Persentase Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Pusat	N/A	15,2	30,2	43,9	60,0	76,7					
	IKP2	Persentase Kementerian/Lembaga yang Melaksanakan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Pusat	N/A	33 (8 K/L)	50 (12 K/L)	67 (16 K/L)	83 (20 K/L)	100 (24 K/L)					
	IKP3	Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan	Pusat	54,7 (2024)	55,4	56,1	56,8	57,5	58,2					
	IKP4	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Pusat	30 (SIGA, 2024)	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Perencanaan Pengendalian Penduduk	SK 5.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Pemanfaatan Parameter Kependudukan untuk Perencanaan Pengendalian Penduduk di Daerah							1.575,00	1.669,50	1.769,67	1.875,85	1.988,40	Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk
	IKK 1	Jumlah Pemerintah Daerah yang Memiliki Peta Jalan Pembangunan Kependudukan berkualitas	Pusat	N/A	6 Prov 77 kab/kota (83)	12 Prov 153 kab/kota (165)	17 Prov 223 kab/kota (240)	23 prov 305 kab/kota (328)	38 prov 381 kab/kota (419)					
	IKK 2	Jumlah Pemerintah Daerah yang Menyediakan dan Memanfaatkan Data Parameter dan Proyeksi Kependudukan dalam Pembangunan Daerah	Pusat	N/A	2 Prov 39 Kab/Kota (41)	8 Prov 83 Kab/Kota (91)	14 Prov 132 Kab/Kota (146)	22 Prov 186 Kab/Kota (208)	38 Prov 245 Kab/Kota (283)					
	IKK 3	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang menjadi rujukan perencanaan dan intervensi di desa/kelurahan	Pusat	N/A	514	2.056	4.626	8.224	13.364					
	001	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Pusat	N/A	38 Prov508 Kab/Kota(546)	600,00	636,00	674,16	714,61	757,49				
	001. 01	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Pusat	N/A	38 Prov 508 Kab/Kota (546)									
	002	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dalam penyediaan Data Parameter dan Proyeksi Kependudukan	Pusat	N/A	38 Prov 508 Kab/Kota (546)	437,50	463,75	491,58	521,07	552,33				

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	002.01	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dalam penyediaan Data Parameter dan Proyeksi Kependudukan	Pusat	N/A	38 Prov 508 Kab/Kota (546)										
	003	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna	Pusat	34	38	38	38	38	537,50	569,75	603,94	640,17	678,58		
	003.01	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna	Pusat	34	38	38	38	38							
Kebijakan Pengembangan Sosial Ekonomi	SK 6.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk di Seluruh Tingkatan Wilayah							1.927,00	2.042,62	2.165,18	2.295,09	2.432,79	Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	
	IKK 1	Persentase Kementerian/Lembaga yang Menjalankan seluruh Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Pusat	N/A	30	48	65	83	100						
	IKK 2	Persentase Pemerintah daerah yang Menjalankan seluruh Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Pusat	N/A	13	28	42	58	75						
	001	Kementerian/Lembaga yang Menjalankan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Pusat	N/A	7	11	15	19	23	400,00	424,00	449,44	476,41	504,99	
	001.01	Persentase Kementerian/Lembaga yang Menjalankan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Pusat	N/A	30	48	65	83	100						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	002	Pemerintah daerah yang Menjalankan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Pusat	N/A	83	165	240	328	419	1.527,00	1.618,62	1.715,74	1.818,68	1.927,80	
	002.01	Persentase Pemerintah daerah yang Menjalankan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan	Pusat	N/A	15	30	44	60	77						
Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan	SK 7.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya sinergitas penerapan program pendidikan kependudukan							1.800,00	1.908,00	2.022,48	2.143,83	2.272,46	Direktorat Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan	
	IKK 1	Jumlah institusi pendidikan jalur formal (Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi) yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Pusat	735 (2024)	798	908	1077	1305	1563						
	IKK 2	Jumlah Mitra Kerja yang melaksanakan pendidikan kependudukan Jalur Nonformal	Pusat	26	34	68	102	136	170						
	IKK 3	Jumlah Pusat Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat (PESAT) Yang Melaksanakan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal	Pusat	1096	1134	1253	1372	1491	1610						
	001	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pendidikan kependudukan jalur formal, In formal, dan non formal	Pusat	34	38	38	38	38	38	1.800,00	1.908,00	2.022,48	2.143,83	2.272,46	
	001.01	Jumlah Sekolah/madrasah yang telah melaksanakan Sekolah Siaga Kependudukan dengan kriteria Paripurna	Pusat	682	730	808	945	1141	1367						
	001.02	Jumlah Perguruan Tinggi yang telah melaksanakan pendidikan kependudukan	Pusat	53	68	100	132	164	196						
	001.03	Jumlah Mitra Kerja yang melaksanakan fasilitasi pendidikan kependudukan Jalur Nonformal	Pusat	26	34	68	102	136	170						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	001.04	Jumlah Pusat Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat (PESAT) yang melaksanakan fasilitasi pendidikan kependudukan Jalur Informal	Pusat	1096	1134	1253	1372	1491	1610						
Analisa Dampak Kependudukan	SK 8.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Implementasi Penanganan Terpadu Dampak Kependudukan							1.656,38	1.755,76	1.861,10	1.972,77	2.091,14	Direktorat Analisa Dampak Kependudukan	
	IKK 1	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan Sistem Peringatan Dini Dampak Kependudukan sebagai bahan advokasi kebijakan daerah	Pusat	50,7 (20 Prov 257 Kab/Kota) (2024)	60,6 (23 Prov 308 Kab/Kota)	65,9 (26 Prov 334 Kab/Kota)	71,4 (30 Prov 360 Kab/Kota)	76,7 (34 Prov 385 Kab/Kota)	82,2 (38 Prov 411 Kab/Kota)						
	IKK 2	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan	Pusat	30 (2024)	35	40	45	50	55						
	IKK 3	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan hasil analisis dampak kependudukan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan sektor terkait	Pusat	81,6 (2024)	89,5	92,1	94,7	97,4	100						
	001	Provinsi yang mendapatkan Bimbingan teknis dalam pelaksanaan analisis dampak kependudukan	Pusat	34	38	38	38	38	38	1.456,38	1.543,76	1.636,38	1.734,57	1.838,64	
	001.1	Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam memanfaatkan Sistem Peringatan Dini	Pusat	34	38	38	38	38	38						
	001.2	Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam pelaksanaan analisis dampak kependudukan	Pusat	34	38	38	38	38	38						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	002	Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	Pusat	167 (SIGA, 2024)	180	194	207	220	234	200,00	212,00	224,72	238,20	252,50	
	002.1	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	Pusat	167 (2024)	180	194	207	220	234						
Bidang Keluarga Bina Berencana dan Kesehatan Reproduksi	SP 4	Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran												Kedeputian Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
	IKP 1	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Pusat	61,7 (PK,2024)	61,8	61,9	62,0	62,1	62,2						
	IKP 2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need KB)	Pusat	11,1 (PK, 2024)	10,5	10,0	9,5	9,0	8,5						
	IKP 3	Persentase PUS dengan Kehamilan Risiko Tinggi (4 Terlalu)	Pusat	28,30 (PK, 2024)	28,00	27,70	27,40	27,10	26,80						
Pembinaan Akses Pelayanan Keluarga Berencana	SK 9.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya akses pelayanan KB								2.779,32	2.946,08	3.122,85	3.310,22	3.508,83	Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana
	IKK 1	Persentase Layanan Kesehatan Primer yang Siap Melayani KB Lebih dari 3 (tiga) Jenis Kontrasepsi Modern	Pusat	N/A	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0						
	IKK 2	Persentase peserta KB aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pusat	25,5 (PK, 2024)	25,7	26,0	26,2	26,4	26,7						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	001	Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	Pusat	21.016 (SIGA, 2024)	21.619	22.222	22.825	23.428	24.031	666,00	705,96	748,32	793,22	840,81	
	001. 01	Persentase Fasyankes tergister di Kemendukbangga/BKKBN yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	Pusat	100	100	100	100	100							
	001. 02	Persentase Fasyankes yang mengalami stock out Alokon	Pusat	31,9	29,9	27,9	25,9	23,9	21,9						
	002	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB	Pusat	34	38	38	38	38	38	999,00	1.058,94	1.122,48	1.189,82	1.261,21	
	002. 01	Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB	Pusat	34	38	38	38	38	38						
	003	Pedoman di bidang akses pelayanan KB	Pusat	2	2	2	2	2	2	442,00	468,52	496,63	526,43	558,01	
	003. 01	Jumlah pedoman di bidang akses pelayanan KB yang tersedia	Pusat	2	2	2	2	2	2						
	004	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan peningkatan pelayanan KB MKJP di fasyankes	Pusat	34	38	38	38	38	38	672,32	712,66	755,42	800,74	848,79	
	004. 01	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan peningkatan pelayanan KB MKJP di fasyankes	Pusat	34	38	38	38	38	38						
Pembinaan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	SK 10.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan KB							1.828,90	1.938,63	2.054,95	2.178,25	2.308,94	Direktorat Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	
	IKK 1	Indeks Kualitas Pelayanan KB	Pusat	46,74 (PK, 2024)	52,45	54,90	57,35	59,80	62,25						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	Pusat	48,00 (PK, 2024)	49,74	52,74	55,74	58,74	61,74						
	001 Pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Pusat	1	1	1	1	1	1	150,00	159,00	168,54	178,65	189,37	
	001.01 Jumlah pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana yang tersedia	Pusat	1	1	1	1	1	1						
	002 Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB	Pusat	34	38	38	38	38	38	1.278,90	1.355,63	1.436,97	1.523,19	1.614,58	
	002.01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan kualitas pelayanan KB	Pusat	34	38	38	38	38	38						
	003 Pemerintah Daerah yang mendapatkan Dukungan Fasilitasi kerjasama lintas sektor dalam pembinaan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan KB dan Kespro	Pusat	34	38	38	38	38	38	400,00	424,00	449,44	476,41	504,99	
	003.01 Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan Dukungan Fasilitasi kerjasama lintas sektor dalam pembinaan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan KB dan Kespro	Pusat	34	38	38	38	38	38						
Peningkatan Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus	SK 11.1 Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Kesertaan KB pada Wilayah dan Sasaran Khusus								5.083,53	5.388,54	5.711,85	6.054,57	6.417,84	Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus
	IKK 1 Persentase kesertaan KB di Wilayah Khusus	Pusat	55,17 (PK, 2024)	55,49	55,81	56,13	56,45	56,77						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	IKK 2	Pusat	2,61 (PK, 2024)	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15							
	001	Pusat	34	38	38	38	38	38	4.526,21	4.797,78	5.085,64	5.390,78	5.714,23		
	001.01	Pusat	34	38	38	38	38	38							
	002	Pusat	34	38	38	38	38	38	557,33	590,76	626,21	663,78	703,61		
	002.01	Pusat	34	38	38	38	38	38							
Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	SK 12.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya kualitas kesehatan reproduksi							2.027,00	2.148,62	2.277,53	2.414,19	2.559,04	Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi	
	IKK 1	Pusat	48,90 (SIGA 2024)	57	60	64	69	75							
	IKK 2	Pusat	37,5	40,0	41,5	43,0	44,5	46,0							
	001	Pusat	34	38	38	38	38	38	987,00	1.046,22	1.108,99	1.175,53	1.246,06		
	001.01	Pusat	34	38	38	38	38	38							

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator		Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kesehatan Reproduksi dan Pengembangan Keluarga	002	Fasilitasi Substansi dan Bimbingan Teknis dalam pembinaan PUS atas KTD dan kehamilan berisiko tinggi (4T) bagi Provinsi	Pusat	34	38	38	38	38	38	440,00	466,40	494,38	524,05	555,49	
	002.01	Jumlah Fasilitasi Substansi dan Bimbingan Teknis dalam pembinaan PUS atas KTD dan kehamilan berisiko tinggi (4T) bagi Provinsi	Pusat	34	38	38	38	38	38						
	003	Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi	Pusat	34	38	38	38	38	38	350,00	371,00	393,26	416,86	441,87	
	003.01	Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi	Pusat	34	38	38	38	38	38						
	004	Fasilitasi dan Pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP (Pro Pn DKI Jakarta)	Pusat	38.762	85.388	91.336	97.887	105.908	112.873	250,00	265,00	280,90	297,75	315,61	
	004.001	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP (Pro Pn DKI Jakarta)	Pusat	38.762	85.388	91.336	97.887	105.908	112.873						
	SP 5	Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kualitas penggerakan program Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang kolaboratif													Kedeputianan Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat
	IKP 1	Indeks kualitas penggerakan program kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana (IKaP)	Pusat	N/A	56.48	62.35	68.25	74.13	80.00						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Mitra kerja Terhadap Program Bangga Kencana	SK 13.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Penerimaan masyarakat terhadap program Bangga Kencana							54.057,61	57.301,07	60.739,13	64.383,48	68.246,49	Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat	
	IKK 1	Indeks penerimaan Masyarakat terhadap program Bangga Kencana	Pusat	57,4	59,9	62,4	65	67,5	70						
	IKK 2	Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Program Bangga Kencana melalui pengelola program, petugas dan kader	Pusat	N/A	82	83	84	85	86						
	001	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi bimbingan teknis bidang peran serta masyarakat	Pusat	N/A	38	38	38	38	38	1.298,87	1.376,80	1.459,41	1.546,97	1.639,79	
	001.01	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi bimbingan teknis bidang peran serta masyarakat	Pusat	N/A	38	38	38	38	38						
	002	Penyebarluasan informasi terkait program Bangga Kencana melalui pengelola program, petugas dan kader	Pusat	N/A	38	38	38	38	38	52.758,74	55.924,26	59.279,72	62.836,50	66.606,69	
	002.01	Jumlah Penyebarluasan informasi terkait program Bangga Kencana melalui pengelola, petugas dan kader	Pusat	N/A	38	38	38	38	38						
	SK 14.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya kinerja tenaga ASN penyuluh KB dan PLKB							1.303,00	1.381,18	1.464,05	1.551,89	1.645,01	Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan	
	IKK 1	Persentase tenaga ASN Penyuluh KB dan PLKB yang berkinerja sangat baik	Pusat	N/A	50	55	60	65	70						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	IKK 2	Pusat	35	40	45	50	55	60							
	001	Pusat	38	38	38	38	38	38	947,61	1.004,47	1.064,74	1.128,62	1.196,34		
	001. 01	Pusat	38	38	38	38	38	38							
	002	Pusat	38	38	38	38	38	38	355,39	376,71	399,31	423,27	448,67		
	002. 01	Pusat	38	38	38	38	38	38							
Peningkatan Kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan	SK 15.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya efektivitas Pendayagunaan Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan untuk Program Bangga Kencana							1.100,00	1.166,00	1.235,96	1.310,12	1.388,72	Direktorat Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan	
	IKK 1	Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang memiliki klasifikasi mandiri	Pusat	4	19	34	49	64	80						
	IKK 2	Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK)	Pusat	60	75	80	85	90	95						
	001	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Kualitas dan Kuantitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan	Pusat	N/A	38	38	38	38	38	869,23	921,39	976,67	1.035,27	1.097,39	
	001. 01	Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Kualitas dan Kuantitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan		34	38	38	38	38	38						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	002	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga	Pusat	34	38	38	38	0	11.089,62	8.318,00	6.151,93	5.302,31	0,00		
	002.01	Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga	Pusat	34	38	38	38	0							
Peningkatan Pendayagunaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemangku Kebijakan dalam Penguatan Program Bangga Kencana	SK 16.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya efektivitas Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan untuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana							25.160,00	26.669,60	28.269,78	29.965,96	31.763,92	Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan	
	IKK 1	Persentase mitra yang berkontribusi dalam gerakan pencegahan dan penurunan Stunting	Pusat	N/A	95	96	97	98	99						
	IKK 2	Persentase mitra kerja yang melaksanakan MOU/Perjanjian Kerja Sama sesuai rencana aksi	Pusat	40	50	60	70	80	90						
	001	Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	Pusat	N/A	38	38	38	38	38	3.300,00	3.498,00	3.707,88	3.930,35	4.166,17	
	001.01	Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	Pusat	N/A	38	38	38	38	38						
	002	Penguatan Fasilitasi Teknis Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana	Pusat	36	40	50	60	70	80	21.860,00	23.171,60	24.561,90	26.035,61	27.597,75	
	002.01	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Teknis Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana	Pusat	36	40	50	60	70	80						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SP 6	Sasaran Program (Outcome): Terwujudnya ekosistem evidence-based policy Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana												Kedeputian Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	IKP 1	Indeks Kualitas Kebijakan	Pusat	66,03 (RB, 2023)	66,1	66,2	66,3	66,4	66,5					
Penguatan Kualitas Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	SK 17.1	Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya sistem tata kelola data dan informasi secara terbuka serta terintegrasi, yang dimanfaatkan dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi bidang penyerasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk							1.006,00	1.066,36	1.130,34	1.198,16	1.270,05	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk
	IKK1	Persentase dokumen rekomendasi kebijakan bidang penyerasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang disusun dengan menggunakan data/informasi yang terbuka dan terintegrasi	Pusat	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00					
	IKK2	Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem tata kelola data dan informasi pada rekomendasi kebijakan bidang penyerasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	Pusat	N/A	3,43	3,48	3,53	3,58	3,63					
	001	Pengembangan kebijakan strategi bidang penyerasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	Pusat	N/A	2	2	2	2	2	650,00	689,00	730,34	774,16	820,61

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	001.01	Pusat	N/A	2	2	2	2	2						
	002	Pusat	N/A	5	6	7	8	9	356,00	377,36	400,00	424,00	449,44	
	002.01	Pusat	N/A	5	6	7	8	9						
Penguatan Kualitas Kebijakan Penyerasian Pembangunan Keluarga Dan Keluarga Berencana	SK 18.1	Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya sistem tata kelola data dan informasi secara terbuka serta terintegrasi, yang dimanfaatkan dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi bidang penyerasian pembangunan keluarga dan keluarga berencana							1.024,00	1.085,44	1.150,57	1.219,60	1.292,78	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana
	IKK1	Pusat	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00						
	IKK2	Pusat	N/A	3,43	3,48	3,53	3,58	3,63						
	001	Pusat	N/A	2	2	2	2	2	650,00	689,00	730,34	774,16	820,61	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Penguatan Kebijakan Kualitas Akses Pembangunan dan Pelayanan Keluarga	001.01	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang penyerasan pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Pusat	N/A	2	2	2	2						
	002	Mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan kebijakan strategi bidang penyerasan pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Pusat	N/A	5	6	7	8	9	374,00	396,44	420,23	445,44	472,17
	002.01	Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan kebijakan strategi bidang penyerasan pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Pusat	N/A	5	6	7	8	9					
SK 19.1	Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya sistem tata kelola data dan informasi secara terbuka serta terintegrasi, yang dimanfaatkan dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga								1.524,00	1.615,44	1.712,37	1.815,11	1.924,01	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Keluarga
	IKK1	Persentase dokumen rekomendasi kebijakan bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga yang disusun dengan menggunakan data/informasi yang terbuka dan terintegrasi	Pusat	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00					
	IKK2	Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem tata kelola data dan informasi pada rekomendasi kebijakan bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga	Pusat	N/A	3,43	3,48	3,53	3,58	3,63					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	001	Pengembangan kebijakan strategi bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga	Pusat	N/A	2	2	2	2	850,00	901,00	955,06	1.012,36	1.073,11		
	001.01	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga	Pusat	N/A	2	2	2	2							
	002	Mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan kebijakan strategi bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga	Pusat	N/A	5	6	7	8	9	674,00	714,44	757,31	802,74	850,91	
	002.01	Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan kebijakan strategi bidang peningkatan akses dan kualitas pembangunan keluarga dan pelayanan keluarga	Pusat	N/A	5	6	7	8	9						
Penguatan Kebijakan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana	SK 20.1	Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya sistem tata kelola data dan informasi secara terbuka serta terintegrasi, yang dimanfaatkan dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi kebijakan strategi bidang peningkatan kualitas sumber daya dan kemandirian keluarga berencana							1.024,00	1.085,44	1.150,57	1.219,60	1.292,78	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana	
	IKK1	Persentase dokumen rekomendasi kebijakan bidang peningkatan kualitas sumber daya dan kemandirian keluarga berencana yang disusun dengan menggunakan data/informasi yang terbuka dan terintegrasi	Pusat	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK2	Pusat	N/A	3,43	3,48	3,53	3,58	3,63						
	001	Pusat	N/A	2	2	2	2	2	650,00	689,00	730,34	774,16	820,61	
	001.01	Pusat	N/A	2	2	2	2	2						
	002	Pusat	N/A	5	6	7	8	9	374,00	396,44	420,23	445,44	472,17	
	002.01	Pusat	N/A	5	6	7	8	9						
Peningkatan Kualitas Data dan Teknologi Informasi Program Bangga Kencana	SK 21.1		Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya satu data keluarga melalui sistem informasi keluarga yang berkualitas dan terintegrasi						6.656,34	7.055,72	7.479,06	7.927,81	8.403,47	Pusat Data dan Teknologi Informasi
	IKK 1	Pusat	Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana	70,05	73,87	76,89	79,43	81,54	84,62					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK 21.2	Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berbasis teknologi Informasi yang berkualitas di setiap tingkatan wilayah							26.905,34	28.519,66	30.230,84	32.044,69	33.967,37	
	IKK 2	Indeks keamanan manajemen sistem informasi	Pusat	3,93 (BSSN)	4,00	4,05	4,1	4,15	4,2					
	IKK 3	Indeks Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat	3,5 (Pan RB)	3,7	3,9	4,1	4,2	4,3					
	001	Sistem dan informasi keluarga yang dapat menyediakan data dan informasi Program Bangga Kencana yang berkualitas	Pusat	3	4	4	5	6	6	3.476,51	3.685,10	3.906,21	4.140,58	4.389,02
	001. 01	Jumlah Sistem dan informasi keluarga yang dapat menyediakan data dan informasi Program Bangga Kencana yang berkualitas	Pusat	3	4	4	5	6	6					
	001. 02	Jumlah Provinsi yang mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Data dan Informasi	Pusat	34	38	38	38	38	38					
	002	Provinsi yang mendapat fasilitasi pendataan dan pemutakhiran data keluarga	Pusat	34	38	38	38	38	38	3.179,83	3.370,62	3.572,85	3.787,23	4.014,46
	002. 01	Jumlah Provinsi yang mendapatkan Fasilitasi pendataan dan pemutakhiran data keluarga	Pusat	34	38	38	38	38	38					
	003	Sistem Induk Informasi Komunikasi Bangga Kencana	Pusat	1	1	1	1	1	1	21.405,34	22.689,66	24.051,04	25.494,10	27.023,75
	003. 01	Jumlah sistem induk penatakelolaan aplikasi, informasi dan komunikasi Program Bangga Kencana	Pusat	3	3	3	3	3	3					
	003. 02	Jumlah Pengembangan modul Sistem Aplikasi	Pusat	17	5	5	5	5	5					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	004 Pengembangan dan Pengelolaan super app keluarga Indonesia	Pusat	N/A	1	1	1	1	1	5.500,00	5.830,00	6.179,80	6.550,59	6.943,62	
	004.01 Jumlah Pengembangan modul super app keluarga Indonesia berbasis AI	Pusat	N/A	2	2	2	2	2						
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Program Bangga Kencana bagi Tenaga Pengelola/Pelaksana	SK 22.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya SDM Eksternal Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas								6.150,56	6.519,60	6.910,77	7.325,42	7.764,94	Pusat Pengembangan SDM Kependudukan, Pembangunan Keluarga Dan Keluarga Berencana
	IKK 1 Jumlah SDM Eksternal yang mendapatkan pelatihan Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana	Pusat	545	545	558	574	586	596						
	001 SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan Internasional	Pusat	545	545	558	574	586	596	703,09	745,28	789,99	837,39	887,63	
	001.01 Persentase peserta pelatihan SDM Eksternal yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan	Pusat	82	83	84	86	88	90						
	001.02 Persentase capaian peserta pelatihan melalui jalur PNBP	Pusat	100	100	100	100	100	100						
	001.03 Persentase SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan internasional	Pusat	100	100	100	100	100	100						
	002 Lembaga pelatihan yang terakreditasi	Pusat	1	1	2	3	4	5	5.447,47	5.774,32	6.120,78	6.488,03	6.877,31	
	002.01 Jumlah program pelatihan yang terakreditasi A	Pusat	1	1	2	3	4	5						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	002.02	Jumlah penyelenggara program pelatihan yang terakreditasi A	Pusat	1	2	3	5	7	8						
Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	SK 23.1	Sasaran Kegiatan (Output) di Provinsi: Terwujudnya keberhasilan pembangunan keluarga yang merata di Provinsi							47.285,63	50.122,77	53.130,14	56.317,94	59.697,02	Perwakilan BKKBN Provinsi (32 Provinsi)	
	IKK 1	Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian iBangga diatas capaian iBangga provinsi	Provinsi	53,31	56,61	58,95	63,23	65,18	68,87						
	IKK 2	Persentase kabupaten/kota dengan capaian angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun dibawah capaian provinsi	Provinsi	52,92	56,77	61,66	66,55	71,44	76,34						
	001	Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK	Pusat	7.976.954 (PK)	7.976.954	7.976.954	7.976.954	7.976.954	7.976.954	21.915,14	23.230,05	24.623,85	26.101,28	27.667,36	
	001.01	Jumlah Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK	Pusat	7.976.954	7.976.954	7.976.954	7.976.954	7.976.954	7.976.954						
	001.02	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di BKB HI	Provinsi	508	508	508	508	508	508						
	002	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja	Provinsi	33.905	33.905	33.905	33.905	33.905	33.905	9.800,00	10.388,00	11.011,28	11.671,96	12.372,27	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	002.01	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja	Provinsi	33.905	33.905	33.905	33.905	33.905						
	003	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pembangunan keluarga	Provinsi	508	508	508	508	508	15.570,49	16.504,72	17.495,00	18.544,71	19.657,39	
	003.01	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pembangunan keluarga	Provinsi	508	508	508	508	508						
	003.02	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di Tempat Penitipan Anak (TPA)	Provinsi	508	508	508	508	508						
	003.03	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan komunitas ayah teladan	Provinsi	508	508	508	508	508						
	003.04	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah	Provinsi	508	508	508	508	508						
	003.05	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi bimbingan teknis pendampingan lansia berdaya	Provinsi	508	508	508	508	508						
	003.06	Jumlah Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan keluarga melalui Satyagatra	Provinsi	508	508	508	508	508						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	003.07 Jumlah kelompok UPPKA yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga	Provinsi	37.720	37.720	37.720	37.720	37.720	37.720						
	SK 23.2 Meningkatnya Integrasi Kebijakan Kependudukan dalam Pembangunan Daerah								30.744,61	32.589,29	34.544,64	36.617,32	38.814,36	
	IKK 1 Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di atas nilai Nasional	Provinsi	61,1 (2024)	61,4	62,0	63,9	65,2	66,5						
	IKK 2 Persentase Kabupaten/Kota dengan klasifikasi nilai Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) minimal kategori "Sedang"	Provinsi	45.33 (233 kab/kota) (2024)	47.27 (243 kab/kota)	49.22 (253 kab/kota)	51.17 (263 kab/kota)	53.11 (273 kab/kota)	55.06 (283 kab/kota)						
	001 Pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pengendalian penduduk	Provinsi	508	508	508	508	508	508	16.844,61	17.855,29	18.926,60	20.062,20	21.265,93	
	001.01 Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pengendalian penduduk	Provinsi	508	508	508	508	508	508						
	002 Pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	Provinsi	508	508	508	508	508	508	3.200,00	3.392,00	3.595,52	3.811,25	4.039,93	
	002.01 Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	Provinsi	508	508	508	508	508	508						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	003	Kampung Keluarga Berkualitas	Provinsi	24.813 (2024)	28.992	33.172	37.348	41.525	45.706	10.700,00	11.342,00	12.022,52	12.743,87	13.508,50	
	003.01	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan	Provinsi	24.813 (2024)	28.992	33.172	37.348	41.525	45.706						
	SK 23.3	Sasaran Kegiatan (Output) : Meningkatnya penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang merata di Provinsi								664.450,88	704.317,93	746.577,01	791.371,63	838.853,93	
	IKK 1	Persentase kabupaten/kota dengan capaian Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern diatas capaian provinsi	Provinsi	54,86	56,42	59,14	63,62	66,34	67,90						
	IKK 2	Jumlah Kabupaten/Kota dengan peserta KB Pascapersalinan mencapai target	Provinsi	284	263	318	377	432	514						
	001	Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	Provinsi	20.530 (SIGA, 2024)	21.055	21.580	22.105	22.630	23.155	626.537,62	664.129,88	703.977,67	746.216,33	790.989,31	
	001.01	Jumlah Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	Provinsi	20.530 (SIGA, 2024)	21.055	21.580	22.105	22.630	23.155						
	002	Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB	Provinsi	20.530 (SIGA, 2024)	21.055	21.580	22.105	22.630	23.155	3.200,00	3.392,00	3.595,52	3.811,25	4.039,93	
	002.01	Jumlah Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB	Provinsi	20.530 (SIGA, 2024)	21.055	21.580	22.105	22.630	23.155						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	003	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Provinsi	508	508	508	508	508	9.358,76	9.920,29	10.515,51	11.146,44	11.815,22		
	003.01	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Provinsi	508	508	508	508	508							
	003.02	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pelayanan vasektomi	Provinsi	244	259	274	289	304	319						
	004	Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP	Provinsi	2.375.457	2.566.358	2.699.984	2.879.517	3.104.120	3.376.280	5.895,73	6.249,47	6.624,44	7.021,91	7.443,22	
	004.01	Jumlah Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP	Provinsi	2.375.457	2.566.358	2.699.984	2.879.517	3.104.120	3.376.280						
	005	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	Provinsi	508	508	508	508	508	508	9.358,77	9.920,29	10.515,51	11.146,44	11.815,22	
	005.01	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	Provinsi	508	508	508	508	508	508						
	006	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang KBKR	Provinsi	508	508	508	508	508	508	10.100,00	10.706,00	11.348,36	12.029,26	12.751,02	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	006.01	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang KBKR	Provinsi	508	508	508	508	508							
	SK 23.4	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya implementasi penggerakan dan peran serta masyarakat dalam program kependudukan, Pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Provinsi							26.860,20	28.471,82	30.180,13	31.990,93	33.910,39		
	IKK 1	Persentase Putus Pakai Alat dan Obat Kontrasepsi	Provinsi	20,20	19,80	19,40	19,00	18,60	18,20						
	IKK 2	Persentase keluarga yang terpapar program bangga kencana	Provinsi	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00						
	IKK 3	Jumlah mitra kerja yang mendukung Program Bangga Kencana	Provinsi	36	40	50	60	70	80						
	001	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam bidang penggerakan dan peran serta masyarakat	Provinsi	508	508	508	508	508	14.060,20	14.903,82	15.798,05	16.745,93	17.750,68		
	001.01	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam bidang penggerakan dan peran serta masyarakat	Provinsi	508	508	508	508	508							
	002	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	Provinsi	508	508	508	508	508	8.000,00	8.480,00	8.988,80	9.528,13	10.099,82		

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	002.01	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	Provinsi	508	508	508	508	508						
	003	Pemerintah daerah yang melaksanakan promosi Program bangga kencana melalui media lini bawah oleh pengelola program, petugas dan kader	Provinsi	508	508	508	508	508	4.800,00	5.088,00	5.393,28	5.716,88	6.059,89	
	003.01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan promosi Program bangga kencana melalui media lini bawah oleh pengelola program, petugas dan kader	Provinsi	508	508	508	508	508						
	SK 23.5	Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya pengelolaan data dan teknologi informasi yang berkualitas di setiap tingkatan wilayah							144.797,36	153.585,95	161.503,23	172.518,57	182.138,14	
	IKK 1	Persentase pemerintah daerah yang memiliki Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi yang berkualitas	Provinsi	N/A	80	85	90	95	100					
	001	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Provinsi	508	508	508	508	508	3.200,00	3.392,00	3.595,52	3.811,25	4.039,93	
	001.01	Jumlah Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Provinsi	508	508	508	508	508						
	002	Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Provinsi	37	37	37	37	37	141.597,36	150.193,95	157.907,71	168.707,32	178.098,21	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	002.01	Jumlah laporan pelaksanaan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Provinsi	37	37	37	37	37						
	SK 23.6	Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya SDM Eksternal Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana yang Berkualitas Tingkat Provinsi							11.738,34	12.442,64	13.189,20	13.980,56	14.819,39	
	IKK	Persentase SDM Eksternal yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi untuk Pemenuhan Standar Kompetensi Tingkat Provinsi	Provinsi	N/A	83	84	86	88	90					
	001	SDM Eksternal yang mendapatkan pelatihan Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana tingkat provinsi	Provinsi	N/A	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	11.738,34	12.442,64	13.189,20	13.980,56	14.819,39
	001.01	Persentase SDM Eksternal provinsi yang mendapatkan pelatihan	Provinsi	N/A	100	100	100	100	100					
	001.02	Persentase peserta pelatihan SDM Eksternal yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan	Provinsi	N/A	83	84	86	88	90					
	SK 23.7	Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya Implementasi kebijakan strategi yangbermanfaatkan di Tingkat Provinsi							1589,44	1684,80	1785,89	1893,04	2006,63	
	IKK 1	Indeks Implementasi Kebijakan Strategi Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di provinsi	Provinsi	N/A	65,00	65,10	65,20	65,30	65,40					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	001	Implementasi Kebijakan strategi bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di provinsi	Provinsi	N/A	32	32	32	32	1.589,44	1.684,80	1.785,89	1.893,04	2.006,63	
	001.01	Jumlah laporan implementasi Kebijakan strategi bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di provinsi	Provinsi	N/A	32	32	32	32						
Program Dukungan Manajemen									3.307.840,70	3.499.596,85	3.709.629,28	3.932.207,47	4.168.140,15	
Dukungan Manajemen dan tugas teknis lainnya	SP 7	Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang Akuntabel dan Berintegritas												Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama
	IKP 1	Opini atas Laporan Keuangan dari BPK	Pusat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	IKP 2	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Pusat	3,13 (2024)	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40					
	IKP 3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pusat	71,00 (2024)	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50					
	IKP 4	Indeks Sistem Merit	Pusat	0,92	0,94	0,94	0,96	0,96	0,97					
	IKP 5	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Pusat	4,35	4,40	4,45	4,50	4,55	4,60					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
	IKP 6	Indeks Pemerintahan Digital	Pusat	3,40 (MenPan RB)	3,50	3,60	3,70	3,80	4,00				
	IKP 7	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan manajemen	Pusat	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56				
Penguatan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	SK 24.1	Sasaran Kegiatan (Output):Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, serta Pengelolaan Keuangan Program Bangga Kencana yang berkualitas							6.314,18	6.693,03	7.094,61	7.520,28	7.971,50
	IKK 1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	Pusat	98,78 (2024)	98,79	98,80	98,81	98,82	98,83				
	IKK 2	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Pusat	96,42 (2024)	96,43	96,44	96,45	96,46	96,47				
	IKK 3	Persentase AoI Tindak Lanjut Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Pusat	N/A	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0				
	IKK 4	Persentase Jurnal Koreksi BPK atas Realisasi Belanja	Pusat	N/A	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
	001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	8	9	8	8	8	9	3.941,54	4.178,03	4.428,71	4.694,43
	001.01	Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	Pusat	8	9	8	8	8	9				
	001.02	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran	Pusat	1	1	1	1	1	1				

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	002 Koordinasi dan kerjasama Perencanaan Program Bangga Kencana	Pusat	3	3	3	4	4	5	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,02	1.262,48	
	002.01 Jumlah Koordinasi dan kerjasama Perencanaan Program Bangga Kencana	Pusat	3	3	3	4	4	5						
	003 Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	3	3	3	3	3	3	722,64	766,00	811,96	860,67	912,31	
	003.01 Jumlah Layanan Manajemen Keuangan yang dilaksanakan	Pusat	3	3	3	3	3	3						
	003.02 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Pusat	1	1	1	1	1	1						
	004 Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan DAK Sub Bidang KB	Pusat	38	38	38	38	38	38	650,00	689,00	730,34	774,16	820,61	
	004.01 Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan DAK Sub Bidang KB	Pusat	38	38	38	38	38	38						
Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	SK 25.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya landasan hukum dan penataan organisasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan Program Bangga Kencana								2.335,00	2.475,10	2.623,61	2.781,02	2.947,88	Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
	IKK 1 Indeks Reformasi Hukum	Pusat	97,62	97,63	97,64	97,65	97,66	97,67						
	IKK 2 Persentase Penataan Organisasi	Pusat	N/A	60	70	80	90	100						
	001 Layanan Hukum	Pusat	1	1	2	2	2	2	1.111,93	1.178,65	1.249,36	1.324,33	1.403,79	
	001.01 Jumlah Layanan Hukum	Pusat	1	1	2	2	2	2						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	002	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	1	1	2	3	4	5	1.223,07	1.296,45	1.374,24	1.456,70	1.544,10	
	002.01	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	1	1	2	3	4	5						
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Keruماhtanggaan dan Pengelolaan BMN	SK 26.1	Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya pelayanan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, keruماhtanggaan dan protokol, kesekretariatan pimpinan, sarana prasarana, pengelolaan BMN serta kearsipan yang berkualitas							239.502,38	253.872,52	269.104,87	285.251,16	302.366,23	Biro Umum dan Pengelolaan BMN	
	IKK 1	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran, Keruماhtanggaan, pengadaan barang dan jasa, dan Pengelolaan BMN	Pusat	N/A	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	161.354,00	177.489,00	195.238,00	214.762,00	236.238,00	
	IKK 2	Nilai Komposit IPA dan IPGA	Pusat	N/A	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40						
	IKK 3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Pusat	60	60	65	69	70	71	725,00	798,00	878,00	965,00	1.062,00	
	IKK 4	Nilai Hasil Pengawasan kearsipan	Pusat	66,53	67	69	71	73	75						
	001	Layanan Umum	Pusat	1	1	1	1	1	1	4.499,81	4.769,80	5.055,98	5.359,34	5.680,90	
	001.01	Jumlah Layanan Umum yang dilaksanakan	Pusat	12	12	12	12	12	12						
	002	Layanan Protokoler	Pusat	1	1	1	1	1	1	1.535,00	1.627,10	1.724,73	1.828,21	1.937,90	
	002.01	Jumlah Layanan Protokoler yang dilaksanakan	Pusat	12	12	12	12	12	12						
	003	Layanan Perkantoran	Pusat	1	1	1	1	1	1	229.520,93	243.292,18	257.889,71	273.363,10	289.764,88	
	003.01	Jumlah Layanan Perkantoran Kemendukbangga/BKKBN Pusat yang dilaksanakan	Pusat	12	12	12	12	12	12						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Peningkatan Kualitas Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	004	Layanan Kearsipan	Pusat	1	1	1	1	1	915,22	970,13	1.028,34	1.090,04	1.155,45		
	004.01	Jumlah Layanan Kearsipan yang dilaksanakan	Pusat	1	1	1	1	1							
	005	Layanan Barang Milik Negara	Pusat	4	9	9	9	9	3.031,42	3.213,30	3.406,10	3.610,47	3.827,10		
	005.01	Jumlah Layanan Barang Milik Negara yang dilaksanakan	Pusat	4	9	9	9	9							
	005.02	Jumlah Layanan Manajemen Alokasi di Gudang yang dilaksanakan	Pusat	2	2	2	2	2							
Peningkatan Kualitas Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	SK 27.1	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya layanan Kehumasan dan Komunikasi Publik yang berkualitas							4.000,00	4.240,00	4.494,40	4.764,06	5.049,91	Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	
	IKK 1	Persentase Pengetahuan Masyarakat terhadap Program Bangga Kencana melalui media	Pusat	N/A	50	60	70	80	90	592,00	651,00	716,00	788,00	867,00	
	IKK 2	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	Pusat	N/A	3,00	3,10	3,20	3,30	3,50	725,00	798,00	878,00	965,00	1.062,00	
	001	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	Pusat	1	1	1	1	1	2.000,00	2.120,00	2.247,20	2.382,03	2.524,95		
	001.01	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	Pusat	1	1	1	1	1							
	002	Penyebarluasan informasi terkait program Bangga Kencana melalui berbagai media	Pusat	N/A	38	38	38	38	38	2.000,00	2.120,00	2.247,20	2.382,03	2.524,95	
	002.01	Jumlah Penyebarluasan informasi terkait program Bangga Kencana melalui berbagai media oleh Provinsi	Pusat	N/A	38	38	38	38	38						
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBKN	SK 28.1	Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendukbangga/BKKBN yang Berkualitas Prima							3.913,00	4.147,78	4.396,65	4.660,45	4.940,07	Biro Sumber Daya Manusia	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara	IKK 1	Indeks Kepuasan Layanan Kepengawaian Kemendukbangga/BKKBN	Pusat	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62	3,63					
	IKK 2	Indeks BerAKHLAK Kemendukbangga/BKKBN	Pusat	82,30	82,33	82,36	82,39	82,42	82,45					
	001	Layanan Manajemen SDM	Pusat	5973	5973	6390	6807	7224	7641	3.913,00	4.147,78	4.396,65	4.660,45	4.940,07
	001. 01	Jumlah Pegawai yang memperoleh Layanan Manajemen SDM	Pusat	5973	5973	6390	6807	7224	7641					
	002. 01	Jumlah Dokumen Internalisasi Budaya Kerja	Pusat	1	1	1	1	1	1					
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara	SK 29.1	Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya SDM internal Kemendukbangga/BKKBN pusat yang Berkualitas							13.170,26	13.960,48	14.798,10	15.685,99	16.627,15	Pusat Pengembangan SDM Kependudukan, Pembangunan Keluarga Dan Keluarga Berencana
	IKK 1	Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKKBN pusat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi untuk Pemenuhan Standar Kompetensi	Pusat	N/A	75	76	77	78	79					
	IKK 2	Persentase Pegawai yang telah Dilakukan Pemetaan Penilaian Potensi dan Kompetensi	Pusat	27	36	45	54	63	72					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	001	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pusat	757	757	757	757	757	13.170,26	13.960,48	14.798,10	15.685,99	16.627,15		
Pengawasan intern yang efektif	001.01	Jumlah pegawai yang telah dilakukan pemetaan penilaian potensi dan kompetensi	Pusat	3402	4547	5692	6837	7982	9127						
	001.02	Persentase peserta pelatihan SDM Internal Kemendukbangga/BKKBN pusat yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan	Pusat	82	83	84	86	88	90						
	001.03	Persentase Kelas Pembelajaran Berbasis Digital yang terimplementasi dalam CORPU	Pusat	N/A	55	58	60	62	65						
	SP 8	Terwujudnya Program Pembangunan Keluarga, Kependidikan dan Keluarga Berencana yang Akuntabel dan Berintegritas												Inspektorat Utama	
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana wilayah I	IKP 1	Persentase Materialitas Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan	Pusat	0	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50						
	IKP 2	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Pusat	18,10	18,35	18,60	18,85	19,10	19,35						
	IKP 3	Level Kapabilitas APIP	Pusat	Level 3	Level 4										
	IKP 4	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Pusat	3,514	3,549	3,584	3,619	3,655	3,690						
	IKP 5	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Pusat	1	2	2	2	2	2						
	SK 30.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal yang Berbasis Risiko dan Berorientasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola di Wilayah I							3.531,71	3.743,61	3.968,23	4.206,32	4.458,70	Inspektorat Wilayah I	
	IKK 1	Persentase Penerapan PKPT Berbasis Risiko pada Wilayah I	Pusat	72	75	100	100	100							

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
	IKK 2	Persentase Temuan LHE AKIP Kementerian PAN dan RB yang Telah Direkomendasikan Perbaikannya dalam LHE AKIP Internal di Wilayah I	Pusat	41,67	90	90	90	90					
	IKK 3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP	Pusat	100	100	100	100	100					
	IKK 4	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK pada Wilayah I	Pusat	N/A	100	100	100	100					
	IKK 5	Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti secara Substantif pada Wilayah I	Pusat	N/A	90	90	90	90					
	IKK 6	Persentase Fasilitasi Unit Kerja Potensial yang akan Diusulkan Berpredikat ZI di Wilayah 1	Pusat	100	100	100	100	100					
	001	Layanan Audit Internal	Pusat	1	1	1	1	1	3.531,71	3.743,61	3.968,23	4.206,32	4.458,70
	001.01	Jumlah Laporan Audit Internal	Pusat	1	1	1	1	1					
	001.02	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Pusat	1	1	1	1	1					
	001.03	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Pusat	1	1	1	1	1					
	001.04	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK	Pusat	N/A	1	1	1	1					
	001.05	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Pusat	1	1	1	1	1					
	001.06	Jumlah Laporan Fasilitasi Hasil Penilaian ZI	Pusat	1	1	1	1	1					
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana wilayah II	SK 31.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal yang Berbasis Risiko dan Berorientasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola di Wilayah II							3.508,49	3.719,00	3.942,14	4.178,67	4.429,39
	IKK 1	Persentase Penerapan PKPT Berbasis Risiko pada Wilayah II	Pusat	72	75	100	100	100					
	IKK 2	Persentase Temuan LHE AKIP Kementerian PAN dan RB yang Telah Direkomendasikan Perbaikannya dalam LHE AKIP Internal di Wilayah II	Pusat	41,67	90	90	90	90					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana wilayah III	IKK 3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP	Pusat	100	100	100	100	100					
	IKK 4	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK pada Wilayah II	Pusat	N/A	100	100	100	100					
	IKK 5	Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti secara Substantif pada Wilayah II	Pusat	N/A	90	90	90	90					
	IKK 6	Persentase Fasilitasi Unit Kerja Potensial yang akan Diusulkan Berpredikat Zi di Wilayah II	Pusat	100	100	100	100	100					
	001	Layanan Audit Internal	Pusat	1	1	1	1	1	3.508,49	3.719,00	3.942,14	4.178,67	4.429,39
	001. 01	Jumlah Laporan Audit Internal	Pusat	1	1	1	1	1					
	001. 02	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Pusat	1	1	1	1	1					
	001. 03	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Pusat	1	1	1	1	1					
	001. 04	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK	Pusat	N/A	1	1	1	1					
	001. 05	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Pusat	1	1	1	1	1					
	001. 06	Jumlah Laporan Fasilitasi Hasil Penilaian Zi	Pusat	1	1	1	1	1					
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana wilayah III	SK 32.1	Sasaran Kegiatan (Output): Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal yang Berbasis Risiko dan Berorientasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola di Wilayah III							3.532,05	3.743,97	3.968,61	4.206,73	4.459,13
	IKK 1	Persentase Penerapan PKPT Berbasis Risiko pada Wilayah III	Pusat	72	75	100	100	100					
	IKK 2	Persentase Temuan LHE AKIP Kementerian PAN dan RB yang Telah Direkomendasikan Perbaikannya dalam LHE AKIP Internal di Wilayah III	Pusat	41,67	90	90	90	90					
	IKK 3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP	Pusat	100	100	100	100	100					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK pada Wilayah III	IKK 4 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK pada Wilayah III	Pusat	N/A	100	100	100	100	100						
	IKK 5 Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti secara Substantif pada Wilayah III	Pusat	N/A	90	90	90	90	90						
	IKK 6 Persentase Fasilitasi Unit Kerja Potensial yang akan Diusulkan Berpredikat Zi di Wilayah III	Pusat	100	100	100	100	100	100						
	001 Layanan Audit Internal	Pusat	1	1	1	1	1	1	3.532,05	3.743,97	3.968,61	4.206,73	4.459,13	
	001. 01 Jumlah Laporan Audit Internal	Pusat	1	1	1	1	1	1						
	001. 02 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Pusat	1	1	1	1	1	1						
	001. 03 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Pusat	1	1	1	1	1	1						
	001. 04 Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi IEPK	Pusat	N/A	1	1	1	1	1						
	001. 05 Jumlah Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Pusat	1	1	1	1	1	1						
	001. 06 Jumlah Laporan Fasilitasi Hasil Penilaian Zi	Pusat	1	1	1	1	1	1						
Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	SK 33.1 Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya penyelenggaraan Dukungan manajeman yang berkualitas di Tingkat Provinsi								3.015.627,30	3.196.564,94	3.388.358,84	3.591.660,37	3.807.159,99	Perwakilan BKKBN Provinsi (32 Provinsi)
	IKK 1 Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen di Tingkat Provinsi	Provinsi	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56						
	001 Layanan organisasi dan tata kelola internal	Provinsi	32	32	32	32	32	32	24.614,77	26.091,66	27.657,16	29.316,59	31.075,58	
	001. 01 Jumlah Layanan hukum, organisasi dan tata kelola internal yang dilaksanakan	Provinsi	32	32	32	32	32	32						
	002 Layanan Perkantoran	Provinsi	32	32	32	32	32	32	2.991.012,53	3.170.473,28	3.360.701,68	3.562.343,78	3.776.084,41	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Base Line	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	002.01	Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan	Provinsi	12	12	12	12	12							
	SK 33.2	Sasaran Kegiatan (Output): Terwujudnya pengelolaan program yang akuntabel dan berintegrasi di Tingkat Provinsi							2.390,00	2.533,40	2.685,40	2.846,53	3.017,32		
	IKK 1	Indeks Zona Integritas (ZI)	Provinsi	71,6	75	75	75	75							
	001	Layanan audit internal	Provinsi	32	32	32	32	32	2.390,00	2.533,40	2.685,40	2.846,53	3.017,32		
	001.01	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Provinsi	32	32	32	32	32							
	SK 33.3	Sasaran Kegiatan (Output) : Terwujudnya SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang Berkualitas							10.016,95	3.957,42	4.194,86	4.446,55	4.713,34		
	IKK 1	Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang mengikuti pengembangan kompetensi untuk pemenuhan standar kompetensi	Provinsi	N/A	75	76	77	78	79						
	001	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi	N/A	2.645	1.045	1.045	1.045	1.045	10.016,95	3.957,42	4.194,86	4.446,55	4.713,34	
	001.01	Persentase SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang mendapatkan pelatihan	Provinsi	N/A	100	100	100	100	100						
	001.02	Persentase peserta pelatihan SDM internal Kemendukbangga/BKKBN provinsi yang lulus dengan kategori memuaskan dan sangat memuaskan	Provinsi	N/A	83	84	86	88	90						

LAMPIRAN 2:

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DARI SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ BKKBN

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah)					Total (Dalam Juta Rupiah)						
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2025	2026	2027	2028	2029		
KP 02 Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama keluarga	Percentase Pusat Pelayanan Kefuarga Sejahtera yang terjangkau	70 (3.49 1)	75 (3.74 0)	80 (3.99 0)	85 (4.23 9)	90 (4.48 8)	15.8 13,5 0	16.7 62,3 1	17.7 68,0 5	18.8 34,1 3	19.9 64,1 8						15.813,50	16.762,31	17.768,05	18.834,13	19.964,18		
	Percentase tempat penitipan anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	10	20	30	40	50																	
ProP 1 Penyediaan Fasilitas dan Lingkungan Pendukung Keluarga																							
Pemerintah pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pendampingan pengasuhan di tempat penitipan anak (TPA) (**)	Jumlah Pemerintah pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pendampingan pengasuhan di tempat penitipan anak (TPA)	38	38	38	38	38	4.300 ,00	4.558 ,00	4.831 ,48	5.121 ,37	5.428 ,65						4.300,00	4.558,00	4.831,48	5.121,37	5.428,65		
Provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyalagrta)	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyalagrta)	38	38	38	38	38	420,0 0	445,2 0	471,9 1	500,2 3	530,2 4						420,00	445,20	471,91	500,23	530,24		
Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	180	194	207	220	234	200,0 0	212,0 0	224,7 2	238,2 0	252,5 0						200,00	212,00	224,72	238,20	252,50		
Kampung Keluarga Berkualitas (**)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan penanganan terpadu dampak kependudukan	28.99 2	33.17 2	37.34 8	41.52 5	45.70 6	10.70 0,00	11.34 2,00	12.02 2,52	12.74 3,87	13.50 8,50						10.700,00	11.342,00	12.022,52	12.743,87	13.508,50		
ProP 02 Pusat Layanan Konsultasi dan Konseling keluarga																							
Keluarga yang mendapatkan pelayanan konsultasi dan konseling keluarga	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pelayanan konsultasi dan konseling keluarga	208.1 75	279.9 59	351.7 44	423.5 28	495.3 12	193,5 0	205,1 1	217,4 2	230,4 6	244,2 9						193,50	205,11	217,42	230,46	244,29		
KP 03 Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi Bagi Keluarga Rentan	Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga	55,4 1	56,4 1	57,4 1	58,4 1	59,4 1	2,69 8,72	2,86 0,65	3,03 2,28	3,21 4,22	3,40 7,07						2.698,72	2.860,65	3.032,28	3.214,22	3.407,07		
	Indeks Kerentanan Keluarga	8,60	8,40	8,20	8,00	7,80																	
ProP 02 Penguatan Keluarga Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																							
Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang	Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang	38	38	38	38	38	2.465 ,22	2.613 ,14	2.769 ,92	2.936 ,12	3.112 ,29						2.465,22	2.613,14	2.769,92	2.936,12	3.112,29		

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah)					Total (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	2025	2026	2027	2028	2029
pemberdayaan ekonomi keluarga	pemberdayaan ekonomi keluarga																				
Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia (**)	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga lansia	38	38	38	38	38															
Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pembinaan ketahanan keluarga rentan	38	38	38	38	38	233,5 0	247,5 1	262,3 6	278,1 0	294,7 9						233,50	247,51	262,36	278,10	294,79
KP 01 Penurunan kematian ibu dan anak	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	19,4 0	19,0 0	18,6 0	18,2 0	17,8 0	16,6 81,4 9	17,6 82,3 8	18,7 43,3 3	19,8 67,9 3	21,0 60,0 0						16.931,49	17.947,38	19.024,23	20.165,68	21.375,62
	Persentase KB Pascapersalinan	57	60	64	69	75															
ProP 2 Penguatan pelayanan Promotif & Preventif ibu dan anak																					
Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan dalam peningkatan pelayanan KB Pascapersalinan	Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan dalam peningkatan pelayanan KB Pascapersalinan	38	38	38	38	38	987,0 0	1.046 ,22	1.108 ,99	1.175 ,53	1.246 ,06						987,00	1.046,22	1.108,99	1.175,53	1.246,06
Fasilitasi Substansi dan Bimbingan Teknis dalam pembinaan PUS atas KTD dan kehamilan berisiko tinggi (4T) bagi Provinsi	Jumlah Fasilitasi Substansi dan Bimbingan Teknis dalam pembinaan PUS atas KTD dan kehamilan berisiko tinggi (4T) bagi Provinsi	38	38	38	38	38	440,0 0	466,4 0	494,3 8	524,0 5	555,4 9						440,00	466,40	494,38	524,05	555,49
Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	508	508	508	508	508	9.358 ,76	9.920 ,29	10.51 ,51	11.14 ,64	11.81 ,522						9.358,76	9.920,29	10.515,51	11.146,44	11.815,22
Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP	Jumlah Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP	2.651 .746	2.791 .320	2.977 .404	3.210 .028	3.489 .153	5.895 ,73	6.249 ,47	6.624 ,44	7.021 ,91	7.443 ,22						5.895,73	6.249,47	6.624,44	7.021,91	7.443,22

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah)					Total (Dalam Juta Rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2025	2026	2027	2028	2029	
Fasilitasi dan Pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP (Pro Pn DKI Jakarta)	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP (Pro Pn DKI Jakarta)	38.762	85.388	91.336	97.887	105.908	250	265	280,90	297,75	315,62						250	265	280,90	297,75	315,62	
KP 02 Pencegahan dan Penurunan Stunting	Percentase keluarga sasaran yang mendapatkan pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	75	80	85	90	95	36,8 66,8 0	35,6 41,8 1	35,1 15,1 6	36,0 03,3 4	32,5 43,0 9						36.866,80	35.641,81	35.115,16	36.003,34	32.543,09	
ProP 2 Penguatan Intervensi Sensitif Stunting																						
Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) (**)	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	93800	93800	93800	93800	93800	562,04	595,76	631,50	669,39	709,56						562,04	595,76	631,50	669,39	709,56	
Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga	Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dalam peningkatan pemberdayaan Tim Pendamping Keluarga	38	38	38	38	0	11.08 9,62 (HLN)	8.318 .00 (HLN)	6.151 .93 (HLN)	5.302 .31 (HLN)	0,00 (HLN)						11.089,62	8.318,00	6.151,93	5.302,31	0,00	
Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	Jumlah Provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	38	38	38	38	38	3.300 .00	3.498 .00	3.707 .88	3.930 .35	4.166 .17						3.300,00	3.498,00	3.707,88	3.930,35	4.166,17	
Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK (**)	Jumlah Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK	7.976 .954	7.976 .954	7.976 .954	7.976 .954	7.976 .954	21.91 5,14	23.23 0,05	24.62 3,85	26.10 1,28	27.66 7,36						21.915,14	23.230,05	24.623,85	26.101,28	27.667,36	
	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota memberikan pendampingan pengasuhan di BKB HI	508	508	508	508	508																
KP 03 Peningkatan Pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	61,8	61,9	62	62,1	62,2	660. 484, 29	700. 113, 35	742. 120, 15	786. 647, 36	833. 846, 20						660.484,29	700.113,35	742.120,15	786.647,36	833.846,20	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need KB)	10,5	10	9,5	9	8,5																
	Persentase peserta KB aktif metode	25,7	26	26,2	26,4	26,7																

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah)					Total (Dalam Juta Rupiah)							
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2025	2026	2027	2028	2029			
	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																							
ProP 3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Lansia																								
Pedoman terkait peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga	Jumlah pedoman terkait peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga	1	1	1	1	1	190,0 0	201,4 0	213,4 8	226,2 9	239,8 7						190,00	201,40	213,48	226,29	239,87			
ProP 4 Peningkatan Pelayanan Kb dan Kespro																								
Fasyankes yang mendapat pemuatan ketersediaan alokon	Persentase Fasyankes terregister di Kemendukbangga/BKKBN yang mendapat pemuatan ketersediaan alokon	100	100	100	100	100	666,0 0	705,9 6	748,3 2	793,2 2	840,8 1						666,00	705,96	748,32	793,22	840,81			
	Persentase Fasyankes yang mengalami stock out Alokon	29,9	27,9	25,9	23,9	21,9																		
Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB	Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang akses pelayanan KB	38	38	38	38	38	999,0 0	1.058 ,94	1.122 ,48	1.189 ,82	1.261 ,21						999,00	1.058,94	1.122,48	1.189,82	1.261,21			
Pedoman di bidang akses pelayanan KB	Jumlah pedoman di bidang akses pelayanan KB yang tersedia	2	2	2	2	2	442,0 0	468,5 2	496,6 3	526,4 3	558,0 1						442,00	468,52	496,63	526,43	558,01			
PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	384	384	384	384	384	400,0 0	424,0 0	449,4 4	476,4 1	504,9 9						400,00	424,00	449,44	476,41	504,99			
Provinsi Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Di Bidang Pembinaan Ketahanan Remaja	Jumlah Provinsi Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Di Bidang Pembinaan Ketahanan Remaja	38	38	38	38	38	368,9 5	391,0 9	414,5 5	439,4 3	465,7 9						368,95	391,09	414,55	439,43	465,79			
Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi	Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi	38	38	38	38	38	350,0 0	371,0 0	393,2 6	416,8 6	441,8 7						350,00	371,00	393,26	416,86	441,87			
Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pelayanan KB wilayah khusus	Jumlah Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang KB di wilayah khusus	38	38	38	38	38	4.526 ,21	4.797 ,78	5.085 ,64	5.390 ,78	5.714 ,23						4.526,21	4.797,78	5.085,64	5.390,78	5.714,23			
Pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana yang tersedia	1	1	1	1	1	150,0 0	159,0 0	168,5 4	178,6 5	189,3 7						150,00	159,00	168,54	178,65	189,37			

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Dalam Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Dalam Juta Rupiah)					Total (Dalam Juta Rupiah)						
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pembentukan Karakter Remaja																						
KP 03 Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ProP 02 Penguatan Kapasitas Perawatan Masyarakat																							
Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis di bidang pengasuhan anak usia dini (**)	Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang pengasuhan anak usia dini	38	38	38	38	38																	
	Jumlah Keluarga memiliki anak usia dini mendapatkan pendampingan pengasuhan di BKB HI	3.537 .380	4.280 .060	5.178 .688	6.265 .687	7.581 .204																	
Pemerintah pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pendampingan pengasuhan di tempat penitipan anak (TPA) (**)	Jumlah Pemerintah pusat dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pendampingan pengasuhan di tempat penitipan anak (TPA)	38	38	38	38	38																	

(**)

Mendukung 2 KP

(***)

Mendukung 3 KP

LAMPIRAN 3:

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Revisi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	<p>Beberapa substansi dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan beberapa substansi yang diatur sebagai upaya dukungan terhadap dukungan transformasi bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Substansi kependudukan dan pembangunan keluarga memiliki dampak strategis dan lintas sektor sehingga perlu diatur pada tingkat Undang-Undang. 2. kebijakan kependudukan menyangkut pengendalian fertilitas, mortalitas, serta migrasi yang memengaruhi perencanaan pembangunan nasional. Hal ini bukan hanya isu teknis, tetapi menyangkut arah pembangunan jangka panjang dan stabilitas nasional. 3. Pembangunan keluarga tidak hanya menyangkut pembinaan sosial, melainkan fondasi bagi pembangunan manusia yang berkualitas. 4. kebijakan pembangunan keluarga berisiko tidak memiliki legitimasi kuat, tumpang tindih dengan aturan sektoral lain, dan tidak dapat mengintegrasikan berbagai program lintas kementerian/lembaga. 5. Perubahan kelembagaan dalam pelaksanaan urusan pemerintah bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. 	Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemensekneg; 2. Kemen PPN/Bappenas; 3. Kemenkeu; 4. Kemenkes; 5. Kemenko PMK; 6. Kemendagri; 7. Kemenkum; 8. Kemen PPPA. 	2026 - 2029
2.	Usulan Perubahan Lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan pembagian urusan bidang kependudukan dan Pembangunan Keluarga	<p>Dengan adanya kelembagaan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu mengubah urusan yang ada pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Usulan perubahan tersebut dalam upaya pelaksanaan urusan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di daerah.</p>	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendagri; 2. Kemenkeu; 3. Kemenko PMK; 4. Kemenkum. 	2025 - 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3.	Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Program kegiatan DAK akan membantu mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dalam hal tersebut pelaksanaan urusan bidang Kependudukan dan Pembangunan perlu petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.	Biro Perencanaan dan Keuangan	1. Kemen PPN/ Bappenas; 2. Kemenkeu; 3. Kemendagri; 4. Kemenkum.	2025 - 2029
4.	Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Dalam rangka usulan perubahan urusan bidang pengendalian penduduk dan KB menjadi urusan Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu merubah pengaturan NSPK Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan urusan di daerah,	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	1. Kemendagri; 2. Kemenkeu; 3. Kemenko PMK; 4. Kemenkum.	2025 - 2029
5.	Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)	Dalam mengimplementasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai upaya mencapai kualitas penduduk yang tinggi, mewujudkan penduduk yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta memastikan keseimbangan antara pembangunan dengan pertumbuhan penduduk demi kemajuan bangsa dan kelestarian diperlukan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	1. Kemen PPN/ Bappenas; 2. Kemenkeu; 3. Kemenko PMK; 4. Kemendagri; 5. Kemenkum; 6. BPS.	2026 - 2027
6.	Perubahan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi	Dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional diperlukan evaluasi terkait dengan Perwakilan BKKBN, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan perubahan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	1. Kemendagri; 2. Kemenkeu; 3. KemenPAN RB; 4. Kemenkum.	2026 - 2027
7.	Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit	Dengan adanya transformasi kelembagaan menjadi kementerian perlu Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana	1. Kemendagri; 2. Kemenkeu; 3. KemenPAN RB; 4. Kemenkum.	2026 - 2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian	
	Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Nasional Nomor 12 Tahun 2020 yang memuat: a. Penyesuaian tugas dan fungsi; b. Pembentukan satuan kerja; c. Penambahan Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan.				
8.	Perubahan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Perubahan Peraturan ini bertujuan untuk: a. meningkatkan kinerja dan efektivitas Pendayagunaan Penyuluh KB dan PLKB oleh PD-KB di daerah kabupaten/kota dalam mencapai tujuan program; b. memeratakan pelayanan masyarakat c. meningkatkan pelayanan.	Direktorat Penggerak Lapangan	Bina Lini	1. KemenPAN RB; 2. Kemenkum.	2025
9	Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan	Perubahan Peraturan ini dimaksudkan menjadi pedoman kerja bagi pengelola dan pelaksana program dan pelayanan KBPP, muatan dalam perubahan ini: a. Tata Kelola Program dan Pelayanan KBPP; b. Sistem Informasi Dan Evaluasi KBPP; c. Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pelayanan KBPP; d. Pendanaan Kegiatan Program KBPP dan Pembiayaan Pelayanan KBPP; e. Alat Kontrasepsi dan Material Pendukung Kegiatan dan Pelayanan KBPP; f. Pembinaan Partisipasi Keluarga dan Masyarakat.	Direktorat Kesehatan Reproduksi	Bina	1. Kemenkes, 2. Kemenko PMK; 3. Kemenkum; 4. Kemen PPPA.	2025
10	Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perubahan Peraturan ini mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Jabatan Fungsional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga terdiri atas: a. Jabatan Fungsional Penata KKB; b. Jabatan Fungsional Penyuluh KB; dan c. Jabatan Fungsional PLKB.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana		1. KemenPAN RB; 2. Kemenkum; 3. BKN.	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan Uji Kompetensi terdiri atas: a. penyelenggara Uji Kompetensi; b. peserta Uji Kompetensi; c. materi, metode, dan periode Uji Kompetensi; d. tahapan Uji Kompetensi; dan e. Sertifikat Kompetensi.			
11.	Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Peraturan ini disusun karena terjadinya transformasi kelembagaan menjadi kementerian dan dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja dalam pembuatan, pengamanan, penandatanganan, dan pengendalian Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ruang lingkup Tata Naskah Dinas meliputi: a. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. pengamanan Naskah Dinas; d. pejabat penanda tangan Naskah Dinas; dan e. pengendalian Naskah Dinas.	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	1. KemenPAN RB; 2. Kemenkum; 3. ANRI.	2025
12.	Perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	a. dalam rangka perubahan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diperlukan pengaturan tugas, fungsi, dan kewenangan terkait koordinasi, penyusunan rencana, dan fasilitasi penyiapan program penyusunan Peraturan Menteri; b. meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga .	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	1. Kemensekneg; 2. Kemenkum.	2026
13.	Perubahan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 205/PER/B4/2011	Perubahan Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur sebagai acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	1. KemenPAN RB; 2. Kemenkum.	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memuat: a. langkah-langkah persiapan penyusunan; b. tahap-tahap penyusunan; c. pembuatan diagram alur kegiatan.			
14.	Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN	Mekanisme penyediaan informasi publik kepada masyarakat di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan prinsip keterbukaan, yang dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pemerintah, dengan dasar utama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Layanan ini mencakup proses permintaan informasi, penyediaan informasi, hingga penanganan pengaduan masyarakat dan keberatan atas informasi.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	1. Kementerian Komunikasi dan Digital; 2. Kemen PPN/ Bappenas; 3. KemenPAN RB; 4. Kemenkum.	2027
15.	Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja	Peraturan ini disusun dalam pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) meliputi: a. pembentukan kelompok; b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rutin; c. pengembangan dan pemantapan kelompok melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan. Pengelolaan BKR bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua dalam membina remaja agar tumbuh kembang secara optimal.	Direktorat Bina Ketahanan Remaja	1. KemenPPPA; 2. Kemen PPN/ Bappenas; 3. Kemensos; 4. Kemenkum; 5. BIN.	2027
16.	Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan di Bidang Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.	Dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana diperlukan payung hukum dalam penciptaan dan penyusunan kebijakan di	Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	1. Kemenkum; 2. LAN; 3. BRIN.	2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.			

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIHAJI